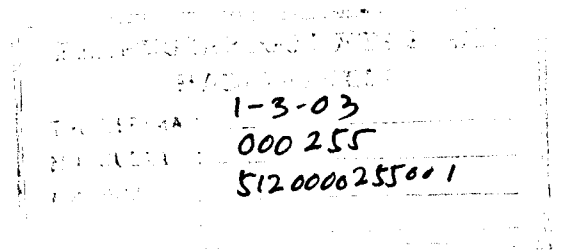
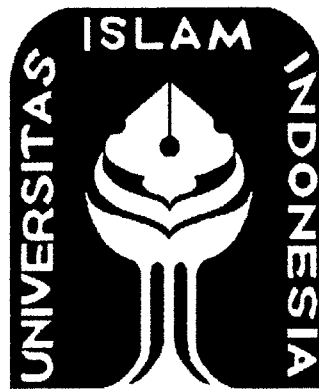


TUGAS AKHIR



GEDUNG PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KULON PROGO

Penerapan Citra Keterbukaan dan Kewibawaan
Dengan Kontektual pada Bangunan Tradisional Kulon Progo



Disusun Oleh :

Novida Kartika Hadhi
97 512 068

JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JOGJAKARTA
2002



LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**GEDUNG PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI KULON PROGO**

Penerapan Citra Keterbukaan dan Kewibawaan
Dengan Kontektual pada Bangunan Tradisional Kulon Progo

Disusun Oleh :

Novida Kartika Hadhi

97 512 068

Laporan Tugas Akhir ini telah diseminarkan

3 Agustus 2002

Diperiksa dan disetujui

Dosen Pembimbing I



(Ir. Fajriyanto, MTP)

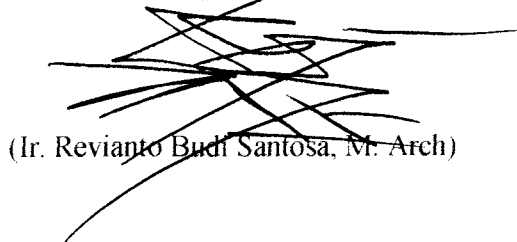
Dosen Pembimbing II



(Ir. Noor Cholis Idham)

Mengetahui :

Ketua Jurusan Arsitektur



(Ir. Reviyanto Budi Santosa, M. Arch)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan,
dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan.
(Al-Inshiroh : 5-6)*

*Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada akal yang diperindah dengan ilmu,
Dan ilmu yang diperindah dengan kebenaran dan kebenaran yang diperindah
Dengan kebaikan dan kebaikan yang diperindah dengan takwa*

*Allahi tidak akan memberikan cobaan kepada seseorang diluar kemampuan-nya dan semata-mata
karena sayang kepadanya, sesungguhnya dibalik cobaan itu pasti ada jalan keluarnya, maka
bersabar dan berusahalah.*

*Kupersembahkan karya kecil ini untuk Orang2 yang dekat denganku:
Bapak-ku dan ibuku atas segala doa. Dukungannya
Mbak Ririk, Iwul dan eMbah-ku
Seluruh Keluarga Besar
Im Inayati dan Keluarganya*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil aalaminn, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nyalah saya dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul **Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo dengan penekanan pada Penerapan Citra Keterbukaan dan Kewibawaan dengan Kontektual pada Arsitektur Bangunan Tradisional Kulon Progo.**

Pelaksanaan otonomi daerah pada era Reformasi membawa banyak perubahan pada sistem dan sistim pemerintahan sampai unsur-unsurnya, hal tersebut berdampak pada kebutuhan akan ruang-ruang baru pada bangunan pemerintahan baik itu menyeluruh maupun internal lembaga. Begitu pula pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo yang dinilai tidak representative lagi menanggapi perubahan-perubahan yang ada pada sisitem pelaksanaan kerja, tuntutan masyarakat atas pelayanan anggota dewan, pengaruh sistem pemerintahan reformasi serta ketidak sesuaian antara kebutuhan dan kapasitas ruang di gedung DPRD Kulon Progo merupakan faktor yang melatar belakangi dibutukkannya gedung DPRD baru yang dapat merespon tugas dan wewenang DPRD yaitu bangunan yang memberi kesan terbuka dan wibawa serta kontektual pada arsitektur tradisional Kulon Progo sebagai identitas daerah.

Keberhasilan penulis dalam meyelesaikan penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ir. Widodo, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia
2. Ir. Revianto BS, M.ARCH selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Islam Indonesia.
3. Ir. Fajrianto, MTP dan Ir. Nurcholis Idham selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dengan memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama melakukan penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Sri Panudju Karso dan Ibu serta seluruh keluarga besar atas doa, restu dan dukungannya.
5. “INOEL” yang sangat membantu penulis dalam segala hal.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan, Bagian pengajaran serta karyawan-karyawan lain yang telah banyak membantu saya.
7. Udi-Winda, Aconk, No-no”, Cah-cah Kayen, cah-cah Muja Muju sing ngancani turu, teman-teman satu bimbingan, Budi, Simbah, Koko,.....
8. Semua teman-teman yang kenal dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah ikhlas membantu selama penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam karya ini, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan.

Jogjakarta, 3 Agustus 2002

NOVIDA KARTIKA HADHI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Kata Pengantar	iv
Halaman Daftar Isi	.vi
Halaman Daftar Tabel	xi
Halaman Daftar Gambar	xii
Abstraksi	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Gedung DPRD	1
1.1.2 Gedung DPRD Tk II Kulon Progo	1
1.1.2.1 Tuntutan Masyarakat Terhadap Pelayanan Anggota Dewan	1
1.1.2.2 Pengaruh Sistem Pemerintahan Reformasi	2
1.1.2.3 Ketidak sesuaian Antara Kebutuhan dan Kapasitas Ruang	2
1.1.3 Ekspresi dan Identitas Wilayah Sebagai Latar Belakang Arsitektural	3
1.1.3.1 Aplikasi Citra Keterbukaan dan Kewibawaan Sebagai Ekspresi bangunan	3
1.1.3.2 Aplikasi Banguna Tradisional Sebagai Simbol Identitas dan Jati Diri Bangunan	4
1.1.4 Manifestasi dan Citra Identitas kedalam Bangunan Gedung DPRD Kulon Progo	5

1.2. Permasalahan	6
1.2.1 Permasalahan Umum	6
1.2.2 Permasalahan Khusus	6
1.3. Tujuan dan Sasaran	7
1.3.1 Tujuan	7
1.3.2 Sasaran	7
1.4. Batasan Dan Lingkup Pembahasan	7
1.4.1 Batasan	7
1.4.2 Lingkup Pembahasan	8
1.4.2.1 Lingkup Non arsitektural	8
1.4.2.2 Lingkup Arsitektural	8
1.5. Metode Pengambilan Data	9
1.5.1 tahap Pencarian Data	9
1.6. Metode Pembahasan	9
1.6.1. Diskriptif	9
1.6.2. Analisis	9
1.6.3. Sintesa	10
1.7. Sistematika Penulisan	10
1.8. Keaslian Penulisan	11

BAB II : TINJAUAN GEDUNG DPRD KULON PROGO DAN TINJAUAN TEORITIS CITRA BANGUNAN

2.1. Tinjauan Studi bangunan Gedung DPRD	13
2.1.1 Gedung DPRD Sebagai Wadah Aktifitas Kegiatan DPR	13
2.1.1.1 Pengertian DPRD	13
2.1.1.2 Tugas dan Wewenang DPR	13
2.1.1.3 Kegiatan Pada Gedung DPRD	14
2.1.2 Kebutuhan Ruang Pada Gedung DPRD	18
2.2. Tinjauan Gedung DPRD Kulon Progo	20

2.2.1. Struktur dan Unsur Pelaku dalam Gedung DPRD Kulon Progo	20
2.3. Tinjauan Ekspresi Bangunan	22
2.3.1. Aspek Guna dan Citra	22
2.3.2. Ekspresi Citra Keterbukaan dan Kewibawaan	22
2.3.2.1 Kesan Keterbukaan	23
2.3.2.2 Kesan Kewibawaan	24
2.3.3 Penampilan Pada Gedung DPRD	25
2.4. Tinjauan Arsitektur Tradisional Kulon Progo	28
2.4.1. Joglo Sebagai Identitas Bangunan Tradisional Kulon Progo	28
2.4.2. Fungsi, Karakter dan Makna Ruang pada Bangunan Joglo	29
2.5. Tinjauan Perancangan Gedung DPRD	32
2.5.1. Prinsip Dasar Perancangan Gedung DPRD	32
2.5.1.1 Sirkulasi pada Gedung DPRD	33
2.5.1.2 Orientasi Gedung DPRD	34
2.5.1.3 Tata Masa Pada Gedung DPRD	35
2.5.1.4 Tata Ruang Gedung DPRD	36
2.6 Tinjauan Studi banding	.37
2.6.1 Gedung DPRD Sleman	37
2.6.2 Gedung DPRD DIY	38
2.6.3 Gedung DPRD Bantul	38

BAB III: ANALISIS GEDUNG DPRD KULON PROGO

A. Analisis Fungsional Bangunan

3.1 Analisa Lokasi	39
3.1.1 Penentuan Lokasi Site	39
3.1.2 Potensi Site	40

3.1.3 Analisis Site	41
3.1.3.1 Sirkulasi Site	41
3.1.3.2 View Dari Dalam atau Luar Site	44
3.2. Fungsi dan Kebutuhan Ruang.	46
3.2.1 Analisa Kegiatan Pelaku	46
3.2.2 Analisa Kebutuhan dan Besaran Ruang	53
3.2.3 Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang	57
3.2.3.1 Hubungan Ruang	57
3.2.3.2 Organisasi Ruang	58
B. Analisis Citra dan Kesan Bangunan	
3.3 Analisa Kesan Keterbukaan dan Kewibawaan serta Kontektual pada Bangunan Tradisional	60
3.3.1 Analisa Kesan Keterbukaan	60
3.3.2 Analisa Kesan Kewibawaan	62
3.3.3 Analisa Kontektual Bangunan pada Arsitek Tradisional.	.63
C. Analisis Dasar Perancangan	
3.4 Analisa Dasar Perancangan Bangunan	67
3.4.1 Tata masa	.67
3.4.2 Tata Ruang	70
3.4.3 Sirkulasi Bangunan	71
3.4.4 Orientasi bangunan	72
3.5 Analisa Pendekatan Bangunan	73
3.5.1 Pendekatan struktur	73
3.5.2 Pendekatan Sistem Utilitas	74

BAB IV : KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

4.1. Konsep Dasar Perencanaan	78
4.1.1 Konsep Penentuan Site	78
4.2. Konsep Dasar Perancangan	78

4.2.1 Konsep Kebutuhan Ruang dan Orgasasi Ruang	.78
4.2.1.1 Konsep Kebutuhan Ruang	78
4.2.1.2 Konsep Hubungan Ruang	81
4.2.1.3 Konsep Organisasi Ruang	82
4.2.2 Konsep Tata Masa	82
4.2.3 Konsep Penataan Ruang Luar	84
4.2.4 Konsep Penataan Landscape	85
4.2.5 Konsep Penataan Ruang Dalam	87
4.2.5.1 Konsep Penataan Ruang Demonstrasi (HALL).	87
4.2.5.2 Konsep Ruang Sidang Paripurna	89
4.2.5.3 Konsep ruang Sidang	90
4.2.5.4 Konsep Perletakan Ruang Parkir	91
4.2.6 Konsep Perletakan Sirkulasi	92
4.2.6.1 Konsep Perletakan Sirkulasi Ruang Luar	92
4.2.6.2 Konsep sirkulasi Ruang Dalam	92
4.2.7 Konsep Pembentukan Fasade bangunan	93
4.2.8 Konsep Struktur	94
4.2.9 konsep Sistem Utilitas	95

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

JUDUL

Tabel 2.1	Studi banding Ruang-ruang Gedung DPRD	18
Tabel 2.2	Kelompok Jenis dan Ruang Gedung DPRD	19
Tabel 3.1	Kegiatan dan Kebutuhan Ruang	46
Tabel 3.2	Ruang Publik Anggota Dewan Legislatif	54
Tabel 3.3	Ruang Publik Sekretariat DPRD	54
Tabel 3.4	Ruang Semi Publik Anggota Legislatif	55
Tabel 3.5	Ruang Semi Publik Sekretariat	55
Tabel 3.6	Ruang Prifat Anggota Legislatif	55
Tabel 3.7	Ruang Prifat sekretariat DPRD	56
Tabel 3.8	Ruang Servis Anggota Legislatif.	56
Tabel 3.9	Ruang Servis Sekretariat DPRD	56
Tabel 3.10	Dasar Penentu Kesan Terbuka	60
Tabel 3.11	Dasar Penentu Kesan Wibawa	62
Tabel 3.12	Dasar Penentu pada Kontektual Bangunan Tradisional	63
Tabel 3.13	Pendekatan Dasar Perancangan dengan Penampilan bangunan.	67

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

Gbr. 2.1	Struktur Organisasi DPRD Kulon Progo	21
Gbr. 2.2	Struktur Sekretariat DPRD Kulon Progo	21
Gbr. 2.3	Hirarki Derajat Keterbukaan	23
Gbr. 2.4	Contoh Bangunan yang Berkesan Terbuka	23
Gbr. 2.5	Skala pada Derajat Kewibawaan	24
Gbr. 2.6	Contoh Bangunan yang Berkesan Wibawa	24
Gbr. 2.7	Denah dan Ruang Joglo	29
Gbr. 2.8	Arah Pencapaian	33
Gbr. 2.9	Orientasi pada View dan Sinar Matahari	34
Gbr. 2.10	Derajat Keterbukaan dan Kewibawaan pada Vegetasi	35
Gbr. 2.11	Susunan Tata Masa	36
Gbr. 2.12.	Proporsi keterbukaan pada Ruang.	37
Gbr. 2.13	Gedung DPRD Sleman	37
Gbr. 2.14	Gedung DPRD DIY	38
Gbr. 2.15	Gedung DPRD Bantul.	38
Gbr. 3.1	Site bangunan Gedung DPRD Kulon Progo	40
Gbr. 3.2	Sikulasi Luar Site	41
Gbr. 3.3	Alternatif Pencapaian..	42
Gbr. 3.4	Arah Pencapaian.	43
Gbr. 3.5	Pola Sirkulasi..	43
Gbr. 3.6	Arah View bangunan..	44
Gbr. 3.7	Bagan Kegiatan Demonstrasi	48
Gbr. 3.8	Hall Dengan Ruang Terbuka	49
Gbr. 3.9	Bagan Kegiatan Sidang Paripurna.	50
Gbr. 3.10	Ruang Sidang Paripurna.	51
Gbr. 3.11	Susunan Secara Kluster.	52

Gbr. 3.12	Susunan Secara Hirarki..	52
Gbr. 3.13	Ruang Sidang Secara Kluster.	53
Gbr. 3.14	Bagan Hubungan Ruang	58
Gbr. 3.15	Bagan Organisasi Ruang.	59
Gbr. 3.16	Open Space Sebagai Ruang Gerak.	60
Gbr. 3.17	Hirarki Sirkulasi.	61
Gbr. 3.18	Penonjolan Struktur	62
Gbr. 3.19	Simbolisasi Atap Joglo pada Gedung DPRD.	64
Gbr. 3.20	Pemaknaan Bentuk masa pada Gedung DPRD	65
Gbr. 3.21	Sirkulasi Sebagai Garis Keseimbangan Masa	65
Gbr. 3.22	Vegetasi Sebagai Batas Area.	66
Gbr. 3.23	Alternatif Tata Masa	67
Gbr. 3.24	Bentuk Dasar Masa	68
Gbr. 3.25	Pencerminan Masa Utama	69
Gbr. 3.26	Open Space Sebagai dasar Penyesuaian Bentuk Masa	69
Gbr. 3.27	Kelompok Sirkulasi	71
Gbr. 3.28	Derajat Sirkulasi	72
Gbr. 3.29	Arah Fasade Bangunan	72
Gbr. 3.30	.Orientasi Fasade Bangunan	73
Gbr. 3.31	Bagan Distribusi Air Listrik	74
Gbr. 3.32	Bagan Distribusi air Bersih	77
Gbr. 4.1	Site Bangunan Gedung DPRD Kulon Progo	78
Gbr. 4.2	Bagan Hubungan Ruang	81
Gbr. 4.3	Penelompokan Masa..	81
Gbr. 4.4	Bagan Organisasi Ruang	82
Gbr. 4.5	Penyusunan Masa..	83
Gbr. 4.6	Perletakan Masa	83
Gbr. 4.7	Keselarasan Susunan Masa	84
Gbr. 4.8	Penzoningan dan Penataan Landscape.	85

Gbr. 4.9	Pencapaian dan Sirkulasi Ruang.	86
Gbr. 4.10	Orientasi Bangunan Terhadap View dari Luar.	86
Gbr. 4.11	Orientasi Bangunan Terhadap Sinar Matahari	87
Gbr. 4.12	Arah Gerak Kegiatan Demonstrasi.	88
Gbr. 4.13	Sketsa Penerapan Ruang Demonstrasi	88
Gbr. 4.14	Arah Gerak Kegiatan Sidang Paripurna	89
Gbr. 4.15	Sketsa Penerapan Ruang Sidang Paripurna	89
Gbr. 4.16	Hierarki Kewibawaan Pada Ruang Sidang	90
Gbr. 4.17	Hubungan dan Interaksi Peserta Sidang secara Ber-kelompok	90
Gbr. 4.18	Arah Pencapaian Kendaraan	91
Gbr. 4.19	Penelompokan Area Parkir	91
Gbr. 4.20	Sketsa Penerapan Ruang Parkir Luar	91
Gbr. 4.21	Perletakan Sirkulasi Ruang Luar	92
Gbr. 4.22	Fasade Bangunan	93
Gbr. 4.23	Arah Bangunan	94
Gbr. 4.24	Struktur Rangka Beton Bertulang	94
Gbr. 4.25	Kolom Ganda sebagai Shading	94
Gbr. 4.26	Bagan Pendistribusian Listrik	95
Gbr. 4.27	Bagan Distribusi Air Bersih	97

ABSTRAK

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo merupakan gedung perkantoran yang terletak di kota Administrasi Kulon Progo, dimana dalam perkembangannya dinilai tidak representative lagi atau tidak dapat mewakili status gedung sebagai wadah aktifitas anggota Dewan Legislatif Daerah. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan anggota DPRD setelah era Reformasi berlangsung, perubahan-perubahan pada sistem dan sistim pemerintahan saat era Reformasi serta ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kapasitas ruang.

Pada analisa, metode penulisan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu analisa fungsional bangunan yang membahas tentang kedudukan site, fungsi umum bangunan dan fungsi ruang serta besarnya. Kelompok yang kedua adalah analisa citra dan kesan bangunan yang membahas tentang dasar-dasar kesan keterbukaan dan kewibawaan yaitu dasar-dasar umum yang dapat membentuk ekspresi bangunan yang berkesan terbuka dan wibawa serta citra bangunan yang kontekstual pada bangunan Joglo sebagai bangunan tradisional Kulon Progo yang membahas tentang metode penerapan arsitektur tradisional secara analogi dan simbolisasi dengan metode preseden. Kelompok ketiga adalah analisa dasar perancangan yang membahas penerapan dasar perancangan dengan unsur penampilan bangunan melalui kesesuaian penerapan kesan dan citra bangunan yaitu, kesesuaian dasar perancangan dengan kesan dan citra yang dapat diterapkan melalui unsur-unsur penampilan bangunan.

Hasil pengembangan pada analisa merupakan dasar-dasar yang diambil untuk menyusun konsep perancangan, yaitu penerapan dari analisa satu dan dua yang diterapkan pada analisa ketiga meliputi konsep penentuan site, konsep kebutuhan ruang, konsep hubungan dan organisasi ruang, konsep tata masa, konsep penataan ruang dan lanscape, konsep perletakan sirkulasi serta konsep pembentukan fasade, struktur dan utilitas yang semuanya dihubungkan dengan penerapan kesan dan citra bangunan yang kontekstual dengan arsitektur tradisional Kulon Progo. Penerapan kesan Keterbukaan dimaksimalkan pada ruang-ruang publik sedangkan kesan Kewibawaan dimaksimalkan pada ruang-ruang priifat, serta citra bangunan yang kontekstual pada bangunan Tradisional diterapkan pada vasade bangunan.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Gedung DPRD

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wadah aktifitas lembaga pemerintahan dari anggota Dewan Legislatif dalam bentuk bangunan. Aktivitas kegiatan tersebut berhubungan dengan dua unsur yaitu Kelembagaan Eksekutif dengan masyarakat dimana keduanya mempengaruhi tugas dan wewenang dari anggota Dewan Legislatif tersebut. Hubungan DPR dengan Lembaga Pemerintahan merupakan hubungan kerja yang berkait dengan wewenang DPR sebagai pengontrol Pemerintah (Lembaga Eksekutif), sedangkan hubungan dengan masyarakat merupakan hubungan tugas dari DPR sebagai penampung aspirasi rakyat yang akan disampaikan kepada Pemerintah. Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan dua unsur tersebut merupakan pembentuk dari fungsi bangunan itu sendiri.

1.1.2 Gedung DPRD Tk II Kulon Progo

Gedung DPRD Tk II Kulon Progo terletak di jalan Perwakilan bersebelahan dengan gedung Pemerintahan. Dalam perkembangannya gedung tersebut dinilai tidak representative lagi atau tidak dapat mewakili status gedung tersebut sebagai wadah aktivitas anggota Dewan Legislatif. Daerah, ketidak sesuaian tersebut dipengaruhi oleh :

1.1.2.1 Tuntutan Masyarakat Terhadap Pelayanan Anggota Dewan

Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari pelaksanaan agenda kerja dewan legislatif mempunyai pengaruh besar dalam sitem tata pemerintahan dimana masyarakat sendiri menjadi pengontrol dari jalannya pemerintahan yang secara sistimatis diwakili oleh kewenangan anggota DPR.. Peran masyarakat yang tercermin dalam kegiatan pemerintahan merupakan wujud dari perlunya wadah yang merespon sistim tersebut, kebutuhan atas ruang yang mewadahi peran masyarakat pada pelaksanaan agenda kerja DPR haruslah menjadi

perhatian pada terciptanya suatu objek fisik pemerintahan seperti, perlunya ruang tambahan bagi wadah kegiatan persidangan yang mengikutsertakan peran langsung dari masyarakat.

1.1.2.2 Pengaruh Sistem Pemerintahan Reformasi

Pada masa pemerintahan reformasi berbagai perubahan dilakukan dari sistem, sistim sampai unsur-unsur pemerintahan, terlebih lagi setelah dikeluarkannya UU Otonomi Daerah yang memberi dampak pada setiap daerah untuk mengembangkan dan mengatur pemerintahannya sendiri. Hal ini memberi dampak akan banyaknya perubahan pada tata pemerintahan khususnya daerah yang berujung pada bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan. Aktifitas dari pelaksanaan tugas tersebut merupakan salah satu bentuk yang harus direspon oleh bangunan sebagai wadah gerak penggunaannya seperti tuntutan ruang pada bangunan gedung DPR Kulon Progo yang memerlukan objek fisik berupa ruang yang merespon pada kegiatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan, seperti ruang demonstrasi dan orasi, ruang dialog baik in door maupun out door ataupun ruang-ruang lain yang merupakan respon fisik bangunan terhadap tuntutan sistem pemerintahan tersebut.

1.1.2.3 Ketidak Sesuaian antara Kebutuhan dan Kapasitas Ruang

Perubahan pada sistim kerja di Gedung DPRD Kulon Progo merupakan fungsi yang harus direspon dengan wadah yang dapat mendukung aktifitas kegiatan di dalamnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor dimana pada bangunan gedung DPRD Kulon Progo tidak lagi sesuai dengan kebutuhan atas kegiatan dan aktifitas dewan ditinjau dari nilai kebutuhan dan kapasitas ruang. Respon pada terciptanya ruang yang sesuai dengan aktifitas kegiatan dan ruang gerak pengguna merupakan jawaban dari kebutuhan akan wadah gedung DPRD Kulon Progo yang baru seperti terbatasnya ruang pada bagian staff yang hanya dibagi dalam 3 ruang dengan luas total 50 m² untuk menampung aktifitas 40 orang, terbatasnya ruang sidang, hall, ruang fraksi, ruang pers dan sebagainya merupakan wadah fungsi yang harus dibenahi.

1.1.3 Ekspresi dan Identitas Wilayah sebagai Latar Belakang Arsitektural

Dalam merencanakan bangunan Gedung DPRD Kulon Progo diperlukan pengungkapan suatu gambaran untuk mewujudkan tampilan bangunan agar dapat dimengerti pesan-pesan dan makna yang akan diperlihatkan, gambaran tersebut hendaklah berupa cerminan dari latar belakang yang didasari pada fungsi, peran bangunan terhadap pemakai dan lingkungan. Bangunan yang diakui sebagai arsitektur yang bagus adalah bangunan yang memuat sejumlah komunikasi kedalam totalitas dan mengekspresikannya secara ringkas, tepat dan indah,¹ opini dari Frederik A Jules tersebut menegaskan bahwa perwujudan pesan dan makna dari bangunan dapat diperlihatkan dengan ekspresi.

Akan tetapi perencanaan dan perancangan suatu bangunan tidak hanya berupa pengungkapan ekspresi saja tetapi juga diperlukan suatu unsur yang dapat memberikan jati diri dan identitas terhadap bangunan agar pengungkapan ekspresi tidak merusak tatanan lingkungan sekitar seperti bentuk bangunan tanpa dasar. Eko Budiarjo berpendapat bahwa Identitas itu tidak sekedar perlu tetapi amat sangat dibutuhkan sebagai pegangan handal bagi setiap perencana bangunan,² hal itu menegaskan bahwa suatu rancangan bangunan juga harus selalu memperhatikan lingkungan sekitar termasuk bangunan, adat dan tradisi masyarakat sekitar.

1.1.3.1 Aplikasi Citra Keterbukaan dan Kewibawaan sebagai Ekspresi Bangunan

Bentuk aktifitas merupakan sesuatu yang selayaknya menjadi cerminan bagi sebuah bangunan, bentuk sangat mempengaruhi citra bangunan, karena merupakan suatu media atau alat komunikasi untuk menyampaikan arti yang dikandung atau menyampaikan pesan tertentu.³ Aktifitas kegiatan dari tugas dan wewenang DPR terhadap masyarakat dan pemerintah eksekutif menjadi sebuah dasar bentuk aplikasi dari fungsi bangunan tersebut, sehingga bentuk tersebut akan menggambarkan dan mengekspresikan identitas bangunan dari fungsinya. Tugas dan Wewenang DPR sebagai manifestasi dari aktifitas kegiatannya merupakan dasar dari

¹ Frederik A. Jules, *Dasar-Dasar Persepsi untuk Perancangan Arsitektur*, Introdution of Arsitek, 1994, hal

² Budiarjo, Eko, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hal 31

³ Y.B. Mangunwijaya, *Wastu Citra*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

ekspresi citra **Keterbukaan** dan **Kewibawaan** yang terwujud dari pengungkapan fungsi bangunan yang bersifat terbuka dan wibawa.

Keterbukaan merupakan suatu arti yang disampaikan melalui citra atau kesan terhadap bangunan dimana arti tersebut menggambarkan nilai dari tugas DPR secara sistimatis sebagai objek yang diwadahi, yaitu perumusan dari kesan menerima dan transparan kepada masyarakat. Sifat keterbukaan merupakan ekspresi watak dari tugas dewan Legislatif yang disampaikan kepada masyarakat sebagai gambaran pelaku dalam menjalankan tugasnya.

Kewibawaan adalah suatu arti kata yang identik dengan kekuasaan, kebesaran, ataupun kekuatan. Gambaran tersebut merupakan ide yang disampaikan untuk menunjukkan kekuasaan DPR terhadap pemerintah eksekutif sebagai pengawas jalannya pemerintahan yang kedudukannya diatas pemerintahan eksekutif. Citra Kewibawaan pada bangunan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pesan yang mengekspresikan kekuatan objek yang diwadahi.

Citra Keterbukaan dan Kewibawaan merupakan gambaran dari kesan yang dibentuk dengan gaya arsitektur baru yang terungkap dari penerapan fungsi terbuka dan wibawa, ekspresi tersebut merupakan nilai lebih yang dihadirkan secara umum terhadap bangunan karena masih dapat diterapkan kedalam bangunan lain pada fungsi yang sama.

1.1.3.2 Aplikasi Bangunan Tradisional sebagai Simbol Identitas dan Jati Diri Bangunan.

Bangunan Tradisional sebagai salah satu manifestasi dari sosial budaya masyarakat merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan perancangan arsitektur karena merupakan identitas atau jati diri yang melekat dan menjadi sukma arsitektur yang khas disetiap daerah, sepantasnyalah dijadikan bekal utama landasan berpijak dalam perencanaan dan perancangan arsitektur yang baru.⁴ Makna dari wawasan identitas adalah menggali keunikan, kekhasan, karakter dan potensi setempat dengan segala kearifan tradisional untuk diejawantahkan kembali dalam penampilan baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, bukan sttus quo.⁵ Oleh sebab itu bangunan DPRD Kulon Progo haruslah tetap

⁴ Budiarto, Eko, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hal 13

⁵ Ibid, hal 30

berpegang dan berdasar pada karakter bangunan tradisional setempat sebagai landasan Identitas wilayah yang mungkin dapat dijadikan nilai lebih secara khusus karena hanya dapat diterapkan pada bangunan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1951 yang berisi tentang penggabungan dua wilayah kekuasaan yaitu Kasultanan dan Paku Alaman yang menjadi satu daerah pemerintahan dalam wilayah Kulon Progo⁶. Dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo memiliki dua unsur pembentuk pemerintahan yang dalam tinjauan budayanya berasal dari satu sumber yaitu Kasultanan. Dalam pendekatan pada arsitektur tradisional kedua wilayah tersebut masuk dalam spesifikasi bangunan Jawa Wilayah Tengah yaitu meliputi daerah Karisidenan Surakarta dan sekitarnya termasuk daerah Kasultanan Yogyakarta.

1.1.4 Manifestasi Citra dan Identitas ke dalam Bangunan Gedung DPRD Kulon Progo

Kesan Keterbukaan dan Kewibawaan pada aplikasi citra gedung DPRD Kulon Progo dan Bangunan Tradisional setempat sebagai Identitas Wilayah di daerah Yogyakarta-Kulon Progo merupakan perwujudan dari perencanaan dan perancangan arsitektur pada bangunan tersebut yang mencerminkan tuntutan latar belakang dari gedung DPRD dan Wilayahnya. Pengungkapan kesan dan identitas menjadi tinjauan dari tuntutan tersebut dengan memperhatikan pada fungsi yaitu aktifitas kegiatan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan anggota DPR, pengaruh sistem pemerintahan reformasi dan kebutuhan akan ruang pada gedung yang baru serta karakter bangunan joglo sebagai perwakilan identitas wilayah.

Citra Keterbukaan dan Kewibawaan pada dasarnya berupa makna dari kesan yang tanpa ada standar atau batasan yang jelas, bangunan tradisional Kulon Progo digunakan sebagai pendekatan dari kesan terbuka dan wibawa yang akan diangkat sebagai dasar ekspresi bangunan gedung DPRD Kulon Progo dimana keterbukaan dan Kewibawaan menurut tatanan dan aturan bangunan Joglo yang diejawantahkan ke dalam bangunan Gedung DPR tersebut.

⁶ Tim, Binangun, Media Informasi dan Komunikasi Pemda Tk II Kulon Progo, 1996, hal 9

Arsitektur tradisional Jawa harus dilihat sebagai totalitas pernyataan hidup yang bertolak dari tatakrama menempatkan diri, norma dan tata nilai manusia Jawa dengan segala kondisi alam dan lingkungannya.⁷ Penggalan dan pengungkapan esensi yang menjiwai bangunan tersebut dimaksudkan agar kita tidak terperangkap pada bentuk fisik dan luarnya saja sehingga perwujudan Identitas Wilayah dan Jati Diri bangunan akan lebih bersifat luas tidak hanya simbolik saja. Beberapa esensi arsitektur Jawa yang sering digunakan adalah tata krama menempatkan diri, arsitektur sebagai proses organik, kejujuran struktur dan bahan, ruang dalam dan luar yang saling mengimbas dan sebagainya,⁸ contoh diatas merupakan esensi yang mungkin dapat diterapkan pada pengolahan citra Keterbukaan dan Kewibawaan sebagai tinjauan dari makna tersebut sebagai aplikasi bentuk bangunan Tradisional Kulon Progo.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Permasalahan Umum

Bagaimana merencanakan dan merancang bangunan yang berfungsi sebagai kantor DPRD Kulon Progo sebagai wadah yang memiliki kesan Terbuka terhadap lingkungan sekitar dan mampu memperlihatkan Kewibawaannya sebagai dewan Legislatif yang memiliki wewenang dan kekuasaan tetapi tetap menunjukkan Identitas Wilayah dengan bangunan Tradisionalnya sebagai simbol daerah.

1.2.2 Permasalahan Khusus

Bagaimana mewujudkan penampilan bangunan DPRD Kulon Progo yang mengekspresikan citra Keterbukaan dan Kewibawaan dengan kontekstual pada bangunan Tradisional yang sesuai dengan budaya daerah tersebut serta pengolahan ekspresi bangunan yang terbentuk dari fungsi dan estetika bangunan.

⁷ Budiarjo, Eko, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1987, hal 12

⁸ Ibid, hal 10

1.3 Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Mewujudkan rencana dan rancangan bangunan yang berfungsi sebagai Gedung DPRD Kulon Progo yang mengekspresikan kesan terbuka dan wibawa menurut makna ruang bangunan Tradisional setempat yang diaplikasikan pada perencanaan arsitektur baru dengan citra Keterbukaan dan Kewibawaan yang mengekspresikan fungsi dan tetap kontekstual dengan identitas wilayah setempat.

1.3.2 Sasaran

Bentuk bangunan Tradisional Kulon Progo yang dimanifestasikan dalam kesan Keterbukaan dan Kewibawaan pada perancangan arsitektur baru sebagai bentuk penampilan bangunan pada:

- a. Identifikasi karakteristik fungsi dan peran DPR
- b. Identifikasi besaran dan organisasi ruang terhadap kegiatan
- c. Identifikasi sirkulasi antar hubungan ruang
- d. Identifikasi karakter elemen yang sesuai dengan vasade dan masa bangunan
- e. Identifikasi pada kesan keterbukaan dan kewibawaan yang dibentuk
- f. Identifikasi terhadap bangunan tradisional setempat.

1.4 Batasan Dan Lingkup Pembahasan

1.4.1 Batasan

Pembahasan dibatasi pada masalah pengolahan sistem tata ruang dan penampilan bangunan yang mampu mengungkapkan ekspresi kesan secara komunikatif pada vasade dan masa bangunan terhadap citra Keterbukaan dan Kewibawaan serta paduan unsur bangunan Tradisional Kulon Progo.

1.4.2 Lingkup Pembahasan

1.4.2.1 Lingkup Non-arsitektural

Bahasan Lingkup non-arsitektural dibatasi pada :

- a. Makna Keterbukaan dan Kewibawaan pada bangunan Tradisional Kulon Progo
yaitu bagaimana penilaian makna keterbukaan dan kewibawaan menurut orang Jawa di dasarkan pada bentuk ruang dan penampilannya terhadap bangunan Tradisional Kulon Progo
- b. Tata Krama, Norma dan Adat Masyarakat Jawa
yaitu bagaimana tata karma, norma dan adat masyarakat Jawa dalam menerapkan kesan terbuka dan wibawa pada bangunan.

1.4.2.2 Lingkup Arsitektural

Pembahasan mengenai aspek-aspek pembentuk penampilan bangunan dengan kesan keterbukaan dan kewibawaan sebagai factor penentu :

- a. Pembahasan mengenai penampilan fisik bangunan dengan pendekatan pada kesan keterbukaan dan kewibawaan
yaitu bagaimana bentuk penampilan bangunan yang dapat menggambarkan kesan terbuka dan wibawa dengan perwujudan fungsi dan perpaduan elemen bangunan.
- b. Elemen-elemen penyusun dan sistem peruangan yang sesuai dengan bangunan Tradisional setempat.
yaitu bagaimana karakter bangunan Tradisional yang sesuai dengan budaya masyarakat Kulon Progo dapat disesuaikan dengan bangunan baru.

1.5 Metode Pengambilan Data

1.5.1 Tahap Pencarian Data

a. Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan dengan mencari data secara langsung melalui :

1. Pengamatan langsung pada kondisi lokasi, tapak dan lingkungan sekitar
2. Wawancara

b. Studi Literatur

1. Mempelajari pengertian dan fungsi bangunan pemerintahan gedung DPR, fasilitas yang diwadahi dan tuntutan ruang
2. Mempelajari pengertian penampilan bangunan

c. Mempelajari pemaknaan kesan dan citra pada bangunan

d. Mempelajari bangunan Tradisional Kulon Progo dan pemaknaan pada bentuk ruang dan penampilannya.

1.6 Metode Pembahasan

1.6.1 Diskriptif

Dilakukan dengan menjelaskan data dan informasi yang berkaitan dengan latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran pembahasan topik.

1.6.2 Analisis

Analisa dilakukan dengan tiga tahap yaitu :

- a. Analisa bentuk bangunan DPR, analisa lokasi, analisa kebutuhan, besaran ruang serta tuntutan ruang baru.
- b. Analisa arsitektural dalam kaitannya dengan penentuan penampilan bangunan gedung DPR dengan pendekatan pada kesan keterbukaan dan kewibawaan sebagai aplikasi dari bentuk

dan makna ruang bangunan tradisional setempat, analisa perbandingan pada bangunan yang mempunyai fungsi sejenis.

- c. Kesimpulan dari hasil analisa sebagai pendekatan konsep dalam perencanaan dan perancangan.

1.6.3 Sintesa

Rumusan sebagai tahap untuk mendapatkan konsep bangunan DPR yang meliputi aspek pembentuk penampilan bangunan dengan pendekatan pada kesan keterbukaan dan kewibawaan yang diaplikasikan terhadap bentuk bangunan Tradisional Kulon Progo.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang permasalahan, permasalahan yang diungkapkan, tujuan dan sasaran, metode pembahasan serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM DAN KHUSUS

Menelaah tinjauan pada bangunan gedung DPR dan aktivitas pengguna, bentuk bangunan tradisional setempat sebagai identitas wilayah, serta tinjauan khusus ekspresi komunikatif dalam perwujudan bangunan, studi komperasi dan analisis dalam pengolahan tata ruang dan penampilan bangunan.

BAB III ANALISA PERMASALAHAN

Mengungkapkan prinsip dasar ruang pada arsitektur dalam mempengaruhi aktifitas penggunaanya, serta pengupasan ekspresi terhadap citra yang diinginkan dalam pengolahan dan perwujudannya kedalam bentuk fisik agar visual dapat dibaca, dimengerti dan dapat diserap pesan-pesan yang disampaikan.

BAB IV PENDEKATAN DAN KONSEP DESAIN

Berisikan pendekatan pemilihan lokasi, pendekatan program ruang, pendekatan arsitektur dan pendekatan sistem bangunan. Dan membahas implementasi dari hasil analisis yang dibuat, melalui konsep dasar perencanaan dan perancangan tapak, ruang dalam dan ruang luar serta sistem bangunan.

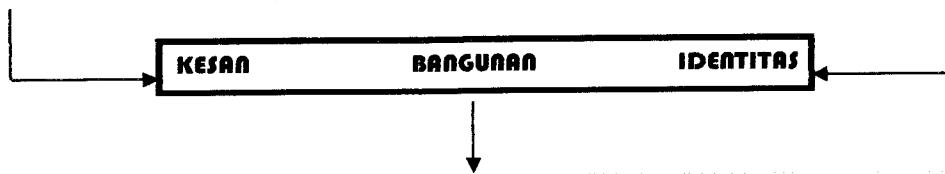
1.8 Keaslian Penulisan

1. Ery Susandah, TA/ UII/ 1994
KANTOR KABUPATEN DAERAH TK II MUSI BANYU ASIN SELAYU SUMSEL
Landasan Konseptual Perancangan
2. Samsul Má arif, TA/ UII/ 1996
KANTOR KABUPATEN DAERAH TK II TEGAL
Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan
3. Muhammad Nur Hidayat, TA/ UII/ 1996
KANTOR KABUPATEN DAERAH TK II TEMANGGUNG
Sebagai Wadah Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan
4. Joko Susanto, TA/ UII/ 2000
GEDUNG BALAI KOTA DI KOTA ADMINISTRATIF TANJUNG
Dengan Pendekatan Desain Bioklimat
5. Ressay Herpani, TA/ UII/ 2000
RELOKASI KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN DAERAH TK II SUKABUMI
Optimalisasi dan Keterpaduan Pelayanan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah

Kesimpulan :

Perbedaan pada penulisan di atas dengan penulisan yang akan dilakukan adalah pada jenis bangunan atau fungsi bangunan dan penekanan atau pokok permasalahan yaitu, pada penulisan yang diangkat adalah bangunan yang berfungsi sebagai bangunan Gedung DPR dan penekanan pada *Penerapan Citra Keterbukaan dan Kewibawaan dengan Kontekstual pada Arsitektur Bangunan Tradisional Kulon Progo*

- Tugas dan Wewenang sebagai aktifitas dewan Legislatif
- Tuntutan masyarakat thd pelayanan anggota Dewan
- Pengaruh Sistem Pemerintahan Reformasi
- Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kapasitas ruang
- Tuntutan akan perlunya Ekspresi dalam Bangunan
- Tuntutan Identitas dan Jati Diri pada Bangunan



- ▶ Perlunya citra bgn sbg wadah yg berkesan
Terbuka dan Wibawa
- ▶ Perlunya Arsitektur yang Kontektual dengan bangunan tradisional setempat

Penerapan permasalahan umum dim
Penampilan Bangunan

- ▶ Tinjauan pada bangunan DPR
- ▶ Aktifitas kegiatan anggota DPR
- ▶ Data Studi Survei
- ▶ Data Teoritikal yg berkaitan dgn tata ruang dan penampilan bangunan

- ▶ Studi Literatur ttg kesan dan citra
- ▶ Tinjauan peruangan Bangunan Tradisional
- ▶ Tinjauan pada Makna bangunan Tradisional

- ▶ Analisa bentuk bangunan DPRD, Analisa ruang, Analisa Kebutuhan dan Besaran Ruang, Analisa tuntutan ruang baru
- ▶ Analisa arsitektural, pada penampilan bangunan dengan pendekatan pada fungsi dan makna bangunan tradisional

Hasil dari analisa yang menjadi pedoman bagi pendekatan **KONSEP DASAR**

Pengolahan Tata Ruang dan Penampilan Bangunan melalui Ekspresi Kesan dgn aplikasi Pada ruang serta fungsi ruang Bangunan Tradisional setempat

Diagram Pola Pikir

BAB II

TINJAUAN GEDUNG DPR KULON PROGO DAN TINJAUAN TEORITIS CITRA BANGUNAN

2.1 Tinjauan Studi Bangunan Gedung DPR

2.1.1 Gedung DPRD sebagai Wadah Aktifitas Kegiatan DPR

2.1.1.1 Pengertian DPRD

Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan dibantu Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah.⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat(1) Undang-undang No.5 Tahun 1974, yang bertugas bersama Bupati Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintahan Daerah.¹⁰ Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPRD sebagai pemegang kekuasaan Legislatif, dibentuk oleh staf administrasi serta Dinas-dinas Daerah yang bersama-sama menjalankan fungsi pemerintah daerah antara lain :¹¹

1. Fungsi Keamanan dan Ketertiban,
2. Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan,
3. Fungsi Administrasi

2.1.1.2 Tugas dan Wewenang DPR

Tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah Daerah sebagai dasar dari pelaksanaan fungsi DPR menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1974 yang antara lain :

⁹ Pasal 5 UU RI No. 5 Tahun 1974

¹⁰ Ibid

¹¹ Penjelasan UU RI No. 5 Tahun 1974

1. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah
2. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan Daerah.
3. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang wewenang pelaksanaanya ditugaskan kepada Kepala Daerah.
4. Menjalin pelaksanaan kerjasama dengan Bupati Kepala Daerah.

Wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Kedua Tahun 2000 pasal 20A ayat 1 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi Legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.¹² Dan Penjelasan Pasal 23 bahwa Dewan memiliki hak *Begrooting* yang mempunyai wewenang mengontrol pemerintah, dalam hal ini Dewan menetapkan pendapatan dan belanja sehingga kedudukannya lebih kuat dari pada pemerintah.¹³

Hubungan kerja antara tiga faktor yaitu DPRD dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan faktor penentu letak bangunan dimana fungsi bangunan harus dapat merespon hubungan yang baik antara dua instansi pemerintah dan masyarakat dalam kaitan wewenang DPRD sebagai pengontrol jalannya pemerintahan daerah dan tugas DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat yang disesuaikan dengan meletakkan ruang fungsi pengguna sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD yaitu meletakkan ruang publik dan semi publik di area yang paling dekat dengan pencapaian bangunan sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih dapat dioptimalkan dan perletakan ruang prifat yang dapat mendukung aktifitas kerja serta ruang servis yang dapat melingkupi ruang-ruang lainnya sebagai fungsi pendukung dan pelayanan.

2.1.1.3 Kegiatan Pada Gedung DPRD

Kegiatan yang diwadahi dalam bangunan Gedung DPRD Kulon Progo meliputi beberapa kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat publik, semi publik, privat dan kegiatan servis yang dikelompokkan dalam dua badan tugas antara lain :

¹² Tim, *Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Kedua 2000*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal 19

¹³ Ibid, hal 41

1. Kegiatan yang bersifat Publik (Umum)

Kegiatan utama anggota DPRD meliputi kegiatan yang bersifat publik atau kegiatan umum yang berhubungan dengan unsur masyarakat, pemerintah atau badan lain seperti:

a. Pelayanan pada kegiatan demonstrasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan kerja yang sifatnya berkala dengan jenjang waktu tertentu atau tidak pasti, dalam hal ini pelaku utama dari unsur masyarakat yang di layani oleh anggota Dewan Legislatif yang merupakan kegiatan penyampaian pendapat atau protes yang disampaikan oleh kelompok tertentu dari masyarakat.

Karakter dari kegiatan ini bersifat publik/ umum sehingga dalam perancangan ruang kerja hendaklah mempertimbangkan kualitas dan kuantitas ruang sebagai wadah aktifitas berupa *Hall dan ruang penyampaian pendapat*, dengan pencapaian yang mudah dan jelas.

b. Sidang Paripurna

Kegiatan ini merupakan aktifitas yang sifatnya rutin- tidak rutin, yaitu kegiatannya tidak memiliki ketepatan waktu/ jadwal yang jelas yang dinamakan sidang paripurna dan sidang tidak tetap yang disebut sidang khusus dewan. Kegiatan persidangan dilakukan di *Ruang Sidang Paripurna* dengan kegiatan antara lain :

- Sidang Umum Paripurna,

Adalah sidang dewan legislative yang diadakan dalam pembentukan RAPBD dan penetapan APBD, penetapan Peraturan Daerah (Perda), pertanggung jawaban Bupati, sidang pengajuan proyek Pemerintah Daerah dan sebagainya.

- Sidang Khusus Paripurna

Sidang yang diadakan dalam memecahkan masalah khusus daerah dari masyarakat sampai pemerintah seperti sidang tanggapan dari pengajuan pendapat/ orasi oleh masyarakat melalui demonstrasi atau oleh kelompok masyarakat melalui penyampaian pendapat.

c. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung adalah aktifitas yang dilakukan pada saat proses persidangan diadakan meliputi persiapan persidangan sampai akhir/ penutup persidangan. Dalam kegiatan ini memiliki aktifitas yang kompleks dari pelaku (masyarakat, pemerintah eksekutif, anggota dewan maupun pers) dengan kebutuhan ruang antar lain :

- Parkir
- Lobby dan ruang informasi

2. Kegiatan yang bersifat semi publik

a. Kunjungan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang aktifitasnya berada diluar Gedung DPRD, hanya saja dalam pelaksanaannya membutuhkan sarana antara lain ***Ruang Transit dan Garasi (ruang kendaraan)*** sebagai wadah prasarana penunjang.

b. Kegiatan Sidang

Kegiatan ini merupakan kegiatan intern yang umum dan dapat dihadiri oleh unsur pers, yang antara lain berupa :

- Sidang Komisi
- Sidang Fraksi
- Sidang Risalah

c. Wawancara

Yaitu kegiatan wawancara yang dilakukan unsur masyarakat tertentu ataupun pihak pers. Kegiatan ini bersifat semi publik sehingga membutuhkan karakter ruang yang khusus seperti *Ruang Pers dan Ruang Tamu*.

3. Kegiatan yang bersifat Prifat

Yaitu kegiatan yang meliputi aktifitas rutin kerja bagian sekretariat Gedung DPRD dan anggota DPRD sendiri yang pada pelaksanaannya dibagi dalam jabatan-jabatan tugas dengan kebutuhan ruang yang disesuaikan menurut jabatan tersebut antara lain :

- a. Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua Dewan
- c. Anggota Dewan

Yaitu keseluruhan dari elemen fraksi-fraksi dalam DPRD yang dibagi dalam tugas-tugas :

- Anggota Komisi
- Anggota Fraksi

4. Kegiatan yang bersifat servis

Adalah kegiatan pelayanan dari kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dilakukan secara pribadi/ privasi tinggi atau dibantu oleh petugas, kegiatan ini membutuhkan ruang-ruang seperti :

- a. Lavatori/ KM/WC
- b. Mushola
- c. Lapangan Olah Raga
- d. Perpustakaan
- e. Kafetaria

2.1.2 Kebutuhan Ruang pada Gedung DPRD

Pada Prinsipnya pemenuhan ruang diharapkan dapat menciptakan ruang-ruang yang dapat mendukung aktifitas pengguna baik itu dari segi kualitatif maupun kuantitatif yang dapat mewadahi manusia dan prasarana kerja seperti peralatan meliputi ruang gerak pengguna.

➤ Studi Ruang Gedung DPRD

Tabel 2.1 Studi Banding Ruang-Ruang Gedung DPRD

	DPRD Sleman	DPRD Bantul	DPRD DIY
Anggota DPRD			
R. Sidang Paripurna (Pb)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
R. Sidang Komisi (SP)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
R. Sidang Fraksi (SP)	-	1 Ruang	1 Ruang
R. Ketua (Pv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
R. Wakil Ketua (Pv)	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang
R. Komisi (Pv)	5 Ruang	5 Ruang	5 Ruang
R. Fraksi (Pv)	7 Ruang	6 Ruang	7 Ruang
R. Tamu/ Pers (SP)	2 Ruang	2 Ruang	4 Ruang
R. Transit (SP)	1 Ruang	-	2 Ruang
Lavatori (Sv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
Sekretariat DPRD			
R. Sekretariat (Pv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
R. Rapat Risalah (SP)	-	1 Ruang	1 Ruang
R. Risalah (Pv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
R. Ka.Bag (Pv)	3 Ruang	4 Ruang	7 Ruang
R. Staff/ Karyawan (Pv)	4 Ruang	5 Ruang	9 Ruang
R. Perpustakaan (Sv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
Lavatori (Sv)	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang
Garasi (SP)	2 Ruang	1 Ruang	2 Ruang

Dari data ruang-ruang di gedung DPRD DIY, Sleman, Bantul kelompok peruangan di bagi dalam 2 kelompok Tugas yaitu kelompok *Ruang Anggota DPRD* dan kelompok *Ruang Sekretariat DPRD* yang terdiri dari pengelompokan jenis pengguna ruang yaitu ruang publik, semi public, privat dan servis.

➤ **Kelompok dan Susunan ruang Gedung DPR**

Kebutuhan ruang kantor dapat dihitung dengan menggunakan cara , yakni ruang gerak perorangan x jumlah orang ditambah ruang tambahan untuk sarana penunjang ditambah kebutuhan sirkulasi 15%-20%¹⁴

Tabel 2.2 Kelompok Jenis dan Ruang Gedung DPRD

<i>Jenis Pengguna</i>	<i>Anggota DPRD</i>	<i>Jml</i>	<i>Sl/m²</i>	<i>Sekretariat DPRD</i>	<i>Jml</i>	<i>Sl/m²</i>
Publik	R. Sidang Paripurna	1	1,25	Parkir	1	Mbl 12
	Hall	1	1,5	Taman	1	-
	Parkir	2	12			
	Taman	1	-			
Semi Publik	R. Sidang Komisi	1	3	R. Rapat Risalah	1	3
	R. Sidang Fraksi	1	3	R. Tamu	2	2,5
	R. Tamu	2	2,50	Garasi	1	12
	R. Pers	3	2,5			
	R. Transit	1	3			
Privat	R. Ketua	1	30	R. Sekretaris	1	25
	R. Wakil Ketua	3	20	R. Kepala Bagian	6	15
	R. Komisi	5	8	R. Staff	6	6
	R. Fraksi	7	8	R. Karyawan	3	6
Servis				R. Risalah	1	8
	Lavatori	5	3	Lavatori	4	3
	Muhola	1	0,65	Mushola	1	0,65

¹⁴ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 11

	Perpustakaan	1	0,8
--	--------------	---	-----

*) SI/m^2 (standart luas ruang perorang plus perabot dan sirkulasi untuk perkantoran)¹⁵

Dalam perancangan Gedung DPRD Kulon Progo ruang-ruang yang ada disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi yang ada dengan standar luas ruang sesuai dengan aturan yang ada.

2.2 Tinjauan Gedung DPRD Kulon Progo

2.2.1 Struktur dan Unsur Pelaku Dalam Gedung DPRD Kulon Progo

Dalam Struktur Organisasi Pelaku di Gedung DPRD Kulon Progo dibagi atas kerangka kerja yang terdiri dari :

A. Struktur Keanggotaan DPRD Kulon Progo

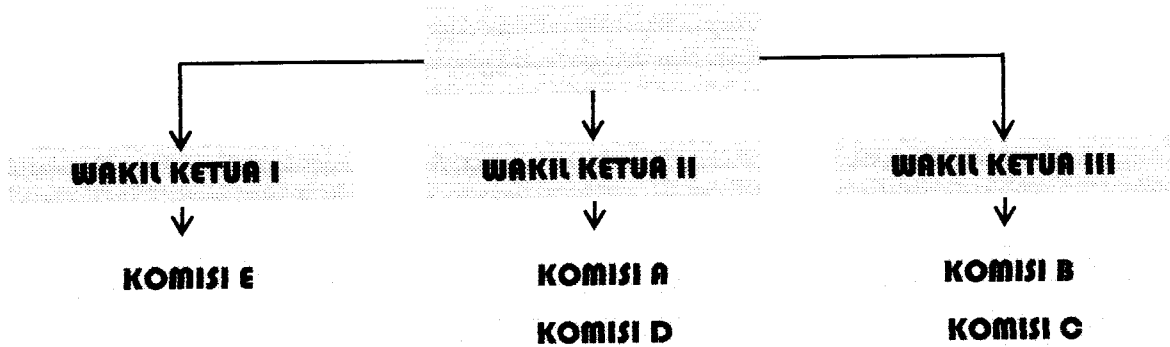
Unsur pelaku dalam keanggotaan DPRD Kulon Progo terdiri dari anggota fraksi ABRI, fraksi Karya Pembangunan (Golkar), fraksi Persatuan Pembangunan (PPP), fraksi PDI Perjuangan, fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), dan fraksi Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh 40 anggota Legislatif dan dibagi atas 5 bidang kerja Komisi yang dibawah oleh Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, dan sisanya sebagai anggota dengan bidang tugas sebagai berikut ¹⁶:

1. Komisi A membawahi bidang Pemerintahan (7 anggota)
2. Komisi B membawahi bidang Perekonomian (7 anggota)
3. Komisi C membawahi bidang Keuangan (8 anggota)
4. Komisi D membawahi bidang Pembangunan (7 anggota)
5. Komisi E membawahi bidang Kesejahteraan Rakyat (7 anggota)

Adapun dalam kepengurusannya dipimpin oleh satu ketua DPRD dengan tiga wakil ketua yang berfungsi sebagai koordinator Komisi.

¹⁵ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997

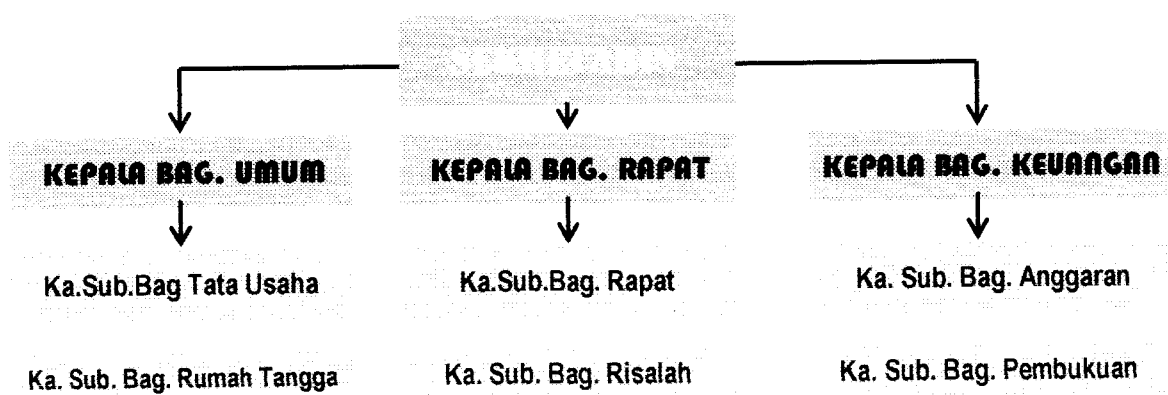
¹⁶ Tim, *Bagan Struktur Keanggotaan DPRD Tk II Kulon Progo*, DPRD Kulon Progo



Gbr. 2.1 Struktur Organisasi DPRD Kulon Progo

B. Struktur Sekretariat DPRD Kulon Progo

Sekretariat DPRD Kulon Progo adalah unsur pelaku sebagai pengelola kegiatan anggota Legislatif yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan harian di Gedung DPRD Kulon Progo. Kedudukan sekretariat DPRD ada dibawah pengelolaan Pemerintahan Eksekutif dengan struktur pembagian tugas sebagai berikut :



Gbr. 2.2 Struktur Sekretariat DPRD Kulon Progo

Keterangan jabatan dalam pembagian tugas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Struktur Staff dan Karyawan Sekretariat DPRD KP

Urusan Surat Masuk	Tunis Komisi (5 Staff)	Pemegang Kas
Urusan Surat Keluar	Urusan Administrasi	Pembantu Pemegang Kas
Urusan Perpust dan Dok.		
Urusan Kepegawaian	Bendaharawan Gaji	Urusan Kendaraan
Penerima Tamu, Surat Masuk	Pembuat Daftar Gaji	Urusan Kebersihan Kantor
Penjaga Telepon, Ajudan Ketua		Urusan Ketertiban
Penjaga Sound Sistem	Notulis (2 Staff)	Pengemudi (4 karyawan)
Pengantar Surat		

2.3 Tinjauan Ekspresi Bangunan

2.3.1 Aspek Guna dan Citra

Guna merupakan fungsi dimana ruang-ruang menyesuaikan dengan kegunaan dan fungsi dari aktifitas yang diwadahi yang menjadi pembentuk citra atau kesan bangunan, dan sebaliknya citra sebagai ekspresi kesan bangunan dari kegiatan yang diwadahi merupakan perwujudan dari fungsi bangunan itu sendiri. Sehingga citra yang terbentuk bukan hanya berupa ekspresi atau simbol saja tetapi merupakan kesan yang timbul karena pengaruh penerapan ruang dan bangunan atas fungsi.

2.3.2 Ekspresi Citra Keterbukaan dan Kewibawaan

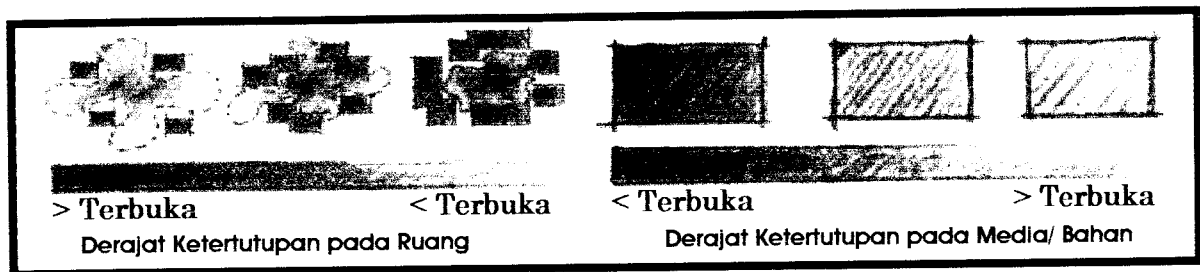
Dalam merencanakan suatu bangunan diperlukan pengungkapan suatu ekspresi untuk mewujudkan penampilan bangunan agar dapat dimengerti pesan-pesan dan makna yang akan diperlihatkan, ekspresi sendiri dalam arsitektur seperti bahasa yang identik dengan komunikasi.¹⁷ Pengungkapan ekspresi pada sebuah bangunan merupakan suatu bahasa arsitektural yaitu komunikasi secara tidak langsung yang diungkapkan oleh

¹⁷ Frederick A. Jules, *Dasar-Dasar Persepsi untuk Perancangan Arsitektur*, Introdution of Arsitek, 1994, hal 323

bangunan kepada penggunanya.¹⁸ oleh sebab itu dalam merencanakan Gedung DPRD Kulon Progo perlu adanya kesan dan citra yang mengkomunikasikan visual bangunan sebagai wadah yang merespon pemakainya dalam kesan wibawa dan terbuka serta kontekstual pada arsitektur daerah yang terbentuk melalui fungsi tata ruangnya.

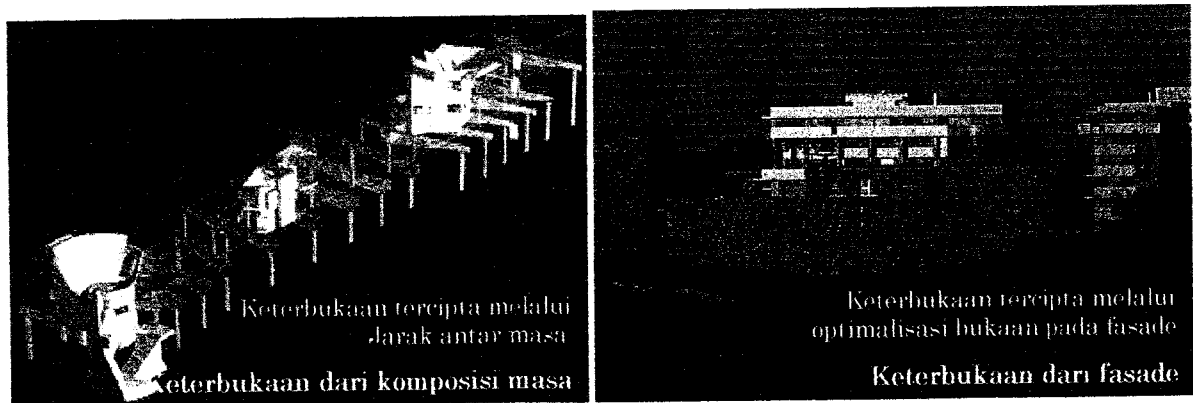
2.3.2.1 Kesan Keterbukaan

Kata Keterbukaan merupakan kata sifat dari kosakata terbuka, makna terbuka sendiri identik dengan sesuatu yang bebas tanpa penutup atau penghalang,



Gbr. 2.3 Hirarki Derajat Keterbukaan

Dalam pengertian arsitektur “*terbuka*” dapat diukur dengan derajat keterbukaan secara *hirarki* pada media atau masa pembentuk dan komposisi ruang untuk menimbulkan perasaan tertentu pada pemakai¹⁹. Pada media/ bahan, diukur melalui kepadatan unsur pembentuknya dimana unsur-unsur yang semakin rapat menghasilkan media yang semakin tertutup. Sedangkan dalam *komposisi* pada ruang, ketertutupan dipengaruhi oleh sudut pembentuk dimana sudut yang tertutup akan menghasilkan ruang yang semakin tertutup.



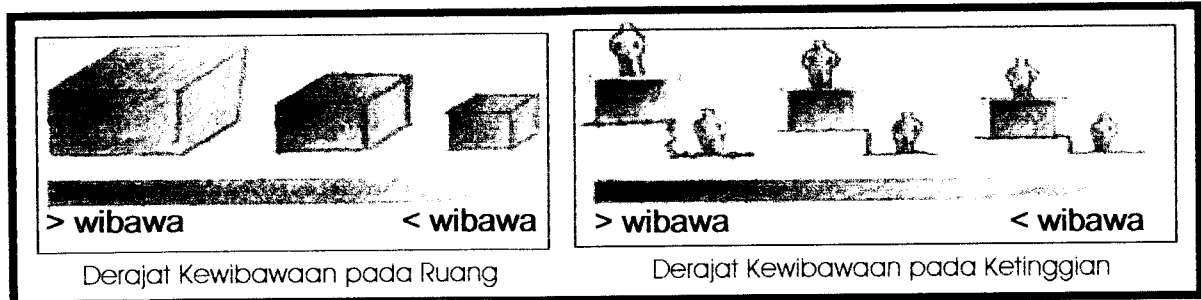
Gbr. 2.4 Contoh Bangunan yang Berkesan Terbuka

¹⁸ Wiryono. Ir, Diktat Teori Arsitektur, Universitas Islam Indonesia. 1996

¹⁹ Fajriyanto. Ir, MTP, Diktat Perencanaan Tapak II, Universitas Islam Indonesia, 1995

2.3.2.2 Kesan Kewibawaan

Kata Kewibawaan merupakan kata sifat dari kata wibawa, kewibawaan sendiri identik dengan sesuatu yang kuat yang memiliki kekuasaan ataupun pengaruh.



Gbr. 2.5 Skala pada Derajat Kewibawaan

Dalam arsitektur "*Kewibawaan*" dapat diperlihatkan melalui derajat dimensi ruang dan perletakan. Pada derajat ruang, *skala* yang memiliki tinggi dan lebar lebih besar akan memiliki nilai yang cenderung berwibawa, sedangkan pada *hirarki* derajat perletakan, sesuatu yang memiliki letak lebih tinggi akan memiliki nilai yang cenderung berwibawa. Selain itu kewibawaan dapat ditunjukkan melalui rangka yang rigid, kokoh dan kuat serta ornamen bangunan yang rumit dan indah yang melambangkan kekuatan dan penekanan keindahan pada sesuatu yang ditinggikan atau diwibawakan.



Gbr. 2.6 Contoh Bangunan yang Berkesan Wibawa

Kedua kosakata diatas merupakan suatu arti yang abstrak karena berupa kata sifat yang menjelaskan karakter benda, dalam arti bahasa makna tersebut masih mungkin untuk didefinisikan melalui sinonim ataupun pendekatan makna, akan tetapi untuk diterapkan

kedalam bentuk arsitektural bangunan kesan tersebut harus memiliki kriteria yang mempunyai batasan arti. Oleh sebab itu dalam memberikan batasan arti diperlukan standar pendekatan dari suatu benda yang memiliki persamaan makna atau maksud. Sebagai perwujudannya dilakukan dengan menuangkan ekspresi yang dipadu dengan kesan atau imej objek yang diwadahi seperti citra Keterbukaan dan Kewibawaan yang menggambarkan aplikasi dari tugas dan wewenang DPR, yang pada penerapannya dilakukan dengan pendekatan pada bangunan tradisional Kulon Progo.

Adapun faktor penentu Kewibawaan dan Keterbukaan ditentukan oleh :

1. Komposisi

2. Hirarki

3. Skala

Yaitu bagaimana kesan kewibawaan dan keterbukaan tercipta melalui komposisi, hirarki, dan skala yang disesuaikan dengan unsur-unsur masa, ruang, bentuk bangunan atau fasade serta sirkulasi yang disesuaikan dengan keterkaitan antara keduanya. Hasil kesesuaian diatas dijadikan pedoman dalam menganalisa unsur-unsur yang mempengaruhi kesan terbuka dan wibawa yang dapat diterapkan dalam perancangan bangunan Gedung DPRD Kulon Progo.

2.3.3 Penampilan pada Gedung DPRD

Citra atau Kesan dapat terbaca dari ekspresi penampilan bangunan sehingga tinjauan pada aspek-aspek penampilan bangunan haruslah menjadi faktor penting dalam perencanaan dan perancangan arsitektur, adapun unsur yang membentuk penampilan bangunan antara lain :

1. Bentuk

Bentuk terkait dengan masa, dan bentuk-bentuk dasar. Organisasi bentuk keseluruhan akan lebih mengekspresikan isinya, sehingga komunikasi dari sang arsitek terhadap

perasaan dari bentuk bangunan akan semakin tegas dan jelas.²⁰ Setiap bentuk mempunyai karakter yang berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap persepsi yang ditimbulkan. Fungsi yang diekspresikan dengan jelas akan menimbulkan karakter, sedangkan lekukan vertikal dan horizontal menimbulkan kesan perspektif.²¹

2.Fasade

Fasade merupakan wujud atau rupa bangunan sebagai unsur pembentuk citra bangunan. Menurut Ishar HK yang termasuk dalam fasade adalah²² :

- a. **Karakter**, jika semua bangunan dibuat dengan ukuran dan menurut fungsinya, maka dengan sendirinya terjadi suatu pengelompokan bentuk dan ukuran menurut jenisnya. Masing-masing mempunyai suatu ciri atau karakter tersendiri, misalnya karena ukuran jendela, tinggi plafond an sebagainya
- b. **Gaya**, dalam arsitektur gaya berarti suatu cara membangun atau merancang secara berbeda dengan yang lain atau bisa juga sesuai dengan bangunan yang ada dilingkungannya. Gaya dapat terjadi karena mengikuti sejarah suatu jaman atau kebudayaan, pemakaian bahan, iklim, detail, dan pribadi arsitek
- c. **Warna**, peranan warna dalam arsitektur dipakai untuk memperkuat bentuk. Warna memberikan ekspresi kepada pikiran atau jiwa manusia yang melihatnya, oleh sebab itu warna sedikit banyak menentukan karakter.

3.Material

Pemilihan dan pengolahan bahan akan mempengaruhi kesan pandangan antara ekspresi bahan dan pengamatanya. Karakter dan kesan dari bahan bangunan dapat berbeda, tergantung dari cara pengolahan bahan hingga dapat digunakan. Kesan material yang didapat adalah kesan keseluruhan yang merupakan perpaduan bahan atau kesan material yang paling menonjol.

²⁰ Antoniades, Anthony C. *Persepsi in Architecture*, Van Raynold, London, 1992

²¹ Ishar, HK, *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, Gramedia, Jakarta, 1992

²² Ibid

4. Struktur

Struktur memegang peranan yang penting dalam memberikan kesan pada bangunan. Hal ini berkaitan dengan pemilihan bahan yang digunakan, karena sifat bahan berkaitan dengan sistem strukturnya. Misalnya beton baik dalam menahan gaya tekan, sedangkan baja baik untuk menahan gaya tarik. Seiring kemajuan teknologi, sistem struktur pun sudah jauh berkembang, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memilih struktur dan bahan yang sesuai dengan fungsi yang dikehendaki dan menghasilkan kesan yang diinginkan.²³

5. Visual Bangunan

Penentuan aspek visual erat kaitannya dengan elemen-elemen dan prinsip-prinsip penyusunan tata ruang, yaitu :

- a. Proporsis
- b. Komposisi, susunan atau aturan antar komponen ruang
- c. Keseimbangan
- d. Irama, keteraturan dengan irama menunjukkan dinamis
- e. Keselarasan, diungkapkan dengan bentuk, warna dan tekstur
- f. Kontras ditunjukkan dengan bentuk, garis, warna, tekstur, vertikal, dan horizontal.

6. Warna dan Tekstur

Warna dapat dikatakan merupakan kualitas dari cahaya yang dipantulkan dari suatu permukaan atau dari sumber cahaya. Persepsi cahaya bervariasi tergantung pada kondisi-kondisi yang berpengaruh, yaitu²⁴ :

- a. Tipe penerangan, penerangan alami atau buatan
- b. Jenis, pola dan tekstur permukaan
- c. Perhubungan warna dari figure dan latar belakang dalam situasi tertentu.

²³ Suwondo B Sutedjo, *Presepsi Bentuk dan Konsep Arsitektur*, P: 58, Djambatan, Jakarta, 1986

²⁴ Isaac ARG, *Pendekatan kepada Perancangan Arsitektur*, P: 45, Intermatra, Bandung, 1986

Unsur-unsur penampilan bangunan di atas merupakan faktor yang menjadi pembentuk ekspresi bangunan yang selanjutnya disesuaikan dengan nilai-nilai dari makna keterbukaan dan kewibawaan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan unsur penampilan yang dapat menerima nilai-nilai terbuka dan wibawa dengan faktor-faktor dasar perancangan bangunan.

2.4 Tinjauan Arsitektur Tradisional Kulon Progo

2.4.1 Joglo sebagai Identitas Bangunan Tradisional Kulon Progo

Arsitektur tradisional Jawa merupakan bentuk bangunan tradisional yang banyak digunakan dan menjadi pakem masyarakat Jawa sebagai identitas wilayah, khususnya wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Menyinggung tentang bentuk bangunan tradisional Jawa sendiri ada tiga pengelompokan wilayah spesifik di Jawa Tengah diantaranya²⁵ :

- Wilayah pantai utara : meliputi daerah Demak, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dengan keunikan atap Bencu, Bekuk-lulang dan Kosolnya
- Wilayah Selatan : meliputi daerah eks Karisidenan Kedu dan Banyumas, dengan kekhasan Srotongan, Trojagan dan Tikelannya
- Wilayah Tengah : meliputi daerah eks Karisidenan Surakarta dan sekitarnya termasuk Jogjakarta dengan kekhasan pada atap joglo.

Melihat klasifikasi wilayah pada bentuk bangunan Tradisional Jawa diatas, bentuk Joglo merupakan bangunan yang sesuai untuk diterapkan pada Gedung DPRD Kulon Progo karena sesuai dengan daerah pengelompokan.

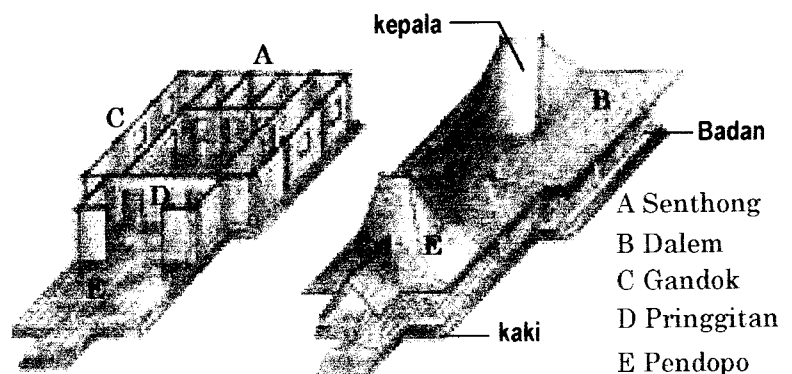
Adapun pendekatan Joglo sebagai *Identitas wilayah* dapat diterapkan melalui transformasi bentuk dengan metode *simbolisasi, metafora, analogi* serta *preseden* dengan penyesuaian metode yang dapat mendukung terciptanya citra dan kesan pada visual bangunan dengan arsitektur baru yang tetap kontekstual pada arsitektur tradisional. Pada

²⁵ Atmadi, Purnomo, Prof. Dr. Ir, *Apa yang Terjadi Pada Arsitektur Jawa*, Lembaga Javanologi, 1984

penerapannya kontekstual bangunan tradisional dilakukan dengan transformasi yang menggunakan metode simbolisasi yaitu, mensimbolkan salah satu ciri utama bangunan tradisional Joglo dengan pendekatan preseden atau persamaan bentuk bangunan dengan bangunan lain yang dapat dilakukan dengan persamaan bentuk/ raut, warna, ukuran, lokasi/kedekatan atau arah²⁶, serta metode analogi yaitu penerapan bentuk yang menyerupai raut dari yang lainnya dengan perbedaan pada bentuk bahasa, ukuran, lokasi atau peningkatan tak teratur dari perubahan yang dapat mendekati keserupaan.²⁷ yang diterapkan dengan mentransformasikan makna ruang bangunan Joglo ke dalam bangunan Gedung DPRD Kulon Progo dengan penerapan pada persamaan fungsi secara umum, missal ruang pendopo sebagai wadah aktifitas pertemuan yang bersifat publik diaplikasikan dalam ruang-ruang publik, atau ruang lain yang memiliki fungsi sama untuk diterapkan pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo.

2.4.2 Fungsi, Karakter dan Makna Ruang pada Bangunan Joglo

Arsitektur Jawa mirip dengan jasad hidup yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan hidup penghuninya.²⁸ sehingga ruang-ruang pada bangunan Joglo antara satu bangunan dengan bangunan lainnya banyak perbedaannya, hal ini tergantung dari kebutuhan ruang yang selalu berubah (berkembang-menyusut). Akan tetapi bangunan Joglo memiliki pakem dasar dalam pembentukan ruang, susunan dasar ruangan pada bangunan Joglo biasanya dibagi atas tiga



Gbr 2.7 Denah dan Ruang Joglo

²⁶ Isaac-ARG, *Pendekatan kepada Perancangan Arsitektur*. Intermatra, Bandung, 1986, hal 42

²⁷ Roger H. Clark- Michael Pause, *Preseden dalam Arsitektur*, Intermatra, Bandung, 1986, hal 156

²⁸ Budiarto, Eko, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hal 15

bagian yaitu ruang *pendopo*, *pringgitan*, *dalem* serta proses organik bangunan Joglo sebagai pengejawantahan tubuh yang terdiri dari *kepala*, *badan* dan *kaki*.

1. Pendopo

Fungsi ruang pendapa adalah sebagai tempat pertemuan yang bersifat umum (contoh: tempat genduri, tempat pertemuan warga secara ritual, social, serta tempat bermain)²⁹

Karakter ruang dari pendopo berbentuk bujur sangkar dengan disangga oleh empat tiang yang disebut saka guru dan tanpa ditutup oleh dinding dengan penampilan terbuka yang dihiasi dengan ornamen.

Makna dari ruang tersebut memberikan kesan sebagai tempat yang terbuka bagi umum/ individu lain (publik) dan bentuk penghormatan/ memuliakan orang lain yang dianalogikan pada ruang publik seperti ruang Hall dan ruang Sidang Paripurna melalui pemaknaan fungsi kegunaan sebagai ruang resmi sekaligus ruang umum bagi masyarakat.

2. Pringgitan

Fungsi ruang pringgitan adalah sebagai tempat pertemuan secara khusus atau tempat untuk mengadakan tontonan wayang.³⁰

Karakter ruang pringgitan terbentuk dari dinding-dinding pembatas dengan dinding tengah bagian depan terbuka.

Makna ruang tersebut memberi kesan bahwa wadah tersebut merupakan daerah yang bersifat khusus (semi publik) tetapi tidak tertutup bagi orang lain yang dianalogikan pada ruang penyampaian pendapat dan ruang-ruang sidang yang bersifat semi publik dengan pemaknaan fungsi ruang pertemuan yang bersifat khusus.

3. Dalem/ Omah Njero

Fungsi dalem adalah sebagai ruang keluarga (prifat) yang terdiri dari senthong kiwo, senthong tengah (patehan) dan senthong tengen.³¹

²⁹ R Ismunandar K, *Joglo Arsitektur Rumah Tradisional Jawa*, Dahara Prize, Semarang, 1990, hal 93

³⁰ Ibid, hal 93

³¹ Ibid, hal 93

Karakter dalam terbentuk sebagai wadah yang tertutup bagi orang lain/ individu lain dengan empat dinding penutup, ruang dalam terdiri dari tiga bagian yaitu *senhong kiwo*, *tengah* dan *tengen*.

Makna ruang dalam memberi kesan pada sebuah wadah khusus yang harus dihormati dengan tidak menyentuh atau memasuki daerah tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang memberikan pandangan bahwa pemilik memiliki sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak boleh diusik atau diganggu orang lain dianalogikan pada ruang kerja sebagai area pribadi.

a. Senthong Kiwo-Tengen

Fungsi *senhong kiwo* dan *tengen* merupakan ruang untuk kepala keluarga dan istrinya, *senhong* yang ada disebelah barat digunakan sebagai ruang tidur suami istri dan pada saat istri melahirkan anak menempati *senhong* sebelah timur sejak bersalin sampai proses menyusui.³²

Karakter ruang ini berada di dalam dalam dengan posisi mengapit *senhong tengah*, ruang ini bersifat sangat pribadi dan tertutup dan kadang fungsi jendela hanya sekedar sebagai simbolik saja karena tidak berhubungan dengan halaman/ luar rumah.

Makna *senhong* yang berada disebelah timur-barat menggambarkan urutan kehidupan manusia dari muda sampai tua yang ditempati berdasar tingkatan usia, hal ini dianalogikan pada ruang anggota DPRD dan ruang Sekretariat dengan tingkat hirarki pada keutamaan jabatan dan kedudukan.

b. Senthong Tengah

Fungsi *senhong tengah* sebagai tempat meditasi atau pertapan dan digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga/ pusaka.³³

Karakter *senhong Tengah* sangat tertutup untuk orang lain, bahkan terkadang wanita/ istri tidak boleh memasuki ruang ini karena sebagai tempat yang dikeramatkan untuk bertapa dan menyimpan pusaka.

³² Reviyanto Budi Santosa, *Omah Membaca Makna Rumah Jawa*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 2000, hal 59

³³ Ibid, hal 60

Makna dari ruang ini adalah suatu tempat yang dijunjung tinggi keberadaannya sebagai tempat mulia yang berada ditengah bangunan dianalogikan pada ruang Sidang Risalah sebagai tempat sidang keputusan dari hasil sidang-sidang lainnya.

Selain makna peruangan, ada makna lain yang harus diperhatikan yaitu bentuk bangunan Joglo yang *simetris* sebagai perlambang keseimbangan hidup, *pencapaian* ke dalam pomahan yang diterapkan secara jujur yaitu langsung dan terarah pada bangunan, serta keterbukaan dan rasa kekeluargaan yang tinggi terwujud dalam *membatasi pomahan* dengan elemen alam atau pohon seperti tirsan dan pemaknaan *proses organik* bangunan yang terdiri dari kepala-atap, badan-bangunan atau masa, dan kaki-lantai.

Dalam perancangan Gedung DPRD Kulon Progo tiga ruang dasar dalam membentuk bangunan Joglo diatas ditransformasikan melalui analogi pada ruang-ruang dengan fungsi yang sama.

- a. Pendopo yang bersifat publik ditransformasikan pada ruang yang bersifat publik pula seperti ruang sidang Paripurna, Hall dan sebagainya,
- b. Pringgitan yang bersifat semi publik ditransformasikan pada ruang sidang komisi, fraksi, ruang tamu,pers dan ruang lainnya yang mempunyai sifat semi publik,
- c. Dalem yang terdiri dari gandok (sebagai ruang umum bagi keluarga) ditransformasikan pada ruang staff dan ruang anggota DPR, Senthong Kiwo/ Tengen ditransformasikan pada ruang pimpinan DPRD dan ruang Sekretaris, ruang senthong Tengah ditransformasikan pada ruang sidang Risalah.

2.5 Tinjauan Perancangan Gedung DPRD

2.5.1 Prinsip Dasar Perancangan Gedung DPRD

2.5.1.1 Sirkulasi Pada Gedung DPRD

Sirkulasi pada bangunan perkantoran harus meminimalkan jarak capai antar ruang baik vertikal maupun horisontal dan menciptakan rasa hubungan yang akrab antar ruang.³⁴ oleh sebab itu sirkulasi pada Gedung DPRD Kulon Progo harus dapat memberikan kemudahan dalam pencapaian antar ruang sesuai dengan tingkat hubungan antar fungsi dan ruang.

A. Sirkulasi Ruang Luar

Sirkulasi ruang luar adalah sarana pencapaian antar kelompok ruang/ masa yang dapat diciptakan melalui pencapaian secara *langsung*, *tersamar*, atau *berputar*. Dalam perancangan Gedung DPRD Kulon Progo kesan Terbuka dan Wibawa juga harus dapat dirasakan pada sirkulasinya. Keterbukaan sirkulasi ruang luar dapat diciptakan dengan menempatkan sirkulasi pencapaian ganda.



Gbr. 2.8 Arah Pencapaian

B. Sirkulasi Ruang Dalam

Sirkulasi ruang dalam adalah sarana pencapaian antar ruang dalam satu masa atau sesuai dengan hubungan ruang yang dicapai secara *linear*, *radial*, *spiral*, *grid* atau *network* dengan pembagian fungsi sirkulasi yaitu *primer* dan *skunder*. Kesan terbuka ditunjukkan pada ruang sirkulasi melalui karakter media penutup, dimana hubungan interaksi dari ruang sirkulasi dengan ruang lainnya akan memberi makna terbuka. Sedang kewibawaan sirkulasi tercipta melalui dimensi dan perletakan.

Sirkulasi ruang luar pada gedung DPRD haruslah dapat memberi jarak capai yang dekat dan jelas terhadap ruang publik agar dapat memudahkan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan pencapaian secara langsung dan penempatan ruang

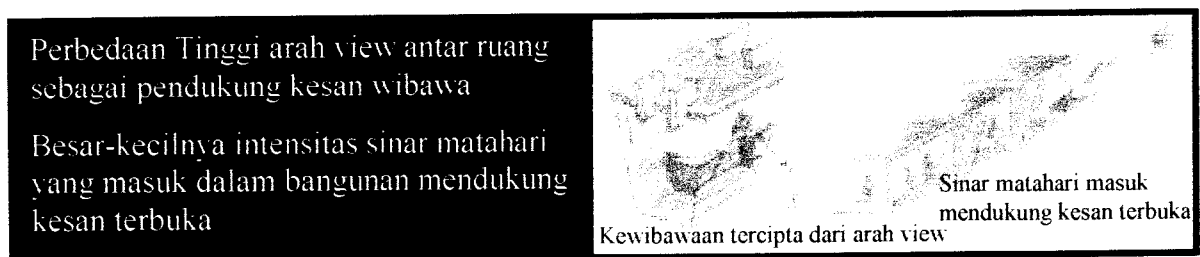
³⁴ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 6

publik yang dekat dengan pintu masuk., sedangkan pada sirkulasi ruang dalam juga harus tetap mempertimbangkan jarak capai antar ruang terutama pada ruang-ruang kerja untuk memudahkan proses kegiatan kerja dengan pengaturan hubungan ruang sesuai dengan kedekatan kegiatan yang disusun secara network dalam ruang kerja dan dihubungkan secara terpusat melalui sirkulasi antar ruang.

2.5.1.2 Orientasi Gedung DPRD

Orientasi adalah penempatan bangunan sehingga memperoleh berbagai keuntungan optimal pada site, dalam perancangan gedung perkantoran penampilan bangunan harus satu organisasi antara lingkungan dan bangunannya yang dinyatakan dalam upaya pendekatannya dengan tingkat penerimaan ke/dari publik.³⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi dan lokasi bangunan adalah³⁶ :

- a. **Cahaya matahari**, yaitu bagaimana memperoleh cahaya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan material bangunan yang tidak rapat/ transparan akan memberikan kesan terbuka dari dukung cahaya/ pantulan cahaya yang masuk ke dalam ruang.
- b. **Arah Angin**, yaitu bagaimana mengarahkan aliran angin sebagai antisipasi dari beban lateral yang diperoleh bangunan dan juga mengarahkan sirkulasi udara luar dan dalam bangunan. Bukaan serta elemen pengarah angin merupakan unsur yang dapat diolah dengan mengarah pada kesan terbuka dan wibawa.
- c. **View**, yaitu bagaimana memanfaatkan view dari luar ke arah bangunan dan dari dalam keluar bangunan sebagai daya tarik. Perletakan dan penempatan view dapat diarahkan dalam membentuk kesan wibawa melalui perbedaan tinggi.

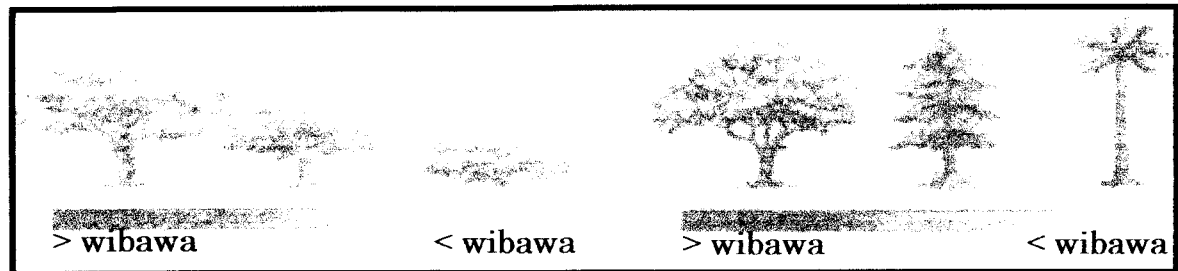


Gbr. 2.9 Orientasi pada View dan Sinar Matahari

³⁵ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 6

³⁶ Ir Fajrianto, MTP, Diktat Perencanaan Tapak II, Universitas Islam Indonesia

e. *Landscape*, yaitu bagaimana menata lingkungan luar bangunan sebagai pendukung fungsi dan kesan bangunan yang diinginkan. Penataan landscape dengan memadukan karakter tumbuhan dapat mendukung kesan terbuka dan wibawa.



Gbr. 2.10 Derajat Keterbukaan dan Kewibawaan pada Vegetasi

Orientasi gedung DPRD haruslah mengarah pada lokasi yang terjangkau oleh publik dengan penempatan entrance bangunan yang dapat dilihat dan teridentifikasi oleh publik sedangkan arah angin dan matahari dioptimalkan untuk ruang-ruang kerja dengan pengolahan yang sesuai kebutuhan sekaligus untuk membentuk penampilan visual bangunan seperti penempatan elemen shading yang sesuai dengan fungsinya dan penempatannya yang diolah secara estetik.

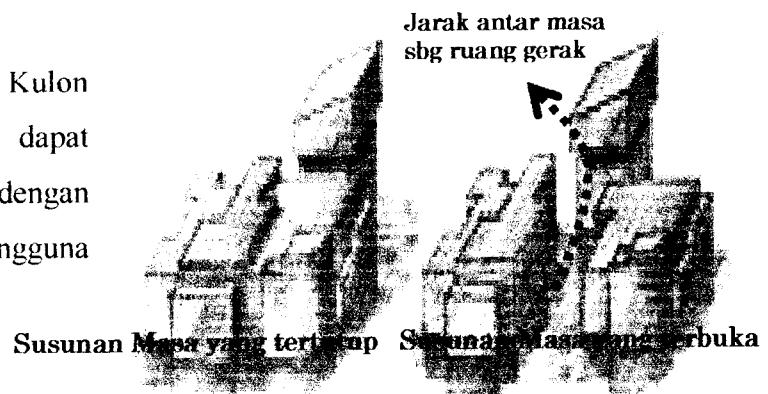
2.5.1.3 Tata Masa pada Gedung DPRD

Masa adalah ruang yang dibatasi oleh dinding, lantai dan bidang langit-langit dengan penyusunan pada bentuk yang menentukan volume ruang.³⁷ Pada bangunan perkantoran masa dibangun secara spekulatif maupun seragam untuk memberikan kesatuan pada bangunan atau kepemilikan.³⁸ Bangunan yang terdiri lebih dari satu masa harus dapat menciptakan lingkup kesatuan yang dapat diterapkan dengan penyeragaman bentuk masa atau dengan pengolahan geometri pada masa sehingga memberi satu kesatuan yang utuh pada bangunan agar publik dapat mudah dalam mengidentifikasi lokasi antar masa dalam bangunan. Masa merupakan wadah pengelompokan ruang yang disusun menurut fungsi dan hubungannya, susunan dan hubungan tersebut dapat menciptakan kesan dan karakter dari fungsi yang terbentuk.

³⁷ Franciis D. K. Ching, *Arsitektur Bentuk, Ruang dan Susunannya*, Erlangga, Jakarta, 1993, hal

³⁸ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 6

Pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo susunan masa dapat menciptakan kesan terbuka dengan menciptakan respon gerak pengguna antar ruang dan masa.



Gbr. 2.11 Keterbukaan pada Gubahan Masa

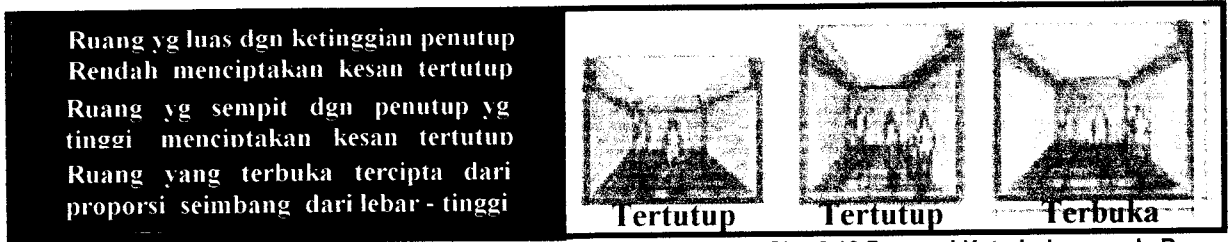
Susunan masa pada Gedung DPRD sendiri dapat dicapai melalui susunan secara *terpusat, linier, radial* atau *kluster*, pada perancangan Gedung DPRD Kulon Progo susunan masa menggunakan kluster karena dengan susunan kluster akan lebih mudah dalam membentuk open space sebagai ruang gerak serta wujud penyesuaian pada luas site yang terbatas/ kecil

2.5.1.4 Tata Ruang Gedung DPRD

Ruang merupakan wadah yang disusun dalam masa bangunan. Pada ruang tersebut bentuk visual, kualitas cahaya, dimensi, dan skala bergantung pada batas-batas yang telah ditentukan oleh unsur-unsur bentuk dan jika ruang telah ditetapkan, dilingkupi, dibentuk dan diorganisir oleh unsur-unsur bentuk maka arsitektur menjadi nyata.³⁹ Pada bangunan perkantoran untuk menghubungkan satu departemen dengan departemen lainnya dalam suatu bangunan diperlukan hubungan ruang yang sesuai dengan hubungan kerja antar bagian agar denah ruang dalam bangunan tidak saling tumpang tindih.⁴⁰ Ruang dibagi menjadi dua yaitu *ruang luar* dan *ruang dalam bangunan*, ruang luar disusun dengan *mengelompokkan* atau *penzoningan* fungsi ruang atas kegiatan sedangkan ruang dalam disusun dengan pertimbangan *hubungan ruang* atas kegiatan terhadap fungsi. Dengan permainan unsur-unsur tersebut ruang dapat menciptakan kesan yang diinginkan, kesan terbuka dapat diciptakan dengan perpaduan lebar dan tinggi bangunan yang memberi respon gerak optimal pada ruang tersebut.

³⁹ Francis D. K. Ching, *Arsitektur Bentuk, Ruang dan Susunannya*, Erlangga, Jakarta, 1993, hal 108

⁴⁰ Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, *Data Arsitek* jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 11



Gbr. 2.12 Proporsi Keterbukaan pada Ruang

Keterbukaan pada ruang diciptakan dengan mengatur skala tinggi-lebar ruang yang dapat memberi kesan terbuka dengan pengolahan penutup ruang antar departemen yang menggunakan material transparan, sedangkan kewibawaan diciptakan dengan mengatur tingkat ketinggian lantai yang disesuaikan dengan hirarki kepentingan fungsi ruang yaitu ruang-ruang dengan fungsi yang lebih utama diletakkan pada lantai yang lebih tinggi.

2.6 Tinjauan Studi Banding

2.6.1 Gedung DPRD Sleman

Kesan Terbuka yang nampak pada ekspresi Gedung DPRD Sleman terlihat pada susunan dinding penutup depan yang dominan menggunakan material transparan. Hampir dari keseluruhan dinding yang melingkupi fasade menggunakan bukaan-bukaan yang diisi dengan material kaca, keterbukaan juga terlihat dari site plan dengan adanya open space ditengah bangunan.

Kesan Kewibawaan yang muncul tidak begitu terekspresi dari fasade yang terbentuk dari masa-asa yang rendah. Kewibawaan hanya diperlihatkan melalui tonjolan-tonjolan struktur yang diekspose diluar dinding penutup dan penggunaan atap model Joglo yang dipertinggi.



Symbolisasi pada **bangunan tradisional** terlihat dari penggunaan model atap Joglo dengan penerapan konstruksi bangunan sederhana bertantai satu.

2.6.2 Gedung DPRD DIY

Kesan Terbuka tidak nampak pada ekspresi Gedung DPRD DIY, kesan yang diperlihatkan justru cenderung tertutup. Keterbukaan hanya terlihat pada masa sebelah utara yang orientasinya menghadap ke selatan yang dominan menggunakan kaca, serta open space yang diletakkan didepan bangunan sebagai ruang gerak

Kesan Kewibawaan yang terlihat muncul dari jajaran kolom bulat dengan dimensi yang besar yang diletakkan dengan cara repetisi didepan Hall utama.



Gbr. 2.14 Gedung DPRD DIY

Simbolisasi dari identitas **bangunan tradisional** tidak nampak dengan dominasi model bangunan Belanda, penerapan pada bangunan tradisional lebih terlihat pada transformasi perletakan pintu di samping kanan-kiri ruang Hall Utama.

2.6.3 Gedung DPRD Bantul

Kesan **Keterbukaan** dari bangunan Gedung DPRD Bantul tidak begitu terlihat, keterbukaan hanya ditunjukkan pada bukaan-bukaan bangunan secretariat, sedangkan pada bangunan utama justru terlihat tertutup.

Kesan **Kewibawaan** yang timbul terlihat dari ekspos struktur rangka yang rapat dan masa bangunan yang tinggi dan besar dengan struktur bangunan modern.



Gbr. 2.15 Gedung DPRD Bantul

Kesan pada **identitas bangunan tradisional** tersimbolkan melalui penggunaan atap model Joglo dengan ornament ukir jawa pada entrance bangunan meliputi bagian pintu masuk dan kuncungan atap.

BAB III

ANALISIS GEDUNG DPRD KULON PROGO

A. ANALISIS FUNGSIONAL BANGUNAN

3.1 Analisa Lokasi

3.1.1 Penentuan Lokasi Site

Pemilihan site bangunan Gedung DPRD Kulon Progo disesuaikan dengan fungsi bangunan sebagai bangunan perkantoran yang terbuka bagi masyarakat dan memenuhi fungsi pengawasan bagi pemerintah Eksekutif Daerah, yaitu :

1. Terletak pada Kota Administrasi Kabupaten Kulon Progo yaitu kecamatan Wates.
2. Sesuai dengan rencana peruntukan lahan (tata guna lahan) bagi pengembangan bidang perkantoran yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Wates Kabupaten Kulon Progo.
3. Tersedia dan dapat dijangkau oleh jaringan utilitas seperti air bersih, jaringan listrik, jaringan telephon, jaringan sanitasi kota serta sarana pendukung lainnya.
4. Luas site mencukupi untuk menampung berbagai kebutuhan ruang yang dapat mewadahi berbagai aktifitas pada Gedung DPRD Kulon Progo.
5. Kondisi sekitar mampu mendukung fungsi dan tujuan bangunan.
6. Mempunyai kejelasan visual (mudah dilihat), misalnya terletak pada tapak yang terbuka sehingga mudah dilihat dan memiliki akses yang mudah.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka, pemilihan site bangunan Gedung DPRD Kulon Progo disesuaikan dengan karakter dari lokasi yang mempunyai potensi sebagai lingkungan perkantoran yang dekat dan terbuka bagi masyarakat dan sekaligus dapat menunjang kewajiban DPRD sebagai pengontrol jalannya pemerintahan.

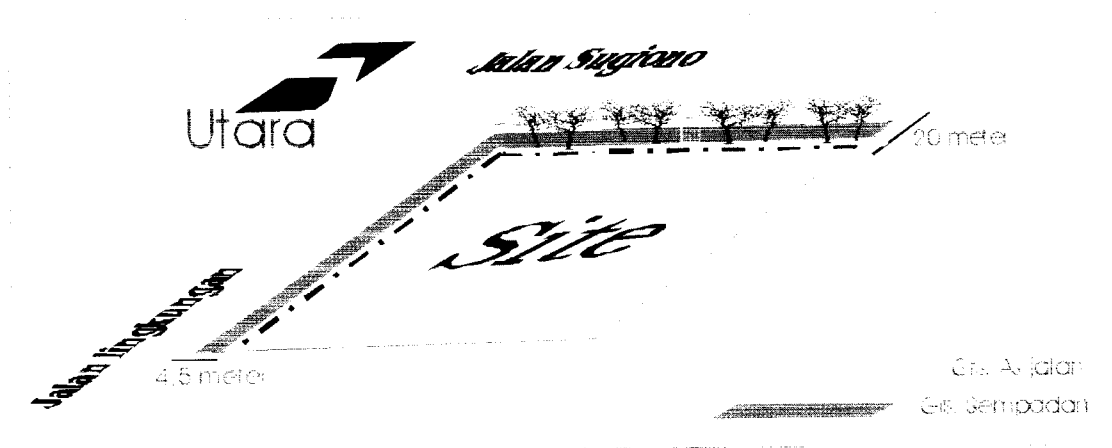
Site tepatnya terletak pada jalan Sugiono \pm 500m dari kantor Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo dan \pm 200 m dari lingkungan perumahan penduduk, dengan luas site \pm 15 000 m²

3.1.2 Potensi Site

Kawasan sekitar jalan Sugiono merupakan lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Tingkat II Kulon Progo yang dalam Rencana Tata Ruang Kota Wates merupakan daerah rencana pengembangan Perkantoran Administrasi Daerah, SMTP dan pertanian.

Adapun peraturan pemerintah mengenai pembangunan site meliputi :

1. Prosentase maksimum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk bangunan yang akan didirikan tidak boleh lebih dari 40 % dengan batas ketinggian bangunan 12m atau maksimal 2 lantai.
2. Garis Sempadan bangunan dari as jalan adalah 20 meter



Gbr. 3.1 Site Bangunan Gedung DPRD Kulon Progo

Batas site sebelah utara merupakan jalan Sugiono (arteri skunder), sebelah selatan daerah persawahan, sebelah barat jalan lingkungan dan sebelah timur daerah persawahan.

Site merupakan area persawahan yang secara garis besar kondisi site sebagai berikut :

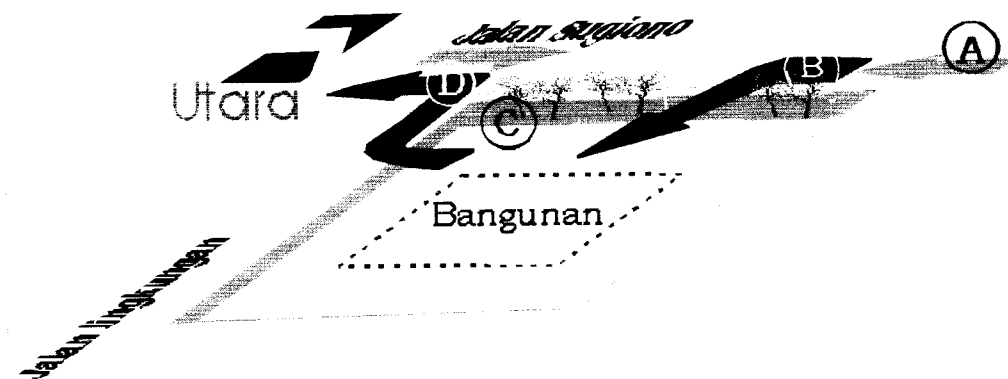
- a. Site relatif tidak berkontur
- b. Site memiliki jaringan utilitas seperti jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan air bersih dan jaringan drainase kota.
- c. Site memiliki kedekatan dengan daerah perkantoran Pemda Kulon Progo, perumahan penduduk dan sekolah (sarana pendidikan)

3.1.3 Analisis Site

3.1.3.1 Sirkulasi Site

A. Pencapaian

Posisi site terletak pada jalan Sugiono dimana lalu lintas padat pada jam-jam 7.00-9.00, 12.00-14.00 dan 16.00-18.00 sehingga perlu diperhatikan pencapaian dengan meletakkan posisi pintu masuk untuk kemudahan sirkulasi menuju bangunan dengan tidak mengganggu lalu lintas kota dan perlunya area parkir dalam site untuk menghindari penggunaan parkir disepanjang jalan tersebut.



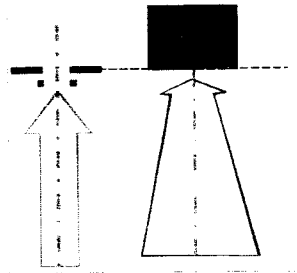
Gbr. 3.2 Sirkulasi Luar Site

- A. Jalan Sugiono merupakan sirkulasi utama yang padat lalu lintas, untuk menghindari adanya kemacetan lalu lintas dijalur tersebut maka daerah sepanjang site dijadikan daerah bebas parkir dengan konsekwensi penyediaan area parkir didalam site.
- B. Area B merupakan daerah garis sempadan (bebas bangunan) yang cukup luas, untuk memberikan fungsi pada lahan tersebut dapat direncanakan sebagai lahan parkir dan taman.
- C. Sebagai respon pada kepadatan lalu lintas, pencapaian arah masuk dan keluar site disearahkan dengan arah gerak lalu lintas.

D. Jalan Lingkungan yang tidak padat diefektifkan sebagai pencapaian bagi karyawan dan staff Gedung DPRD, hal ini dapat membantu pada respon antisipasi kemacetan diarah jalur jalan Sugiono.

Adapun pencapaian sendiri dapat diterapkan dengan beberapa alternatif antara lain :

1. Pencapaian secara langsung



Keuntungan :

- a. Pencapaian ke pintu masuk jelas
- b. Vasade bangunan keseluruhan terlihat jelas

Kekurangan :

- a. Bentuk tiga dimensi dan perspektif bangunan tidak terlihat

2. Pencapaian secara tersamar



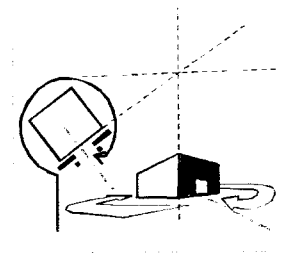
Keuntungan :

- a. Memberi efek perspektif pada fasade depan

Kekurangan :

- a. Memerlukan tanda utk mengarah ke tujuan
- b. Pencapaian kurang jelas

3. Pencapaian secara berputar



Keuntungan :

- a. Dapat memperlihatkan keutuhan bangunan tiga dimensi
- b. Memberi surprise

Kekurangan :

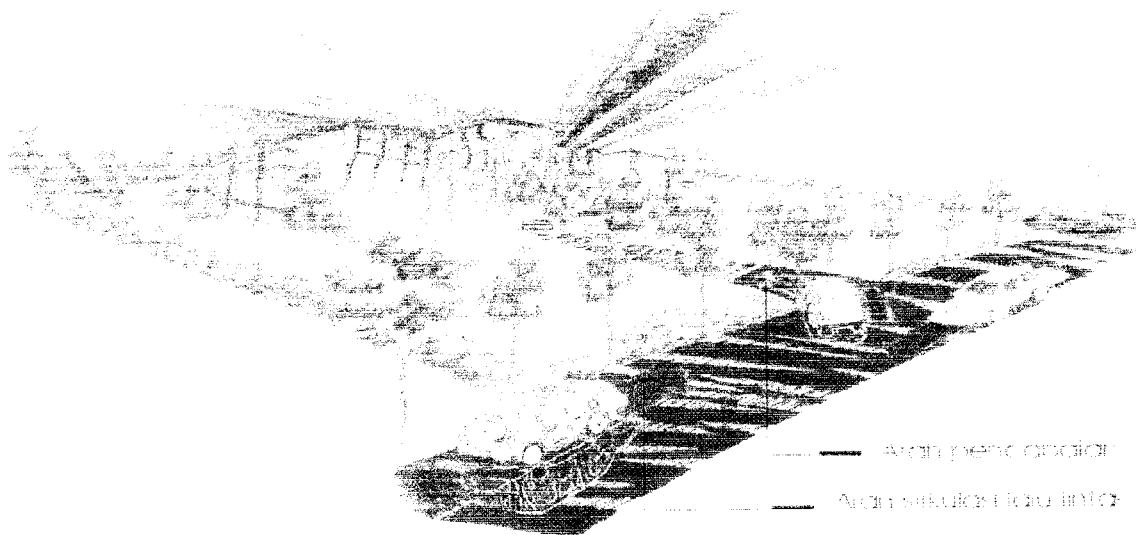
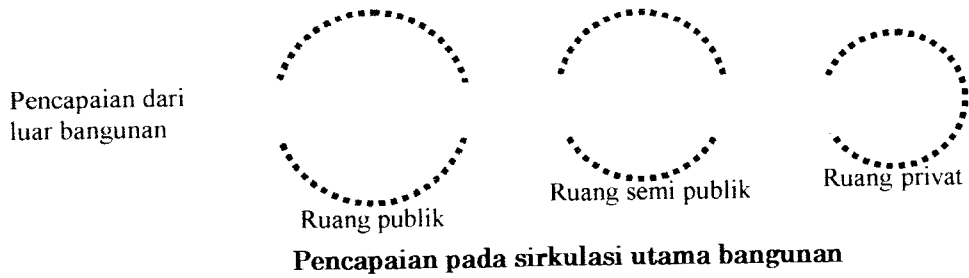
- a. Pencapaian tidak jelas
- b. Memerlukan banyak tanda untuk mengarah ke tujuan

Gbr. 3.3 Alternatif Pencapaian

Dengan analisa diatas maka rencana pencapaian dan sirkulasi pada site Gedung DPRD Kulon Progo menggunakan peencapaian secara langsung dengan pertimbangan :

1. Memberi kemudahan dalam pencapaian pada aktifitas publik seperti demonstrasi.
2. Memberi kesan menerima dengan konsekwensi pada kemudahan pencapaian ke dalam bangunan sehingga berkesan terbuka dalam menerima masyarakat umum.

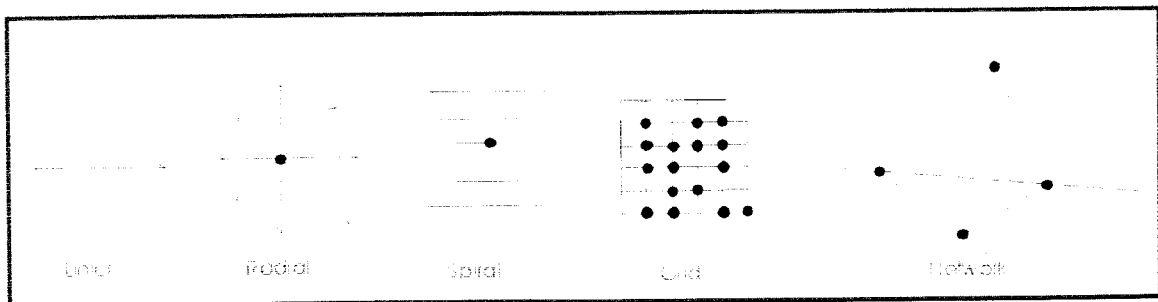
Pada pencapaian ini hubungan kegiatan dicapai dari luar site menuju ruang publik, semi publik, privat secara langsung melalui sirkulasi utama.



gbr. 3.4 Arah Pencapaian

B. Sirkulasi Dalam pada Site

Sirkulasi dalam pada site adalah sirkulasi dimana masa-masa pada bangunan dihubungkan oleh garis-garis pencapaian dan pada unit-unit masa tersebut juga dihubungkan oleh sirkulasi antar ruang. Adapun jenis sirkulasi antara lain :

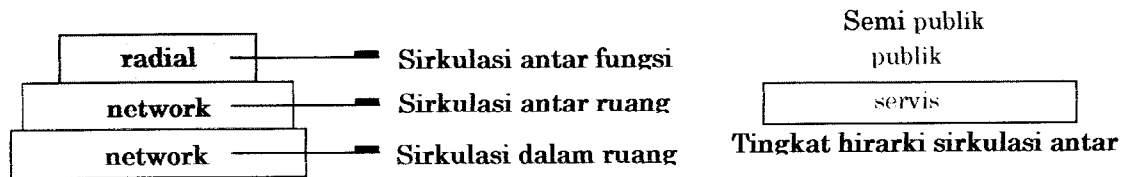


Gbr. 3.5 Pola Sirkulasi

Dari alternatif diatas maka jenis sirkulasi yang sesuai dengan Gedung DPRD Kulon Progo adalah gabungan jenis sirkulasi network dan radial dengan pertimbangan :

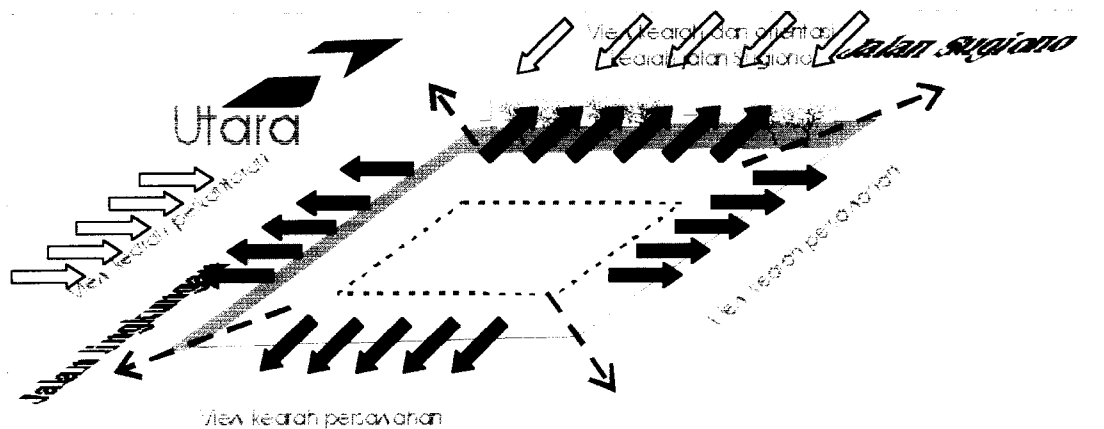
1. Kesesuaian dengan pola keruangan yang menggunakan hirarki/ berpusat disesuaikan dengan sirkulasi radial
2. Hubungan kelompok ruang yang saling berhubungan membentuk suatu sistem disesuaikan dengan sirkulasi network

Pada alternatif ini sirkulasi network berfungsi untuk menghubungkan antar ruang dalam satu fungsi yang mengarah pada sirkulasi utama bangunan yang menghubungkan antar fungsi dengan sifat radial menuju titik hirarki tertinggi.



3.1.3.2 View dari dalam atau luar Site

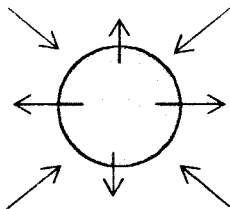
Site menempati lokasi yang memiliki view masuk dan keluar dengan spesifikasi sebagai berikut :



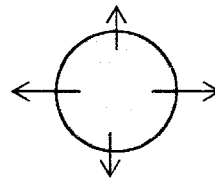
Gbr. 3.6 Arah View Bangunan

- a. Site bagian utara mendapat view dari jalan Sugiono, berseberangan dengan kantor dinas Pekerjaan Umum (DPU).
- b. Site bagian selatan view mengarah keluar pada area persawahan yang pada RDTRK Wates merupakan area pengembangan sarana pendidikan (SMTP).
- c. Site sebelah Timur view mengarah keluar pada area persawahan yang merupakan daerah rencana pengembangan perkantoran.
- d. Site pada bagian barat mendapat view dari jalan lingkungan yang berseberangan dengan area perkantoran.

Pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo, orientasi fasade bangunan ditujukan ke jalan Sugiono dengan arah ke depan dan menyudut serta kearah barat hal tersebut disesuaikan dengan kondisi site yang banyak menerima view dari luar, sedangkan arah view keluar diarahkan keseluruh sudut bangunan karena untuk memaksimalkan bukaan sebagai alur keluar-masuk udara dan penerangan alami serta mendukung adanya kesan keterbukaan.



Arah view ruang PUBLIK dan SEMI PUBLIK



Arah view pada ruang PRIFAT dan SERVIS

Arah view masuk diterapkan pada ruang publik dan semi publik dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pada pengunjung untuk menemukan ruang tersebut sehingga perletakkannya berada dibagian utara dan barat site yang banyak mendapat view dari luar.

View keluar diterapkan pada semua ruang dengan arah barat dan utara untuk ruang publik dan semi publik, sedangkan arah timur dan selatan diterapkan untuk ruang privat dan servis.



3.2 Fungsi dan Kebutuhan Ruang

3.2.1 Analisa Kegiatan Pelaku

Kegiatan yang diwadahi dalam bangunan Gedung DPRD Kulon Progo meliputi beberapa kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat publik, semi publik, privat dan kegiatan servis yang dikelompokkan dalam dua badan tugas antara lain kelompok anggota DPRD dan kelompok staff Sekretariat DPRD, kegiatan tersebut antara lain :

Tabel 3.1 Kegiatan dan Kebutuhan Ruang

Kegiatan	fungsi ruang	pelaku	Jumlah	Keb. ruang	fasilitas
Demonstrasi	Publik	Masyarakat-Pers	200	R. Hall	Panggung Orasi
		Anggota DPRD	40	R. Pengamatan	
		Petugas	20	Lavatori	
Sidang Paripurna	Publik	Masyarakat-Pers	150	R.Sidang Paripurna	Mimbar Pimpinan
		Anggota DPRD	40	R. Pengelola	Sound Sistem
		Petugas	10	R. Pengunjung	Meja-Kursi Persid
		Ang. Eksekutif	20	R. Pers	Kursi Pengunjung
Parkir	Publik	Tamu (masy,	120 mbl	Parkir mobil	Rambu-Rambu
		pers, Eks)	100 mtr	Parkir Motor	Garis Batas Kend.
		Anggota DPRD	3 bis	Parkir Bis	Pos Jaga
		Sekretariat		Lavatori	
Istirahat/ Santai	Publik	Umum		Taman	Tempat duduk
				Mushola	Tempat Bermain
				Cafetaria	Lapangan O.R
				Perpustakaan	
Peny. Pendapat	Publik	Masyarakat	40	R. Peny. Pendapat	Meja-kursi
		Anggota DPRD	8	Lavatori	
		Petugas	2		
Penerimaan	Publik	Masyarakat-pers	150	Lobby	Meja Penerimaan
		Petugas		R. Informasi	Alat Komunikasi
				R. Tunggu	Kursi Tunggu
Sidang	Semi Publik	Anggota DPRD	10	R. Sidang Fraksi	Meja Sidang
		Petugas	2	R. Sidang Komisi	Sound Sistem

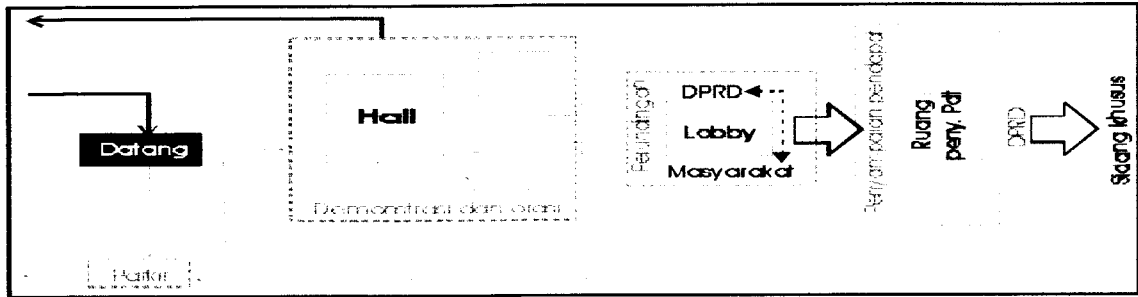
				R. Rapat Risalah	
				Lavatori	
Pelayanan	Semi Publik	Petugas	2	R. Tamu	Meja-kursi
		Tamu	5	R. Pers	
Kunjungan Kerja	Semi Publik	Anggota DPRD	10	R. Transit	
		Petugas	2	Garasi	
				R. Tunggu Sopir	
Rutinitas Kerja	Prifat	Anggota DPRD	40	R. Ketua DPRD	Meja-kursi
		Sekretariat	40	R. Wakil ketua	Lemari arsip
		(staff, karyawan)		R. Komisi	
				R. Fraksi	
				R. Arsip	
				R. Sekretaris	
				R. Kepala Bagian	
				R. Ka. Sub. Bag	
				R. Karyawan	
				R. Staff	
				KM/WC	
				Lavatori	

Analisa Ruang pada Kegiatan Utama

1. Demonstrasi

Demonstrasi adalah kegiatan pelayanan pihak DPRD kepada masyarakat umum dalam menerima pernyataan protes ataupun usulan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah, kegiatan ini bersifat umum dengan waktu kegiatan tidak terbatas. Adapun kebutuhan ruang yang harus disediakan adalah :

- a. Hall
- b. Panggung Orasi
- c. Ruang Pengamatan
- d. Lavatori



Gbr. 3.7 Bagan Kegiatan Demonstrasi

Pada ruang utama kegiatan demonstrasi dapat diterapkan dengan sifat ruang yang terbuka ataupun tertutup yang mewadahi kebutuhan ruang-ruang dan fasilitas kegiatan tersebut, dalam hal ini ada dua alternatif ruang :

a. Hall Terbuka

Keuntungan :

- Kapasitas ruang lebih fleksibel
- Memberi kesempatan peran serta pada masyarakat sekitar
- Jaminan pada keamanan gedung

Kekurangan :

- Kurangnya kenyamanan pada ruang
- Kurangnya interaksi antara masyarakat dan DPRD

b. Hall Tertutup

Keuntungan :

- Memiliki kenyamanan ruang yang lebih
- Interaksi antara masyarakat dengan DPRD

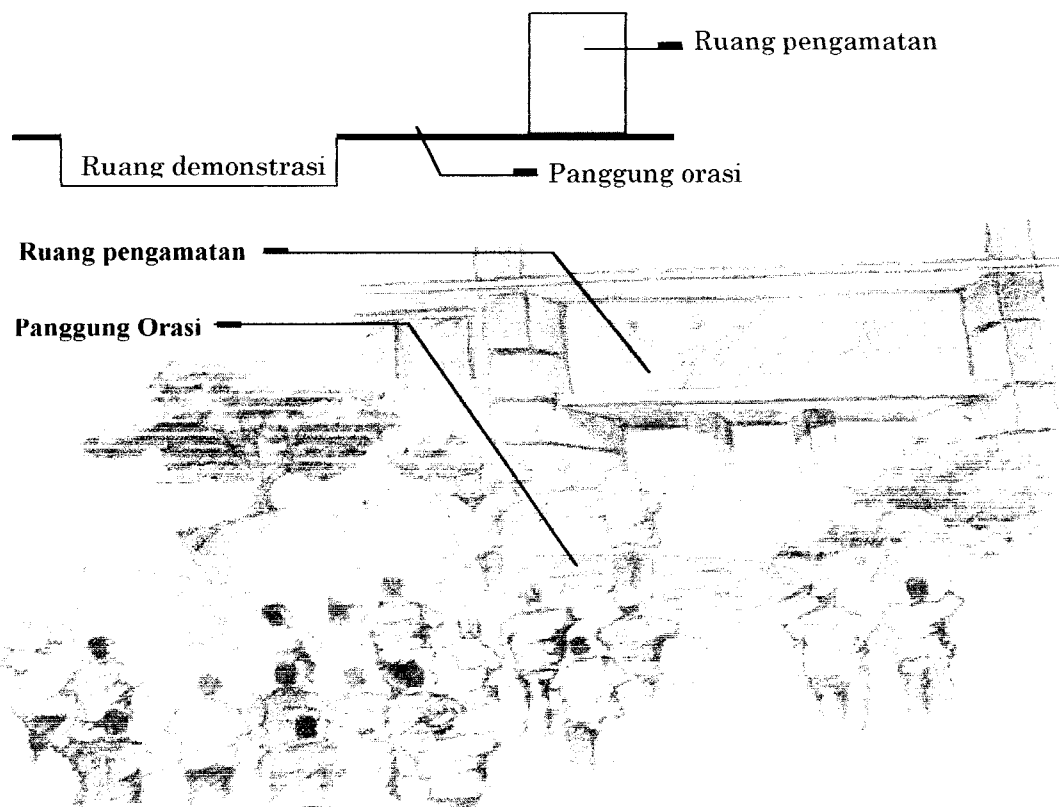
Kekurangan :

- Kapasitas ruang terbatas
- Keamanan Gedung kurang terjamin

Dari alternatif ruang diatas, maka ruang Hall terbuka akan lebih menguntungkan dengan penerapan atau letak ruang pada bagian depan bangunan, adapun pertimbangannya adalah :

- Kemudahan pencapaian pada saat kegiatan berlangsung
- Keamanan gedung lebih terjamin
- Ruang terbuka lebih fleksibel dalam menerima kelebihan pengguna
- Lebih berkesan terbuka karena memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk menyaksikan atau berperan dalam kegiatan tersebut.
- Letak ruang pengamatan yang lebih tinggi dengan ruang lainnya akan memberi kesan wibawa pada pemakainya, selain itu juga memberi jaminan pada keamanan.

Hall diletakkan didepan bangunan untuk memudahkan pencapaian dengan ruang demonstrasi diperendah dari permukaan site untuk mempermudah pengamatan.

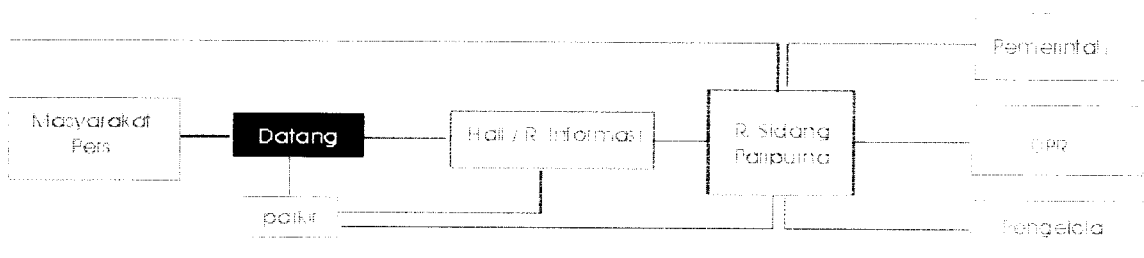


Gbr. 3.8 Hall dengan ruang terbuka

2. Sidang Paripurna

Adalah sidang Dewan Legislatif yang diadakan dalam pembentukan RAPBD, penetapan peraturan daerah (Perda), pertanggung jawaban Bupati, sidang pengajuan proyek daerah (sidang umum), sidang pemecahan kasus daerah (sidang khusus) dan sebagainya. Ruang yang dibutuhkan pada kegiatan ini adalah :

- a. Ruang Sidang
- b. Ruang Pengelola (ruang mixer)
- c. Ruang Pengunjung dan Pers
- d. Mimbar Pimpinan.
- e. Lavatori

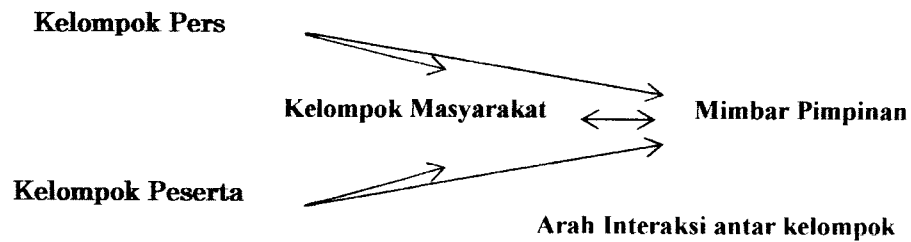


Gbr. 3.9 Bagan Kegiatan Sidang Paripurna

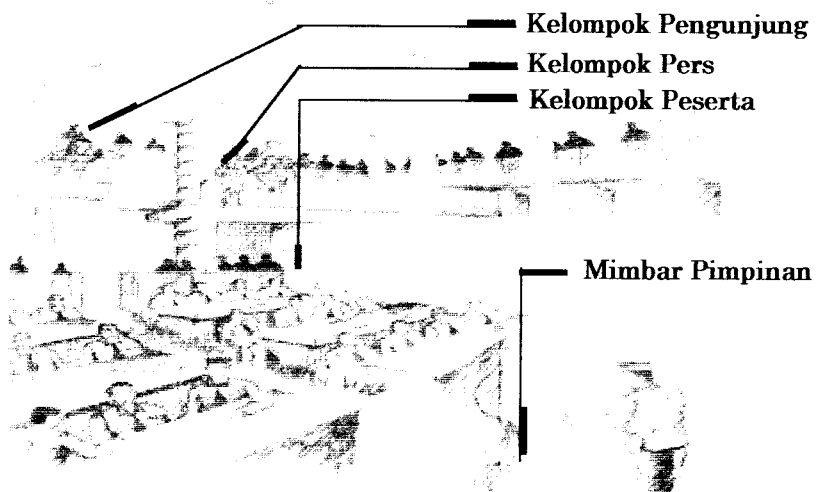
Kebutuhan ruang diatas dalam perancangan Gedung DPRD Kulon Progo dapat diterapkan dengan 2 alternatif yaitu penempatan secara terpisah dan penggabungan.

1. Penggabungan ruang
2. Pengelompokan ruang

Dari analisa diatas maka penempatan ruang yang sesuai dengan ruang sidang paripurna Gedung DPRD Kulon Progo adalah menggunakan cara pengelompokan dengan pertimbangan :



- Pertimbangan pada faktor keamanan baik pihak DPRD, masyarakat, atau kelompok peserta persidangan lainnya, yaitu memberikan jarak pada kelompok tersebut untuk menghindari perselisihan pendapat pada persidangan.
- Pertimbangan pada faktor fungsi yaitu membedakan tugas dan aktifitas yang berbeda dari pihak peserta persidangan agar persidangan dapat berjalan dengan baik.
- Pertimbangan pada faktor ekspresi yaitu menekankan pada terciptanya kesan wibawa pada pihak peserta persidangan.



Gbr.3.10 Ruang Sidang Paripurna

3. Persidangan

Persidangan adalah kegiatan utama dari tugas anggota dewan legislatif sebagai penentu jalannya pemerintahan daerah, adapun persidangan dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Sidang Komisi
2. Sidang Fraksi
3. Sidang Risalah

Dalam rencana ruang sidang Gedung DPRD Kulon Progo dapat diterapkan dengan susunan secara kluster (berkelompok) dan secara hirarki (berpusat) dengan alternatif ruang sebagai berikut :

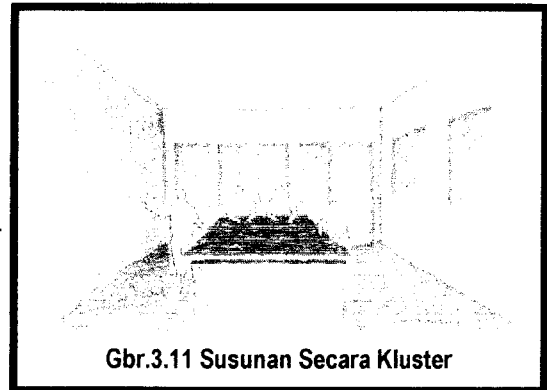
a. Susunan ruang sidang secara kluster

Kelebihan :

- Interaksi antar pemakai mudah
- Tidak membutuhkan ruang yang besar

Kekurangan :

- Jumlah pemakai terbatas



b. Susunan ruang sidang secara hirarki

Kelebihan :

- Daya tampung optimal

Kekurangan :

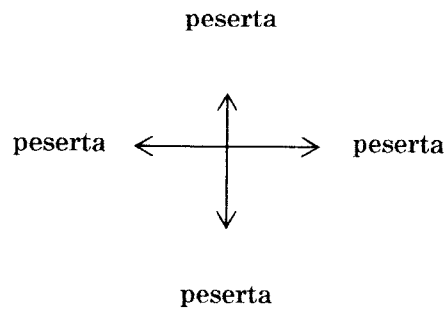
- Ruang gerak terbatas
- Membutuhkan ruang yang besar



Dari analisa diatas maka susunan ruang yang tepat dari kedua alternatif untuk ruang sidang Gedung DPRD Kulon Progo adalah secara kluster dengan pertimbangan :

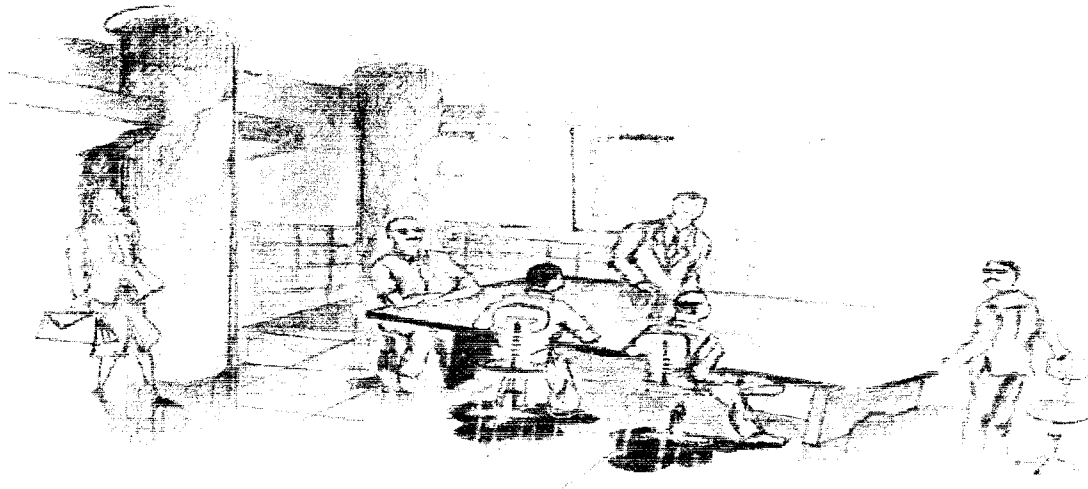
- Pertimbangan pada fungsi secara kualitatif, yaitu mengoptimalkan interaksi antara peserta sidang dengan meminimalkan jarak antar peserta.
- Pertimbangan pada fungsi secara kuantitas, yaitu mengoptimalkan besaran ruang disesuaikan dengan jumlah peserta sidang yang terbatas.

Kelompok kluster yang dimaksud dalam perencanaan Gedung DPRD ini adalah kluster tanpa hirarki atau pengelompokan yang disejajarkan antara peserta satu dengan lainnya, hal ini dicapai untuk mempermudah interaksi antar peserta sidang.



Dengan kesejajaran maka interaksi antar peserta persidangan akan lebih mudah dan hubungan antar peserta akan lebih optimal antara satu dengan lainnya

Hubungan dan interaksi peserta sidang



Gbr. 3.13 Ruang Sidang secara Kluster (berkelompok)

3.2.2 Analisa Kebutuhan dan Besaran Ruang

Besaran ruang pada Gedung DPRD Kulon Progo ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kegiatan yang diwadahi - Bab II
2. Jumlah pemakai (prosentase) – Bab III
3. standart besaran ruang – Bab II

Berdasarkan pada pendataan jumlah anggota Legislatif, pegawai dan karyawan Gedung DPRD Kulon Progo terdiri dari 40 orang anggota Legislatif serta 40 pegawai dan karyawan sekretariat DPRD.

Berdasarkan tuntutan akan penambahan ruang baru yang bersifat publik dengan melibatkan peran unsur masyarakat diasumsikan secara maksimum mewadahi 200 orang

Tabel besaran ruang pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo

1. Kebutuhan Ruang Publik

Tabel 3.2 Ruang Publik Anggota Dewan Legislatif

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas Analisis (m ²)	Jumlah (m ²)
1	R. Sidang Paripurna	1	150 masy, 40 angg Leg, 10 petugas, 20% Sirkulasi, 5% lain-lain	1,25 0,8 $((150+(20\% \times 150)) \times 1,25 + (40 + 10) \times 0,8$	312,5
2	Lobby	1	75% masy, 20% sirkulasi	1,1 $((75\% \times 200) + (20\% \times 200)) \times 1,1$	209
3	R. Hall	1	100% masy, 100% angg Leg, 50% petugas, 20% Sirkulasi, 5% lain-lain	1,5 $((200 + 40 + 20) + (20\% + 260) + (5\% + 260)) \times 1,1$	487,5
4	Parkir Publik	1			1360,8
	Mobil		60 mbl (30% masy)	12 $((60 \times 12) +$	
	Motor		150 mtr	1,5 $(150 \times 1,5) +$	
	Bis		3 bis	44 $(3 \times 44) + 20\% \text{jml}$	
5	R. Peny. Pendapat	1	20% masy, 20% angg. Leg 5% petugas	2,5 $((40 + 8 + 2)) \times 2,5$	125
6	Taman	1	menyesuaikan	-	-
Jumlah Total					2494,8

Tabel 3.3 Ruang Publik Sekretaris DPRD

No	Kebutuhan ruang	Unit	Asumsi perhitungan	Luas Analisis (m ²)	Jumlah (m ²)
1	Parkir Pengguna	1			720
	Mobil		40 mbl (50% pengguna)	12 $((40 \times 12) +$	
	Motor		80 mtr (100% pengguna)	1,5 $(80 \times 0,8) + 20\% \text{jml}$	
2	Taman	1	Menyesuaikan		
Jumlah Total					720

2. Kebutuhan Ruang Semi Publik

Tabel 3.4 Ruang Semi Publik Anggota Legislatif

<i>no</i>	<i>Kebutuhan ruang</i>	<i>Unit</i>	<i>Asumsi perhitungan</i>	<i>Luas (m²)</i>	<i>Analisis</i>	<i>Jumlah (m²)</i>
1	R. Sidang Komisi	2	25% Angg Leg. 5% pet.	3	$((25\% \times 40) + (5\% \times 40)) \times 2 \times 3$	72
2	R. Sidang Fraksi	2	25% angg. Leg. 5% pet.	3	$((25\% \times 40) + (5\% \times 40)) \times 2 \times 3$	72
3	R. Tamu	2	5 orang	2,5	$5 \times 2 \times 2,5$	25
4	R. Pers	3	5 orang	2,5	$5 \times 3 \times 2,5$	37,5
5	R. Transit	1	25% angg. Leg. 5% pet	3	$((25\% \times 40) + (5\% \times 40)) \times 3$	36
Jumlah Total						242,5

Tabel 3.5 Ruang Semi Publik Sekretariat DPRD

<i>no</i>	<i>Kebutuhan ruang</i>	<i>Unit</i>	<i>Asumsi perhitungan</i>	<i>Luas (m²)</i>	<i>Analisis</i>	<i>Jumlah (m²)</i>
1	R. Rapat Risalah	1	25% sekretariat, 10% angg Legislatif	3	$((25\% \times 40) + (10\% \times 40)) \times 3$	42
2	R. Tamu	2	5 orang	2,5	$5 \times 2 \times 2,5$	25
3	Garasi	5	5 kendaraan	12	12×5	60
Jumlah Total						127

3. Kebutuhan Ruang Privat

Tabel 3.6 Ruang Privat Anggota Legislatif

<i>no</i>	<i>Kebutuhan ruang</i>	<i>Unit</i>	<i>Asumsi perhitungan</i>	<i>Luas (m²)</i>	<i>Analisis</i>	<i>Jumlah (m²)</i>
1	R. Ketua Dewan	1	1 Orang	30	1×30	30
2	R. Wakil Ketua	3	1 Orang	20	3×20	60
3	R. Komisi	5	7 Orang	8	$5 \times 7 \times 5$	280
4	R. Fraksi	7	5 Orang	8	$7 \times 5 \times 5$	280

5	R. Arsip	1	1 Orang	16	1 x 16	16
Jumlah Total						666

Tabel 3.7 Ruang Privat Sekretariat DPRD

<i>no</i>	<i>Kebutuhan ruang</i>	<i>Unit</i>	<i>Asumsi perhitungan</i>	<i>Luas</i>	<i>Analisis</i>	<i>Jumlah</i>
				<i>(m²)</i>		<i>(m²)</i>
1	R. Sekretaris	1	1 Orang	25	1 x 25	25
2	R. Kepala Bagian	3	1 Orang	15	3 x 15	45
3	R. Kepala. Sub. Bag	6	1 Orang	12	6 x 12	72
4	R. Karyawan	3	4 Orang	6	3 x 4 x 6	72
5	R. Risalah	1	2 Orang	8	2 x 8	16
6	R. Staff	6	5 Orang	6	6 x 5 x 6	180
Jumlah Total						410

4. Kebutuhan Ruang Servis

Tabel 3.8 Ruang Servis Anggota Legislatif

<i>no</i>	<i>Kebutuhan ruang</i>	<i>Unit</i>	<i>Asumsi perhitungan</i>	<i>Luas</i>	<i>Analisis</i>	<i>Jumlah</i>
				<i>(m²)</i>		<i>(m²)</i>
1	Lavatory	5	5 Orang	3	5 x 5 x 3	75
2	KM/WC	4	1 Orang	6	4 x 6	24
4	Lapangan O. R	1	-			
5	Mushola	1	100 orang	0,65	100 x 0,65	65
Jumlah Total						164

Tabel 3.9 Ruang Servis Sekretariat DPRD

<i>No</i>	<i>Kebutuhan ruang</i>	<i>Unit</i>	<i>Asumsi perhitungan</i>	<i>Luas</i>	<i>Analisis</i>	<i>Jumlah</i>
				<i>(m²)</i>		<i>(m²)</i>
1	Lavatory	4	3 Orang	3	4 x 3 x 3	36
2	Mushola	1	100 orang	0,65	100 x 0,65	65
3	Lapangan O. R	1	-			

4	KM/WC	1	1 Orang	6	1 x 1 x 6	6
5	Perpustakaan	1	3 petugas,	3	(3 x 3) +	79
	Perbukuan		50 Pengguna	0,6	(50 x 0,6) +	
	R. Baca			0,8	(50 x 2,5)	
6	Cafetaria	1	100 pengguna	1,4	(25%x40)x2x1,4	140
7	Dapur	1	3 Orang	8	3 x 8	24
Jumlah Total						350

Luas total keseluruhan $\pm 5174,3 \text{ m}^2$, untuk menganalisa ruang sirkulasi diambil 20% dari luas keseluruhan, jadi $1034,86 + 5174,5 = 6209,36$. Maka luas keseluruhan bangunan adalah $\pm 6209,36 \text{ m}^2$

3.2.3 Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang

3.2.3.1 Hubungan Ruang

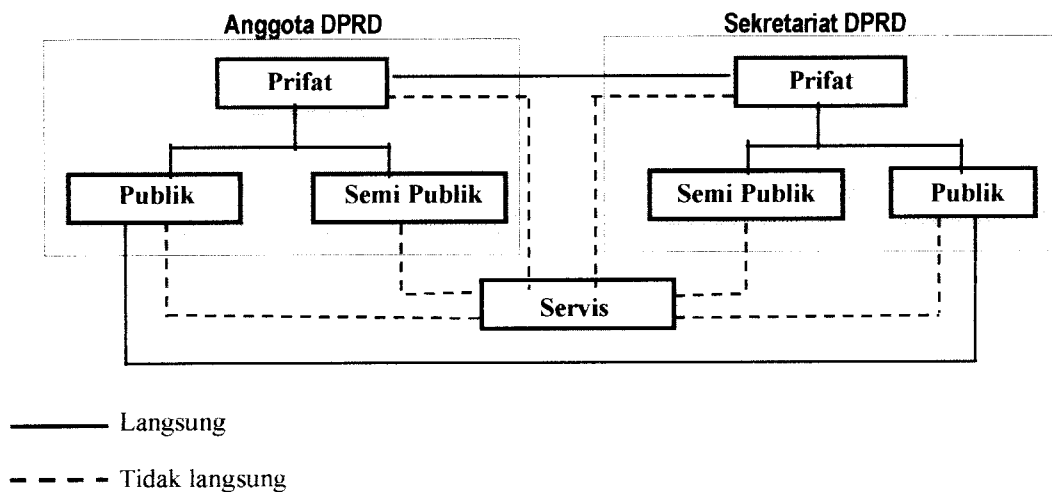
Hubungan ruang dalam bangunan Gedung DPRD Kulon Progo merupakan keterkaitan antara ruang satu dengan lainnya. Dasar-dasar pertimbangan dalam menentukan hubungan ruang antara lain :

- a. Keterkaitan hubungan antar kegiatan
- b. Keterkaitan antar fungsi kegiatan, serta frekwensi hubungan kerja.

Dari dasar pertimbangan diatas didapat tiga tingkatan hubungan ruang yaitu :

1. Hubungan Langsung/ Hubungan Erat (kegiatan dengan tingkat privasi rendah) yaitu :
 - a. Lobby berhubungan langsung dengan Ruang Sidang Paripurna, Ruang Penyampaian Pendapat, Ruang Tamu dan Ruang Pers.
 - b. Ruang Ketua berhubungan langsung dengan Ruang Sekretaris.
 - c. Ruang Ketua berhubungan langsung dengan Ruang Wakil Ketua.
 - d. Ruang Sekretaris berhubungan langsung dengan Ruang Kepala Bagian.
 - e. Ruang Sidang Paripurna berhubungan langsung dengan ruang teknis.

2. Hubungan Tidak Langsung/ Hubungan Kurang Erat (tingkat privasi sedang)
 - a. Ruang Pengelola berhubungan tidak langsung dengan ruang-ruang lain
 - b. Ruang Staff dan Karyawan berhubungan tidak langsung dengan Ruang Anggota Dewan Legislatif.
 - c. Lavatori berhubungan tidak langsung dengan ruang-ruang lainnya.
 - d. Hall berhubungan tidak langsung dengan ruang-ruang lainnya.
3. Tidak ada Hubungan (tingkat privasi tinggi)
Yaitu ruang-ruang kegiatan servis tidak berhubungan dengan ruang-ruang lainnya.



Gbr 3.14 Bagan Hubungan Ruang

3.2.3.2 Organisasi Ruang

Organisasi ruang dilakukan untuk memperoleh penataan ruang yang optimal. Dasar penataan ruang dalam menentukan organisasi ruang adalah :

- a. Hirarki atau tingkatan fungsi ruang
- b. Hubungan antar ruang
- c. Frekwensi hubungan ruang

B. ANALISIS CITRA DAN KESAN BANGUNAN

3.3 Analisa Kesan Keterbukaan dan Kewibawaan serta Kontektual pada Bangunan Tradisional

Analisa kesan Keterbukaan dan Kewibawaan serta kontektual pada bangunan tradisional dibawah adalah metode yang dilakukan dengan menerapkan citra/ kesan pada fungsi dan dasar-dasar faktor penentu dengan pendekatan penerapan citra pada unsur-unsur dasar perancangan bangunan yang dapat disesuaikan.

Adapun hubungan kesesuaian antara dasar-dasar perancangan dengan faktor penentu ekspresi bangunan adalah sebagai berikut :

3.3.1 Analisa Kesan Keterbukaan

Tabel 3.10 Dasar Penentu Kesan Terbuka

Faktor penentu	Tata masa	Lay out ruang	Bentuk bangunan	Sirkulasi
Komposisi				
Hirarki				
Skala				

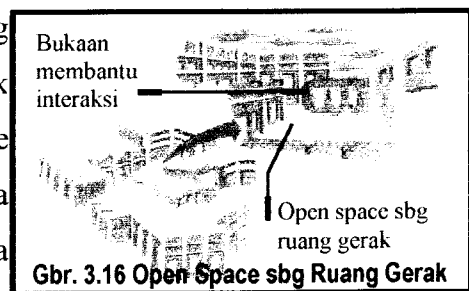
Keterangan :

- : berhubungan
- : tidak berhubungan

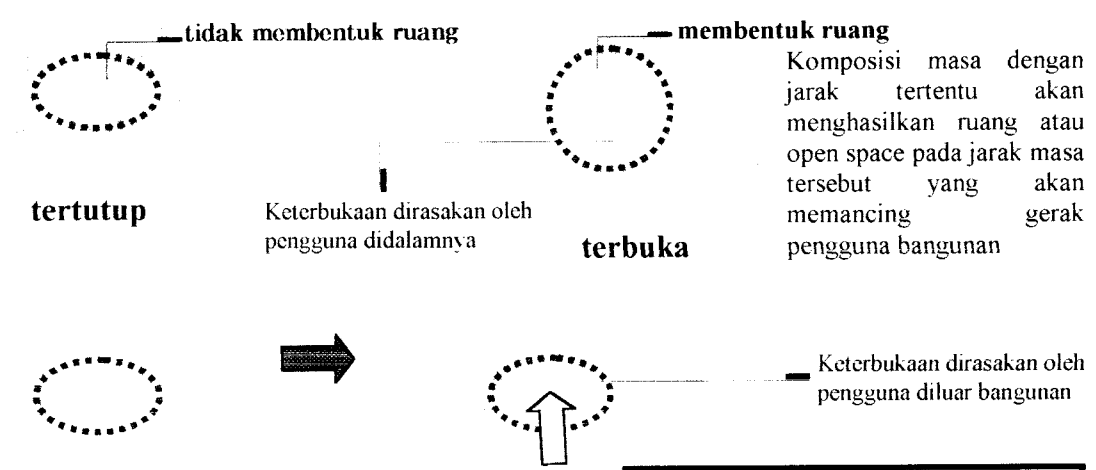
Dalam menentukan kesan keterbukaan pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo dapat dicapai melalui :

1. Komposisi

Komposisi diciptakan melalui tata masa yang diarahakn dengan memadu gubahan masa untuk membentuk ruang-ruang sirkulasi atau open space yang mengarah pada aktifitas gerak pengguna sehingga memberi kesan terbuka. Selain itu juga



dapat diciptakan melalui lay out ruang yang menggunakan bahan-bahan penutup transparan atau dengan memperbanyak bukaan sehingga merespon interaksi antara pengguna didalam bangunan dan luar bangunan.



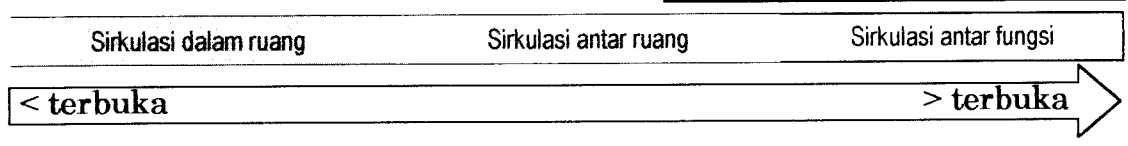
2. Hirarki

Hirarki diciptakan melalui sirkulasi dengan paduan tingkat keterbukaan pada sirkulasi-sirkulasi yang menuju ruang-ruang utama atau ruang-ruang publik.



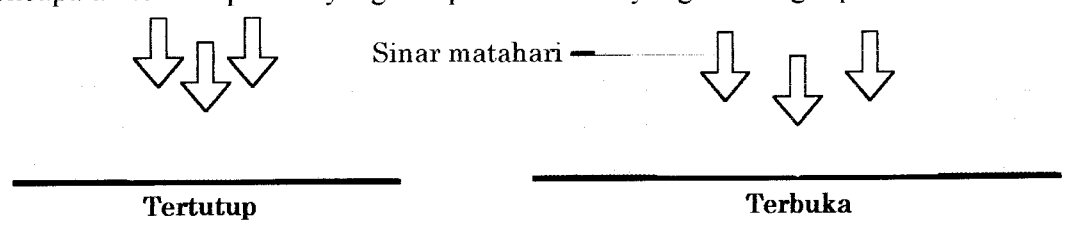
Gbr. 3.17 Hirarki Sirkulasi

Hirarki keterbukaan pada sirkulasi :



3. Skala

Skala dibentuk dengan tata masa dimana skala-skala pada gubahan masa memiliki proporsi jarak yang dapat memberi kesan terbuka yaitu proporsi antara jarak pencapaian terhadap masa yang dicapai atau masa yang meliungkupi.



Skala proporsi keterbukaan pada jarak masa dapat ditentukan dengan orientasi sinar matahari yang masuk diantara jarak masa tersebut.

3.3.2 Analisa kesan Kewibawaan

Tabel 3.11 Dasar Penentu Kesan Wibawa

Faktor penentu	Tata masa	Lay out ruang	Bentuk bangunan	Sirkulasi
Komposisi				
Hirarki				
Skaia				

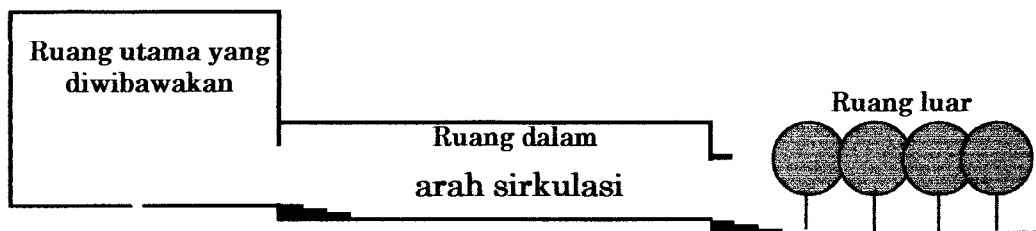
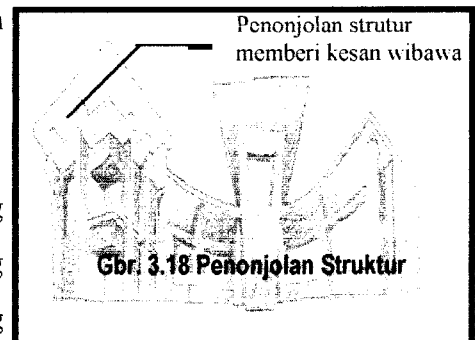
Keterangan :

: berhubungan
 : tidak berhubungan

Dalam menentukan kesan kewibawaan pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo dapat dicapai melalui :

1. Komposisi

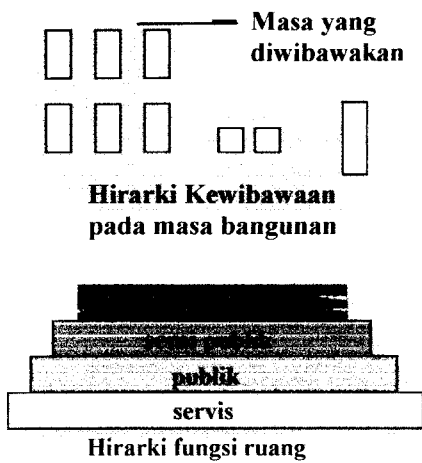
Yaitu penerapan komposisi pada lay out ruang dimana kewibawaan diterapkan pada ruang-ruang utama dengan peninggian lantai seperti pada ruang pimpinan, ruang sidang, ruang sidang paripurna, sedangkan pada bentuk bangunan kewibawaan diterapkan pada fasade utama, entrance dan ruang pengamatan selain itu kewibawaan diciptakan melalui penonjolan ornamen atau dengan bahan-bahan yang memberi kesan elegan dan penonjolan pada elemen struktur dengan bentuk bangunan yang menggunakan proporsi lebih pada besaran ruang sehingga bangunan terlihat besar dan wibawa serta perpaduan struktur yang memberi makna kuat dan kokoh.



Kewibawaan pada lay out ruang diciptakan dengan peninggian lantai dan proporsi besaran ruang yaitu 5 : 3 untuk lebar-tinggi

2. Hirarki

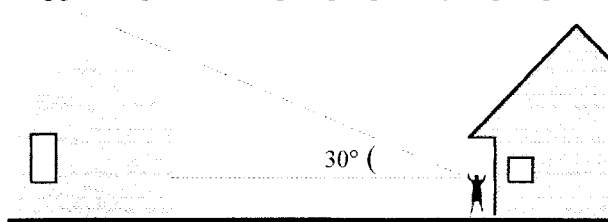
Hirarki diciptakan melalui tata masa yang memberi arah memusat pada fungsi utama, hal ini akan menghadirkan kesan mewibawakan masa yang dipusatkan atau diintikan. Selain itu juga dapat diciptakan melalui lay out ruang dan sirkulasi yang dihadirkan dengan mempertinggi lantai pada fungsi utama ruang dan memberikan ketinggian atau besaran pada sirkulasi-sirkulasi utama.



Masa dengan hirarki kewibawaan tertinggi diterapkan pada masa bangunan untuk anggota dewan Legislatif, sedangkan sirkulasi dengan hirarki tertinggi diterapkan pada sirkulasi utama yang menghubungkan antar fungsi ruang, lay out ruang dengan hirarki tertinggi diterapkan pada ruang sidang risalah.

3. Skala

Skala diciptakan melalui tata masa dan bentuk bangunan yang sesuai dengan lebar dan tinggi bangunan dengan proporsi yang dapat membentuk kesan wibawa.



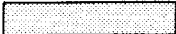

Skala jarak antar masa disesuaikan dengan jarak pandang dari masa lainnya sehingga kewibawaan dari masa yang terlihat menghasilkan objek bangunan yang terlihat secara utuh dari bangunan didepannya.

3.3.3 Analisa Kontektual Bangunan pada Arsitektur Tradisional

Tabel 3.12 Dasar Penentu pada Kontektual Bangunan Tradisional

Faktor penentu	Tata masa	Lay out ruang	Bentuk bangunan	Sirkulasi
Simbolisasi				
Pemaknaan				

Keterangan :

-  : berhubungan
-  : tidak berhubungan

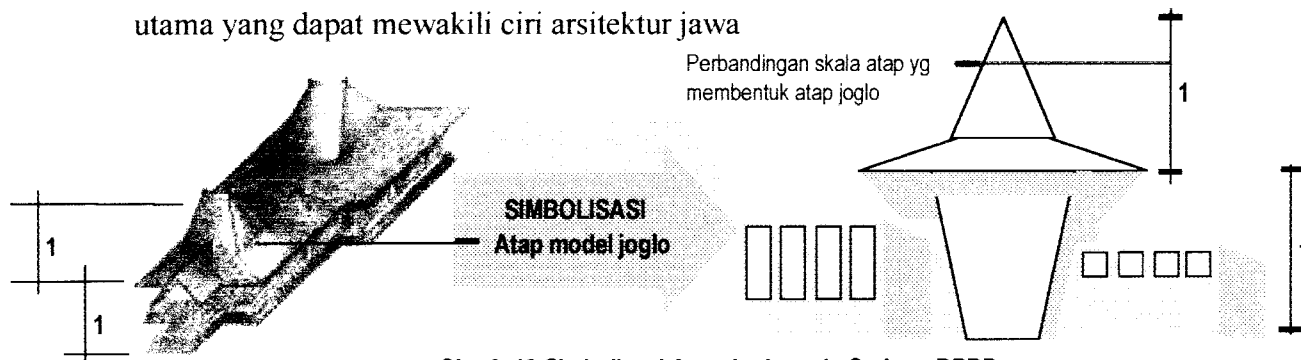
Dalam menentukan kontekstual bangunan Gedung DPRD Kulon Progo pada arsitektur tradisional dapat dicapai melalui :

1. Simbolisasi

Penerapan simbolisasi bertujuan untuk memberikan imej bangunan yang kontekstual terhadap arsitektur tradisional pada publik diluar bangunan sehingga identitas lokasi bangunan dapat terbaca oleh publik

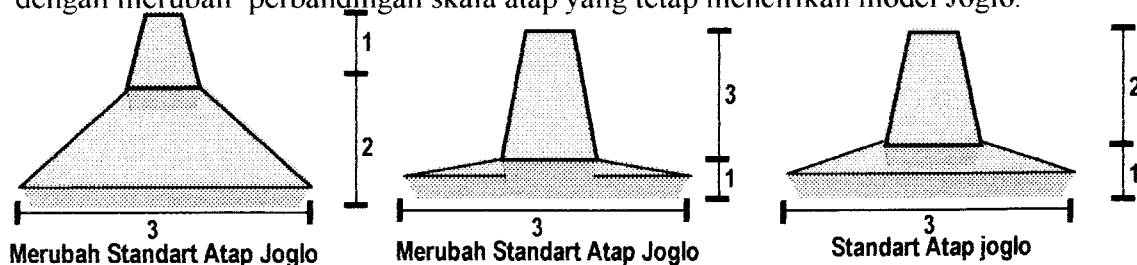
Simbolisasi bangunan diterapkan dengan metode Preseden pada bentuk bangunan misalnya menerapkan model atap joglo pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo sebagai ciri utama bangunan tradisional Jawa khususnya daerah Kulon Progo.

pada lay out ruang penerapan dilakukan dengan meletakkan ornamen-ornamen khas arsitektur jawa pada ruang dalam dan luar bangunan, serta menyimbolkan ciri khas utama yang dapat mewakili ciri arsitektur jawa



Gbr. 3. 19 Simbolisasi Atap Joglo pada Gedung DPRD

Simbolisasi bentuk bangunan tradisional dilakukan dengan menerapkan atap model Joglo pada masa bangunan, untuk memperlihatkan atap Joglo sebagai objek utama maka perletakkannya diterapkan pada masa pengontras agar menjadi objek pandang dengan merubah perbandingan skala atap yang tetap mencirikan model Joglo.

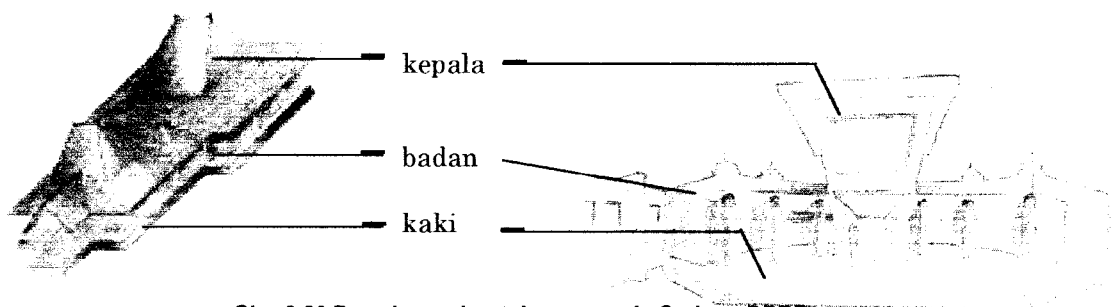


Simbolisasi ornamen-ornamen khas arsitektur Jawa diterapkan pada ruang-ruang utama yaitu pada ruang Sidang Paripurna, ruang Sidang Risaiah, dan Lobby.

2. Pemaknaan

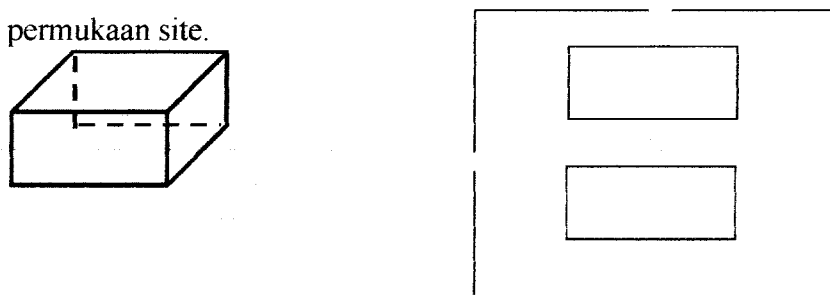
Pemaknaan diterapkan dengan analogi yang kontekstual arsitektur tradisional pada pengguna didalam bangunan sehingga identitas bangunan tetap dirasakan dalam bangunan oleh pengguna atau publik.

Pemaknaan diterapkan pada tata masa, sirkulasi dan lay out ruang yaitu menerapkan makna keseimbangan hidup seperti tubuh manusia sebagai proses organik yang ditransformasikan dalam masa-masa bangunan, hal ini juga tercermin dalam pemaknaan arsitektur Jawa antara lain bangunan terdiri dari kepala, badan dan kaki serta keseimbangan simetris pada masa bangunan yang diciptakan dengan meletakkan masa bangunan pada sumbu pemotong sebagai sumbu simetris yang diterapkan dalam bentuk sirkulasi utama serta penerapan pencapaian secara langsung seperti pada tata sirkulasi arsitektur Jawa.



Gbr. 3.20 Pemaknaan bentuk masa pada Gedung DPRD

Untuk mempertegas makna pada bentuk masa maka dalam penerapan makna kepala dipertegas dengan penggunaan atap Joglo, pada penerapan badan diterapkan pada lingkup masa bangunan sedangkan penerapan kaki dipertegas dengan mempertinggi lantai dari dasar permukaan site.

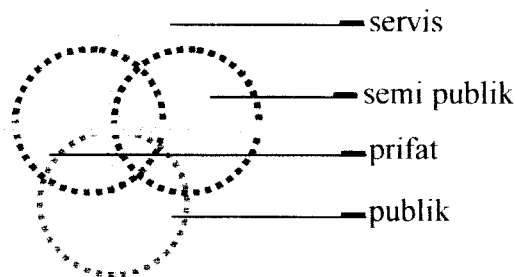


Gbr. 3.21 Sirkulasi sebagai Garis Keseimbangan Masa

Untuk mempertegas garis keseimbangan maka garis tersebut diterapkan kedalam sirkulasi utama yang membagi masa menjadi dua masa simetris atau berupa pencerminan dua masa dengan sirkulasi sebagai garis pencerminan.

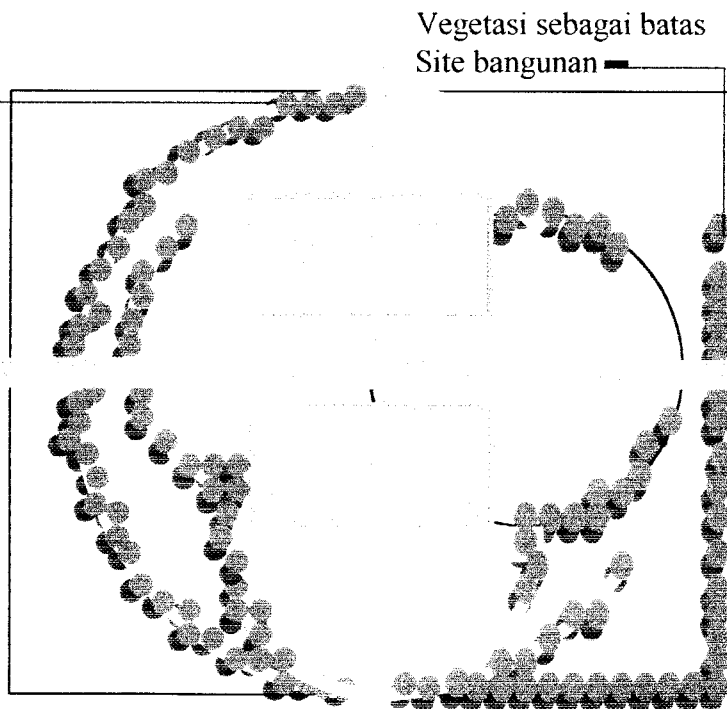
Pada lay out ruang pemaknaan diterapkan pada ruang-ruang yang mewadahi fungsi publik dari transformasi ruang pendopo ke ruang sidang paripurna dan hall, ruang inti senthong tengah ke ruang sidang risalah dan pringgitan sebagai ruang pertemuan khusus ditransformasikan dalam ruang penyampaian pendapat.

Penerapan makna lainnya pada ruang luar adalah dengan menerapkan batas ruang site dengan menggunakan unsur alam seperti vegetasi sebagai batas ruang fungsi dan site.



Vegetasi dan sirkulasi sebagai batas area fungsi ruang

Sirkulasi dicapai secara langsung seperti pada bangunan Joglo yang menempatkan pintu regol tepat didepan bangunan yang sejajar dengan sumbu simetris bangunan yang ditekankan pada kesejajaran ruang pencapaian dengan kuncung bangunan sebagai



Gbr. 3.22 Vegetasi sebagai Batas Area

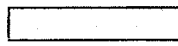

C. ANALISIS DASAR PERANCANGAN

3.4 Analisa Dasar Perancangan Bangunan

Tabel 3.13 Pendekatan Dasar Perancangan dengan Penampilan Bangunan

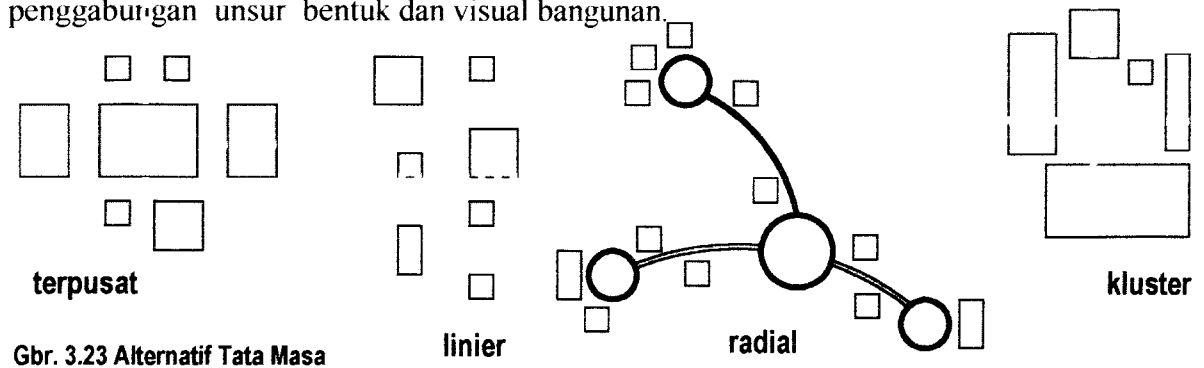
Dasar perancangan / Penampilan bangunan	Tata masa	Tata ruang	sirkulasi	Orientasi
Bentuk				
Fasade				
Material				
Visual				
Struktur				
Tekstur dan warna				

Keterangan :

-  : berhubungan
-  : tidak berhubungan

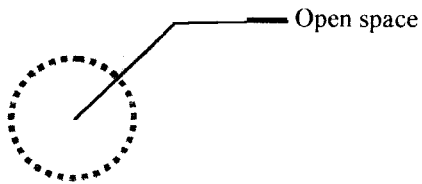
3.4.1 Tata Masa

Tata masa pada Gedung DPRD Kulon Progo adalah gubahan masa yang diterapkan dengan memadukan masa-masa bangunan yang lebih dari satu sehingga membentuk kelompok masa dalam satu bangunan kompleks yang mengarah pada aktifitas gerak pengguna. Susunan masa tersebut diterapkan secara simetris untuk memberi makna pada kontekstual bangunan tradisional, pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan dengan penggabungan unsur bentuk dan visual bangunan.



Gbr. 3.23 Alternatif Tata Masa

Dari alternatif tata masa diatas maka susunan secara kluster merupakan model terbaik untuk bangunan yang memiliki luas site terbatas. Dalam pengembangannya susunan cluster diikat dengan open space sebagai ruang gerak antar masa sehingga komposisi masa akan tetap menjadi satu kelompok bangunan.



Perletakan Open space ditentukan oleh titik temu garis keseimbangan sehingga selain berfungsi sebagai ruang gerak open space juga berfungsi sebagai stabiliser kelompok masa.

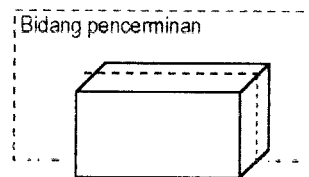
1. Bentuk

Yaitu penerapan bentuk masa yang sesuai dengan karakter keterbukaan dan kewibawaan serta kontekstual pada arsitektur tradisional setempat. Bentuk-bentuk beraturan akan memberikan kesan wibawa karena sifat kestabilan dan kekokohnya sedangkan bentuk-bentuk yang fleksibel/ tidak beraturan dan bentuk yang berkarakter terbuka akan memberikan kesan terbuka karena merespon pada pergerakan, serta simbolisasi ciri khas arsitektur tradisional setempat sebagai identitas wilayah.

Bentuk dasar :



Masa persegi memiliki stabilitas bentuk



Garis keseimbangan



Masa cekung memiliki kesan menerima

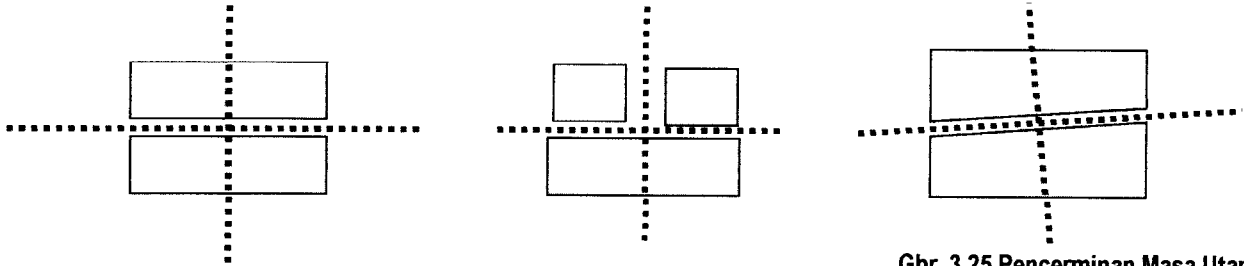


Garis keseimbangan

Gbr. 3.24 Bentuk Dasar Masa

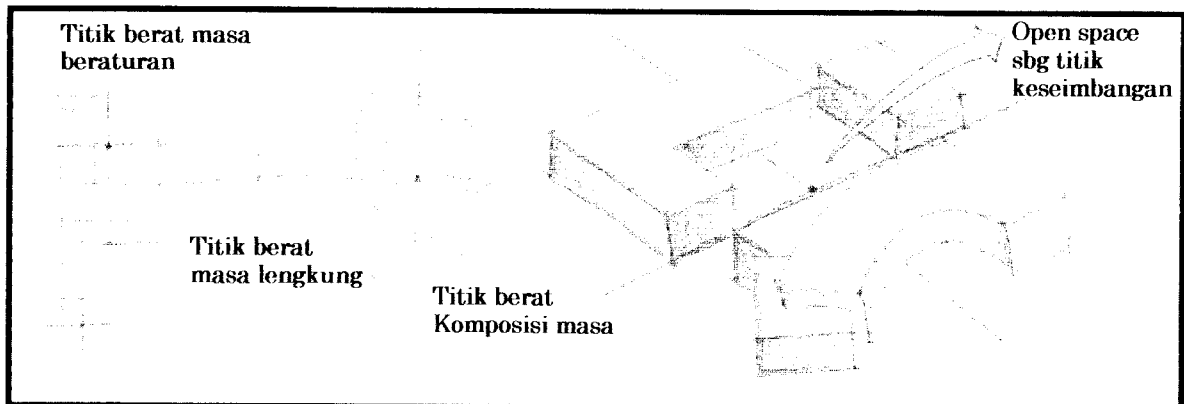
2. Visual

Pencerminan dari masa yang sejajar dengan garis keseimbangan akan memberikan visual pada masa, karena stabilitas masa sebagai bagian dari kesan kewibawaan maka hasil pencerminan juga harus masa-masa yang stabil yang terikat oleh titik dan garis keseimbangan.



Gbr. 3.25 Pencerminan Masa Utama

Dari alternatif diatas maka bentuk pencerminan masa ketiga atau penggabungannya akan memberikan nilai lebih pada visual masa karena susunan dari masa-masa tersebut memberi bentuk yang tidak kaku dan tidak monoton. Pada pengembangan susunan Omasa tersebut dapat dilakukan dengan meletakkan open space dengan bentuk lingkaran atau persegi sebagai dasar dalam pengurangan bentuk pada masa-masa yang diikat.



Gbr. 3.26 Open Space sebagai Dasar Penyesuaian Bentuk Masa

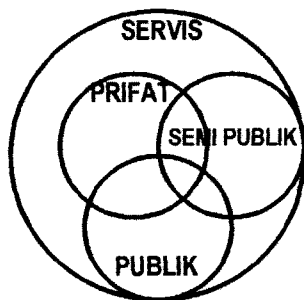
3.4.2 Tata Ruang

Tata ruang pada Gedung DPRD Kulon Progo adalah susunan ruang-ruang dalam dan luar yang dapat mencerminkan kesan terbuka, wibawa dan kontekstual pada arsitektur tradisional setempat. Pada penerapannya dilakukan dengan pendekatan pada unsur penampilan bangunan seperti bentuk, fasade, material, struktur dan tekstur.

1. Bentuk dan Material

Dalam merencanakan ruang luar, site pada bangunan dikelompokkan dalam beberapa zoning untuk memudahkan perletakan ruang-ruang yang akan direncanakan. Pada penzoningan Gedung DPRD Kulon Progo diterapkan bentuk lingkaran sebagai lingkup area fungsi ruang, penerapan bentuk lingkaran dimaksudkan untuk menghindari kesan peruangan yang monoton serta kaku pada ruang luar karena site bangunan memiliki bentuk persegi.

Untuk mempertegas ruang-ruang fungsi tersebut maka digunakan material alam berupa vegetasi yang berfungsi sebagai batas area.



Ruang Publik diletakkan didepan pintu masuk pencapaian karena untuk memudahkan aktifitas yang bersifat publik seperti demonstrasi dan sidang paripurna

Ruang Semi publik diletakkan disebelah barat karena untuk mendapatkan view dari luar sebagai bentuk identitas area.

Ruang Prifat diletakkan dibelakang ruang publik dan semi publik dimaksudkan untuk mendapatkan kenyamanan ruang sebagai wadah aktifitas kerja. kerja.

Ruang servis diletakkan melingkupi semua ruang karena ruang tersebut merupakan wadah bagi pelayanan kegiatan.

2. Fasade, Struktur, Tekstur dan Warna

Dalam merencanakan ruang dalam, pada permukaan masa bangunan serta interiornya didukung dengan penampilan fasade bangunan yang mengekspose struktur rangka sebagai pendukung kesan wibawa, sedangkan tekstur dan warna diterapkan dalam mendukung dan mempertegas susunan struktur.

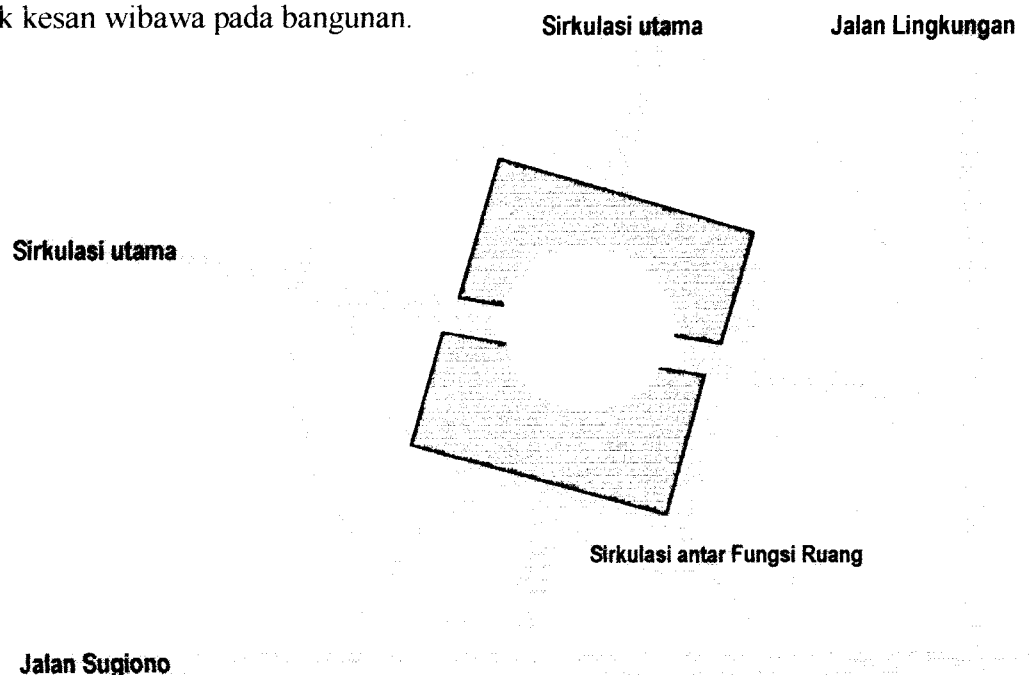
3.4.3 Sirkulasi Bangunan

Sirkulasi pada Gedung DPRD Kulon Progo merupakan wadah aktifitas gerak yang mengikat ruang satu dengan ruang lainnya. Untuk mendapatkan kesan terbuka dan wibawa pada sirkulasi ditentukan oleh unsur bentuk dan material.

1. Bentuk

Bentuk sirkulasi yang linier dan jelas/ tegas akan memberikan kesan terbuka karena mengarah pada kemudahan dalam pencapaian dan tidak memberi kesan yang tersamar.

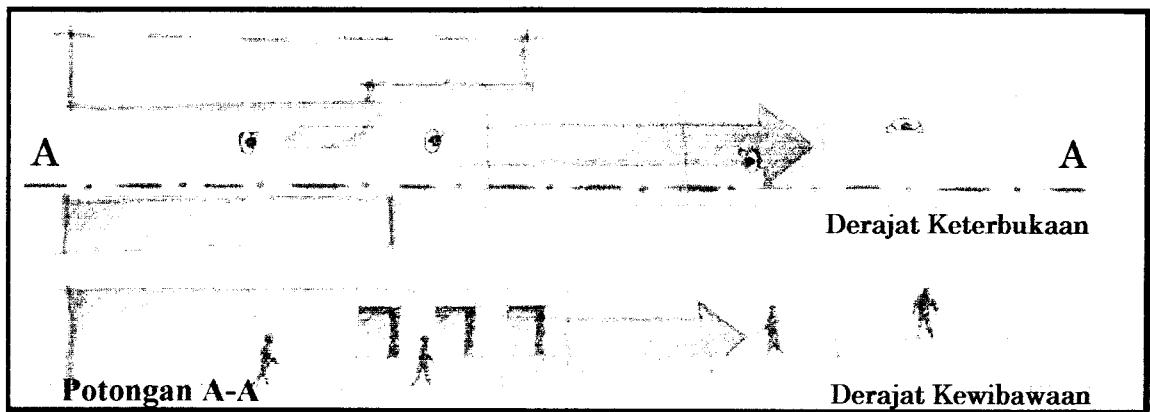
Bentuk yang mempertinggi lantai sirkulasi dengan ruang-ruang yang besar akan memunculkan kesan wibawa pada sirkulasi tersebut, hal ini sesuai dengan unsur-unsur pembentuk kesan wibawa pada bangunan.



Gbr. 3.27 Kelompok Sirkulasi

2. Material

Material pada penutup/ lingkup alur sirkulasi yang tidak padat akan memberikan kesan terbuka karena menciptakan respon interaksi pada pengguna didalamnya dengan pengguna lain diluar ruang sirkulasi.



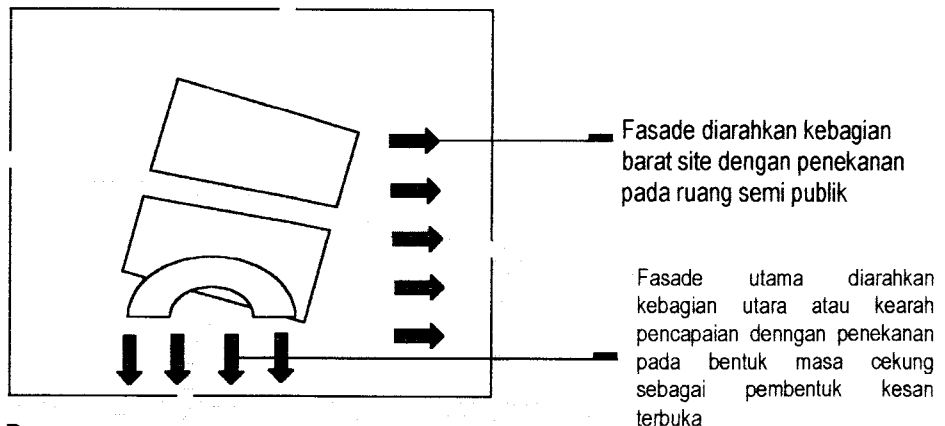
Gbr 3.28 Derajat Sirkulasi

3.4.4 Orientasi Bangunan

Orientasi atau arah hadap bangunan terhadap angin, sinar matahari dan view pada Gedung DPRD Kulon Progo dalam membentuk kesan terbuka dan wibawa ditentukan oleh unsur bentuk dan fasade bangunan, yaitu :

1. Bentuk

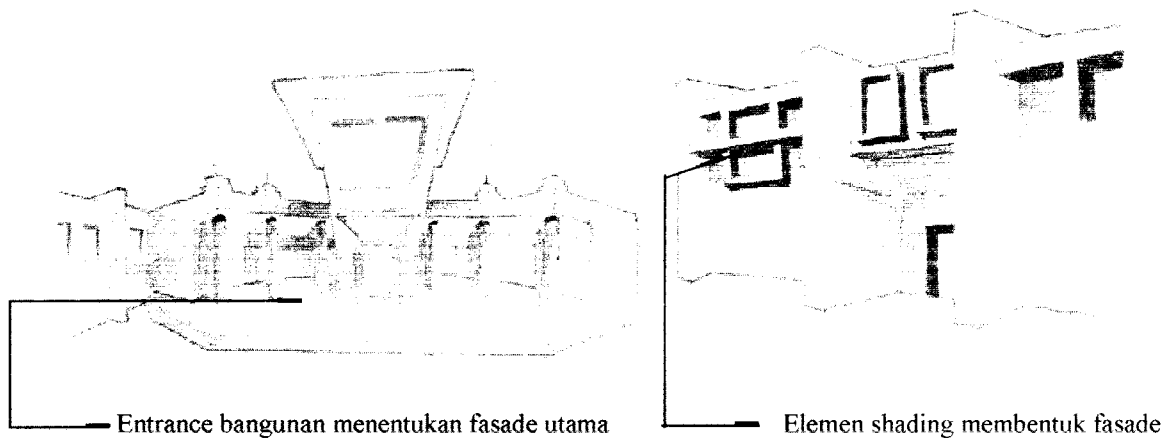
Bentuk masa cekung diarahkan kearah utara atau pada arah pencapaian masuk karena bentuk cekung merupakan unkanan visual bangunan dalam memberi kesan mengundang dan terbuka, sedangkan arah orientasi fasade yang lain diarahkan ke bagian barat.



Gbr. 3.29 Arah Fasade Bangunan

2. Fasade

Bentuk-bentuk yang merespon arah orientasi seperti masa cekung atau bukaan-bukaan yang mengarahkan arus angin dan elemen-elemen penghalang sinar matahari secara langsung akan membentuk fasade yang diatur dengan mempertegas bentuk bukaan pada elemen luar bangunan yang akan membantu ungkapan kesan terbuka pada bangunan. Perpaduan ornamen pada bidang yang ditekankan akan memberikan kesan Wibawa karena menghadirkan susunan-susunan elemen yang elegan dan indah.



Gbr. 3.30 Orientasi Fasade Bangunan

3.5 Analisa Pendekatan Bangunan

3.5.1 Pendekatan Struktur

Dalam merencanakan sistem struktur yang digunakan harus mempunyai kekuatan penyangga beban juga harus bisa mendukung proses kegiatan yang berlangsung didalamnya. Oleh sebab itu struktur yang dipakai adalah struktur rangka dengan konstruksi beton bertulang, hal ini disesuaikan dengan keadaan beban bangunan yang harus diterima dan fungsi peruangannya sebagai bangunan perkantoran.

Pada dasarnya rencana bangunan Gedung DPRD Kulon Progo bukan merupakan bangunan lantai banyak hal ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Wates dengan batas tinggi

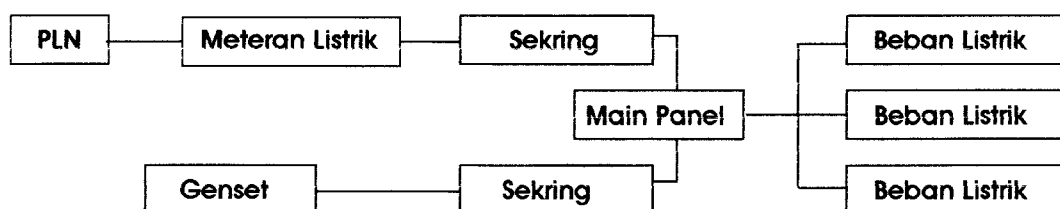
bangunan adalah 12 meter atau dua lantai, rencana peruangan Gedung DPRD membutuhkan kelompok ruang yang padat sebagai respon kebutuhan akan fungsi bangunan sebagai bangunan perkantoran yang membutuhkan banyak ruang dengan hubungan ruang yang erat, disamping itu ditinjau dari kebutuhan besaran ruang pada bangunan ini juga tidak membutuhkan ruang bentang lebar. Maka dengan struktur rangka selain baik dalam merespon beban dan gaya juga akan menghasilkan ruang-ruang dari susunan kolom dan balok yang posisinya lebih fleksibel karena harus dapat diterapkan dengan pola-pola tertentu sesuai dengan kebutuhan ruang atas fungsi.

3.5.2 Pendekatan Sistem Utilitas

Sistem utilitas yang akan dibahas adalah mengenai sistem jaringan listrik, sistem penghawaan, sistem komunikasi, sistem pemadam kebakaran dan sistem air bersih dan air kotor.

1. Sistem Jaringan Listrik

Secara umum sistem jaringan listrik memiliki dua sumber utama yaitu PLN dan sumber listrik dari Genset. Jaringan listrik pada Gedung DPRD Kulon Progo ini menggunakan dua sumber listrik dengan sumber utama diambil dari PLN dan sumber cadangan diambil dari Genset.



Gbr. 3.31 Bagan Pendistribusian Listrik

Pertimbangan diatas disesuaikan dengan fungsi listrik pada bangunan perkantoran yang penggunaannya dominan pada siang hari. Pemilihan PLN sebagai sumber utama dilakukan atas dasar kemudahan dalam memperoleh sumber dan mudah dalam

perawatan, genset sendiri difungsikan untuk mengantisipasi adanya gangguan pada sumber PLN pada waktu berjalannya kegiatan yang memerlukan listrik penuh sebagai prasarana pendukung, misalnya pada saat sidang paripurna.

2. Sistem Penghawaan

Sistem penghawaan yang akan diterapkan dalam bangunan Gedung DPRD kulon Progo adalah :

a. Penghawaan Alami

Pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo penghawaan alami menjadi system penghawaan utama, hal ini diterapkan karena pada bangunan tersebut merupakan bangunan berlantai rendah dan menggunakan susunan ruang-ruang yang lebar dan tinggi sehingga udara alami yang masuk akan lebih stabil dalam ketinggian bangunan yang rendah dan dengan ruang-ruang yang besar sirkulasi udara akan lebih optimal, disamping itu bukaan-bukaan yang dioptimalkan akan sangat membantu proses sirkulasi dari luar kedalam bangunan.

Dasar dari pertimbangan penghawaan alami adalah :

- Menghindari udara langsung
- Aliran udara silang.

Dari dasar pertimbangan diatas maka penghawaan alami dicapai dengan pengaturan dimensi dan posisi bukaan yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk pencahayaan alami, selain itu juga penempatan tanaman sebagai penyaring dan pengarah udara.

b. Penghawaan Buatan

Penghawaan buatan diterapkan pada ruang-ruang publik yang membutuhkan suplai udara tambahan serta pengaturan kelembaban dan suhu pada ruang-ruang tertentu karena kepadatan penggunanya. Hal ini diterapkan dalam tujuan mendapatkan kenyamanan pada pemakai di dalam ruang, seperti pada ruang sidang.

3. Sistem Komunikasi

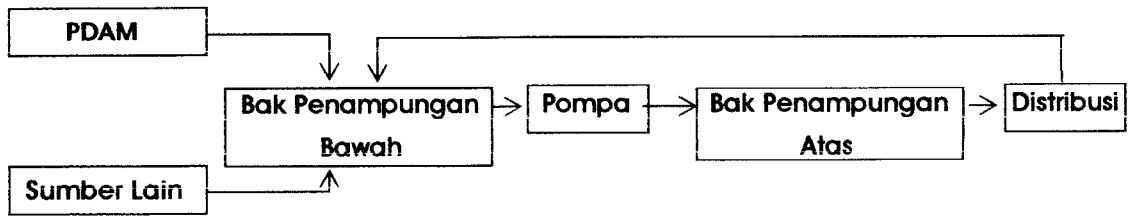
Penggunaan system komunikasi untuk kebutuhan keluar secara otomatis menggunakan system PABX (*Private Automatic Branch Exchange*), dimana system ini pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo ditempatkan pada ruang lobby dan informasi, ruang pengelola dan ruang petugas penerima tamu. Pada ruang Sidang Paripurna dan Hall dipasang speaker (pengeras suara) sebagai kepentingan informasi jarak jauh dengan sistim komunikasi diatur oleh operator pada ruang teknis, sedangkan pada ruang sidang lainnya sistim informasi diatur secara manual.

4. Sistem Pemadam Kebakaran

Sistem jaringan alat pemadam kebakaran menggunakan sistim manual dengan alat pemadam berupa tabung gas halon atau gas CO₂. hal ini diterapkan karena bangunan Gedung DPRD Kulon Progo bukan merupakan Bangunan Tinggi dengan jangkauan dekat, sehingga tidak perlu diterapkan alat-alat pemadam otomatis seperti hydrant, springkler atau hoserack selain itu juga akan menekan biaya pemasangan dan perawatan. Penyediaan jaringan alat-alat pemadam kebakaran ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan mudah dijangkau dalam keadaan darurat yaitu pada ruang-ruang publik dan ruang-ruang yang memiliki prasarana/ kelengkapan alat kantor yang mudah terbakar, seperti pada ruang-ruang sidang, ruang perpustakaan dan dokumentasi, ruang arsip, ruang teknis dan ruang parkir dalam.

5. Sistem Jaringan Air Bersih

Penyediaan air bersih dicapai melalui dua sumber yaitu sumber yang berasal dari PDAM dan sumber yang berasal dari Air Pompa, dari kedua sumber tersebut ditampung pada bak penampungan air dan kemudian didistribusikan melalui tabung tower air kedaerah pendistribusian seperti Ivatori, cafeteria, KM/WC, mushola dan ruang-ruang lain yang membutuhkan.



Gbr 3. 32 Bagan Distribusi Air Bersih

6. Sistem Jaringan Air Kotor

Sistem jaringan air kotor merupakan penampungan air-air buangan atau limbah dari lavatori dan KM/WC berupa air kotor dan limbah padat, mushola berupa air kotor, dapur dan kafetaria berupa air kotor dan limbah lemak ditampung pada bak kontrol yang kemudian diteruskan ke septiktang dan disalurkan ke sistem drainasi kota yang terlebih dahulu diproses melalui treatment, dan apabila letak pipa drainase kota lebih tinggi dari treatment maka pembuangan dilakukan dengan bantuan pompa yang bekerja secara otomatis.

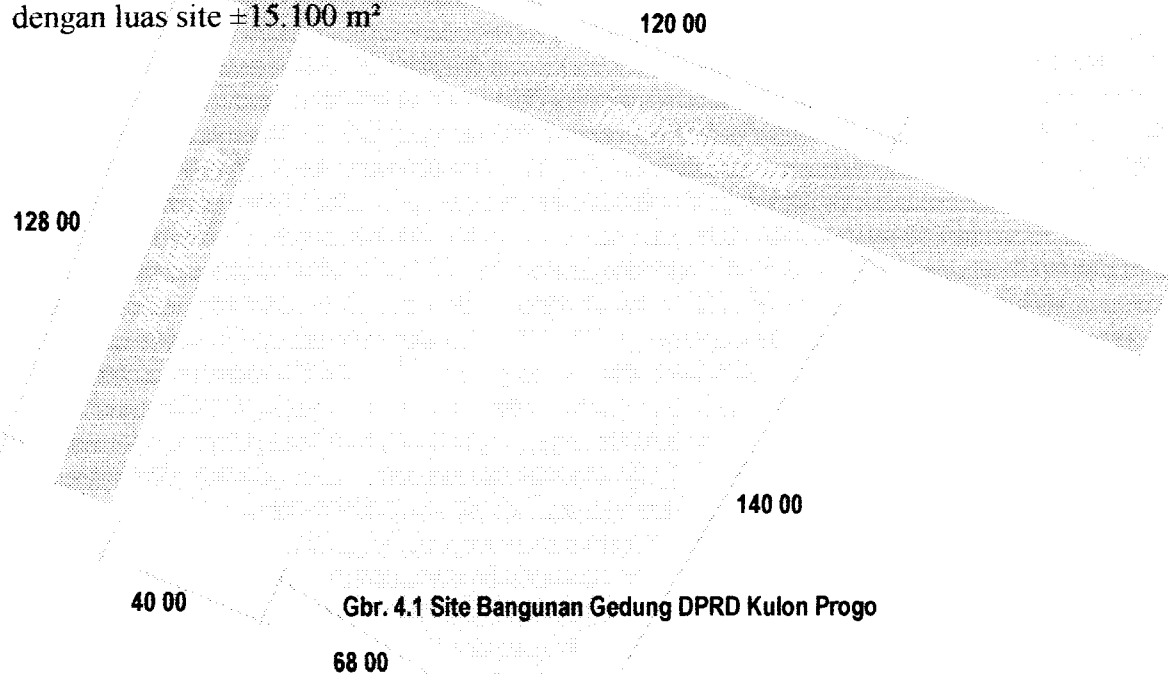
BAB IV

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

4.1 Konsep Dasar Perencanaan

4.1.1 Konsep Penentuan Site

Konsep penentuan site Gedung DPRD Kulon Progo disesuaikan dengan karakter lokasi yang merupakan pusat pengembangan kawasan perkantoran di pusat kota administrasi kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka site yang terpilih berada di samping jalan Sugiono tepatnya disebelah selatan jalan dilingkungan area perkantoran dengan luas site $\pm 15.100 \text{ m}^2$



4.2 Konsep Dasar Perancangan

4.2.1 Konsep Kebutuhan Ruang dan Organisasi Ruang

4.2.1.1 Konsep Kebutuhan Ruang

Konsep Kebutuhan ruang Gedung DPRD Kulon Progo didasarkan pada kelompok fungsi pengguna yaitu fungsi publik, semi publik, prifat dan servis dengan pembagian pada

kelompok pengguna yang terdiri dari anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD yang dikelompokkan menjadi satu kelompok menurut fungsi kegunaan.

Adapun kebutuhan dan besaran ruang ditentukan berdasarkan :

1. Kegiatan yang diwadahi
2. Jumlah pemakai
3. Besaran ruang

Tabel 4.1 Kebutuhan Ruang Publik

Kebutuhan Ruang	Unit	Kapasitas	Besaran Ruang (m ²)
R. Sidang Paripurna	1	200 orang	312,5
Hall	1	260 orang	487,5
Parkir			
Parkir dalam	1	80 motor, 40 mobil	720
Parkir luar	1	150 mtr, 60 mbl, 3 bis	1360,8
Lobby/ R. Informasi	1	150 orang	209
R. Peny. Pendapat	1	50 orang	150
Taman	Menyesuaikan	-	-

Tabel 4.2 Kebutuhan Ruang Semi Publik

Kebutuhan Ruang	Unit	Kapasitas	Besaran Ruang (m ²)
R. Transit	1	12 orang	36
R. Sidang Fraksi	1	@ 12 orang	72
R. Sidang Risalah	1	14 orang	42
R. Sidang Komisi	1	@ 12 orang	72
R. Tamu	4	@ 5 orang	50
R. Pers	2	@ 5 orang	37,5
Gasrasi	5	@ 1 mobil	60

Tabel 4.3 Kebutuhan Ruang Privat

Kebutuhan Ruang	Unit	Kapasitas	Besaran Ruang (m²)
R. Ketua Dewan	1	1 orang	30
R. Wakil Ketua	3	@ 1 orang	60
R. Komisi	5	@ 7 orang	280
R. Fraksi	7	@ 5 orang	280
R. Arsip	1	1 orang	16
R. Sekretaris	1	1 orang	25
R. Kepala Bagian	3	@ 1 orang	45
R. Kepala Sub. Bagian	6	@ 1 orang	72
R. Karyawan	3	@ 4 orang	72
R. Staff	6	@ 5 orang	180
R. Risalah	1	2 orang	16

Tabel 4.4 Kebutuhan Ruang Servis

Kebutuhan Ruang	Unit	Kapasitas	Besaran Ruang (m²)
Lavatory	9	3 orang	111
KM/WC	2	1 orang	30
Lapangan O. R	1	-	-
Mushola	1	200 orang	130
Perpustakaan	1	2 Petugas	79
Perbukuan	1	12 orang	
R. Baca	1	12 orang	
Cafeteria	1	20 orang	140
Dapur	1	3 orang	24

Luas total bangunan Gedung DPRD Kulon Progo dengan sirkulasi adalah **6209,36 m²**, maka, kebutuhan lantai atas luas bangunan :

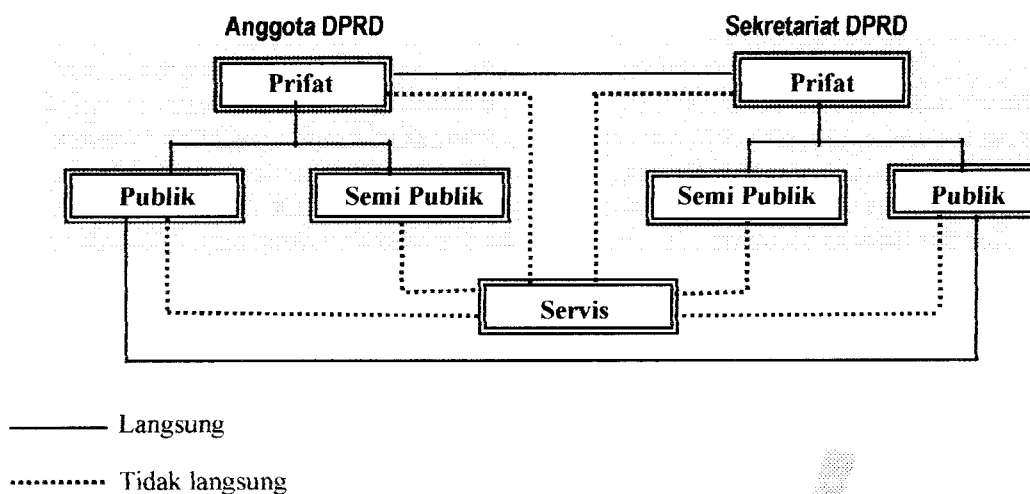
KDB (40%) : 6073,6 m².

Luas parkir luar : 1360,8 m²

Luas kebutuhan ruang : 4848,56 m².

Maka Gedung DPRD Kulon Progo dapat dibangun dengan 2 lantai dengan luas bangunan dasar maksimal 6073,6 m² dan luas sisa 136,76m², dengan pertimbangan pemanfaatan lahan maka perencanaan bangunan dimaksimalkan pada semua lantai dengan sisa lahan sebagai area pengembangan bangunan.

4.2.1.2 Konsep Hubungan Ruang



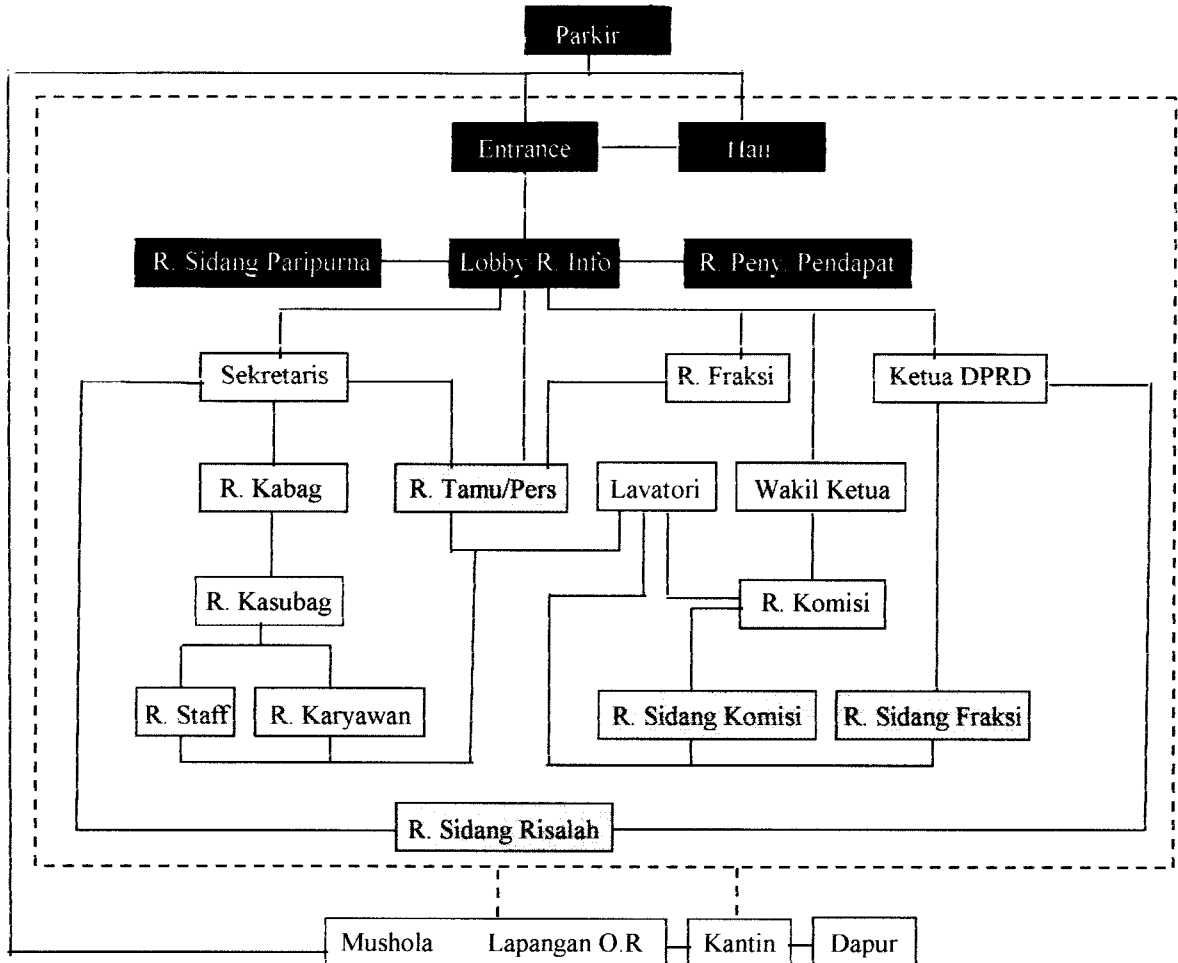
Gbr 4.2 Bagan Hubungan Ruang

Masa Bangunan untuk Kelompok
Sekretariat DPRD

Masa Bangunan untuk Kelompok
Anggota DPRD

Gbr. 4.3 Pembagian Kelompok Masa

4.2.1.3 Konsep Organisasi Ruang



Gbr. 4.4 Bagan Organisasi Ruang

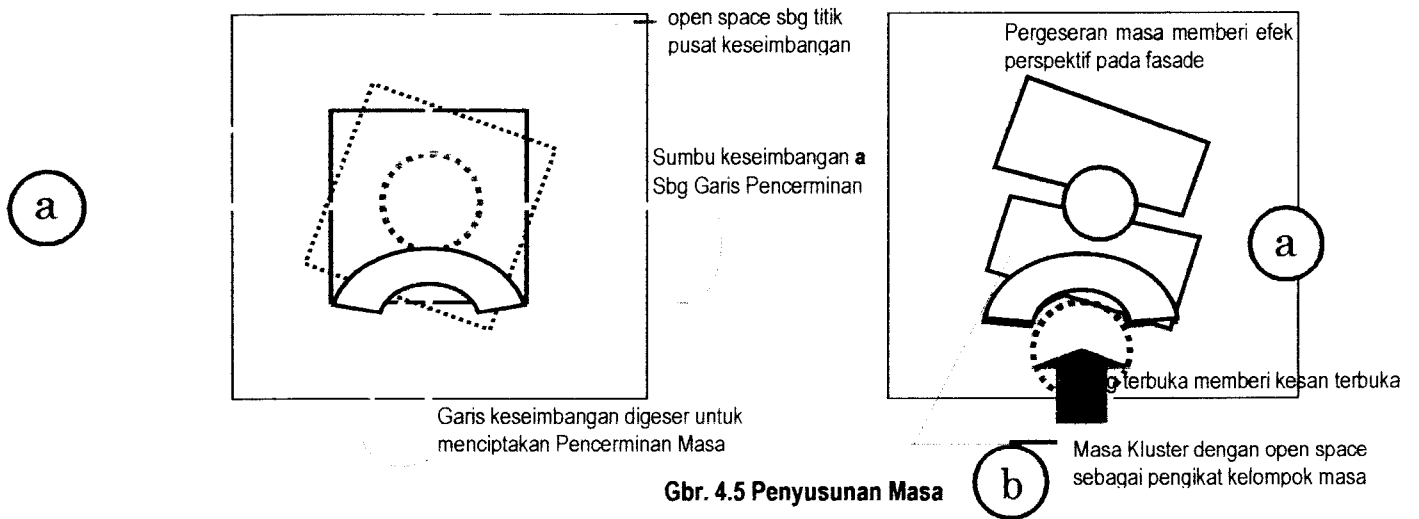
4.2.2 Konsep Perletakan Tata Masa

Konsep tata masa yang dapat mengungkapkan kesan keterbukaan dan kewibawaan serta kontekstual dengan arsitektur tradisional diciptakan melalui :

1. Penyusunan Masa secara Kluster

Bentuk komposisi dasar masa terdiri dari kelompok susunan masa kluster yang terbentuk dari hasil pencerminan masa pada garis keseimbangan serta masa cekung

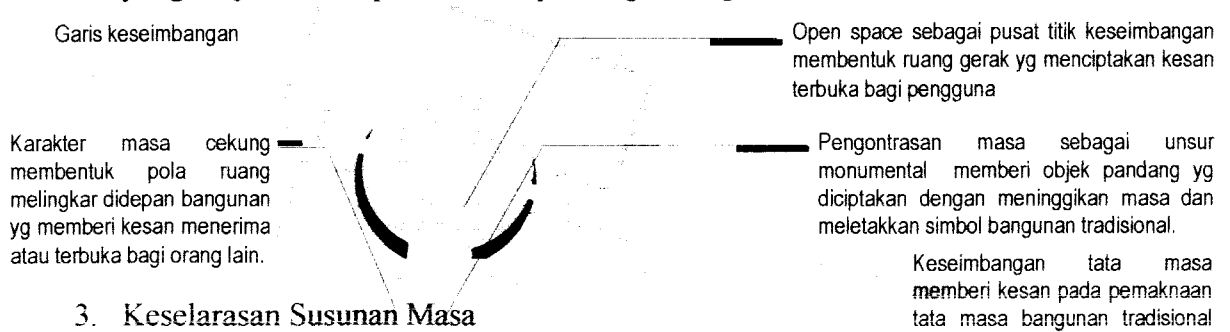
yang dikem**(b)**an dengan penambahan dan pengurangan bentuk yang dipengaruhi oleh open space dan bentuk ruang fungsi. Tata masa disusun pada persilangan garis keseimbangan yang terikat menjadi satu kelompok oleh open space sebagai pengikat masa secara *berkelompok* atau *kluster*.



Gbr. 4.5 Penyusunan Masa

2. Perletakan pada Keseimbangan Masa

Keseimbangan dicapai dengan menyusun perletakan masa utama secara simetris bilateral pada dua sumbu keseimbangan. Pertemuan kedua sumbu pada titik keseimbangan ditegaskan dengan membentuk ruang open space berbentuk lingkaran yang menyesuaikan pada bentuk peruangan fungsi.

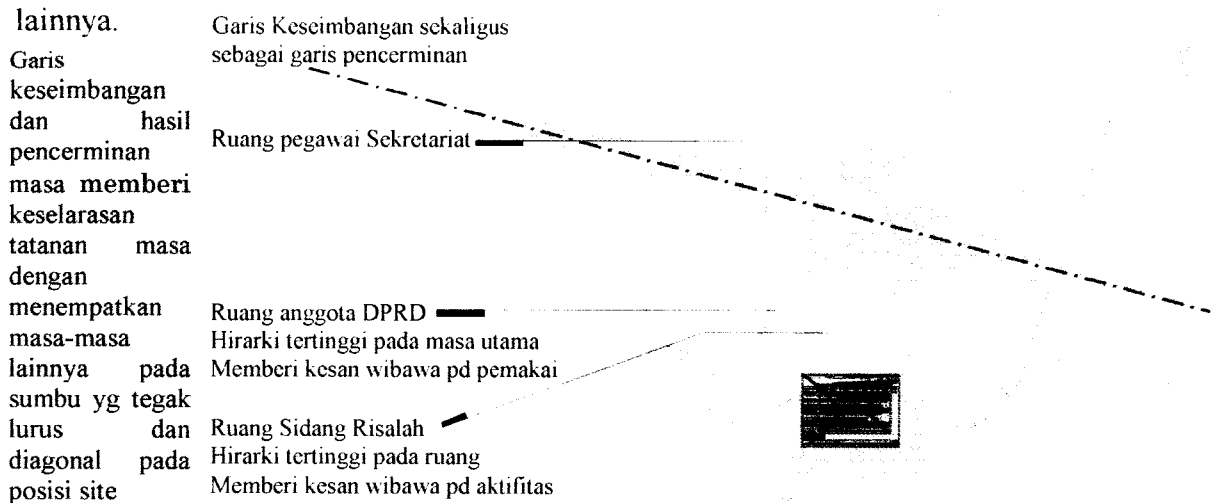


3. Keselarasan Susunan Masa

Gbr. 4.6 Perletakan Masa Joglo

Keselarasan tata masa dalam menciptakan kesatuan bangunan yang utuh dicapai dengan memadukan tata masa utama melalui perpaduan bentuk yang hampir sama atau selaras pada lingkup kesatuan bangunan yang diikat oleh open space dan garis

keseimbangan yang dipadukan dengan bentuk-bentuk masa pengontras untuk menghilangkan kesan monoton. Dalam mempertegas masa pengontras dicapai dengan menerapkan masa vertikal diantara gubahan masa-masa horisontal serta memberikan visual yang berbeda pada masa pengontras dengan meletakkan simbol bangunan tradisional berupa atap Joglo yang kontras dengan visual masa-masa



Gbr. 4.7 Keselarasan Susunan Masa

4.2.3 Konsep Penataan Ruang Luar

Konsep tata ruang luar pada Gedung DPRD Kulon Progo bertujuan untuk memperoleh keterpaduan antara massa bangunan dan site yang dipengaruhi oleh :

1. Penzoningan

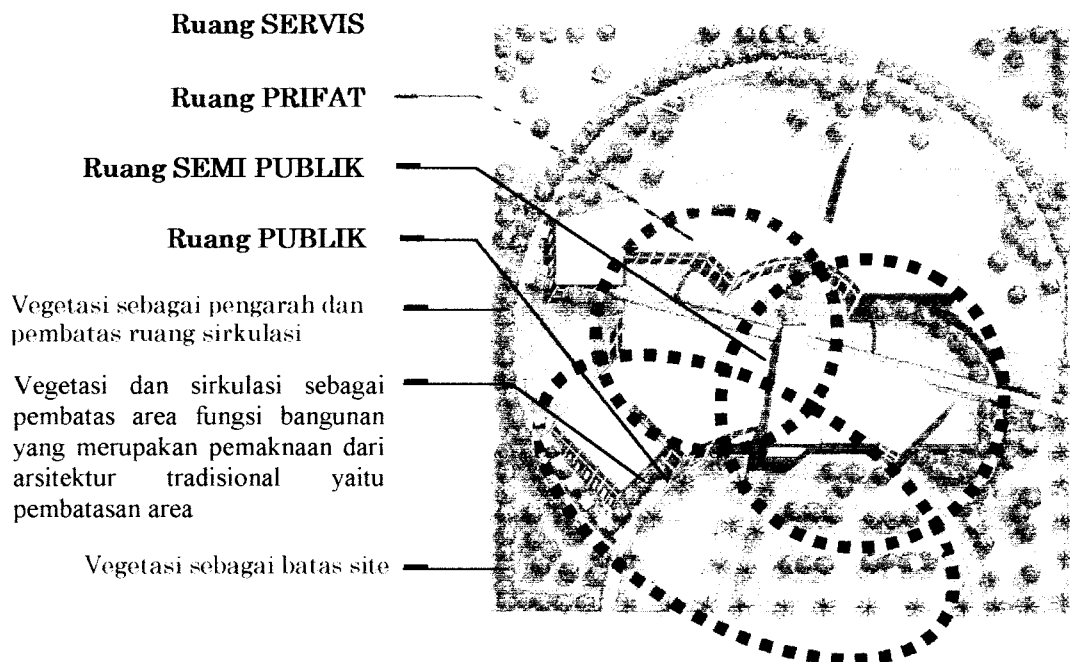
Penzoningan pada site didasarkan pada kelompok kegiatan, antara lain :

- a. Kegiatan publik yang terdiri dari kegiatan demonstrasi, sidang paripurna, parkir, informasi, dan kegiatan pada area taman.
- b. Kegiatan semi publik yang terdiri dari kegiatan sidang (fraksi, komisi, risalah), kegiatan pertemuan meliputi penerimaan tamu dan pers serta kunjungan (pada ruang transit, dengan ruang pendukung seperti garasi)

- c. Kegiatan privat seperti aktifitas rutin pada ruang-ruang kerja.
- d. Kegiatan servis yang mendukung kegiatan lainnya.

4.2.4 Konsep Penataan Lanscape

- 1. Pemilihan jenis vegetasi yang dapat mendukung kesan terbuka dan wibawa.
- 2. Penataan vegetasi sebagai pengarah alur sirkulasi luar.
- 3. Penataan vegetasi sebagai pembatas area yang melokasikan fungsi ruang luar.



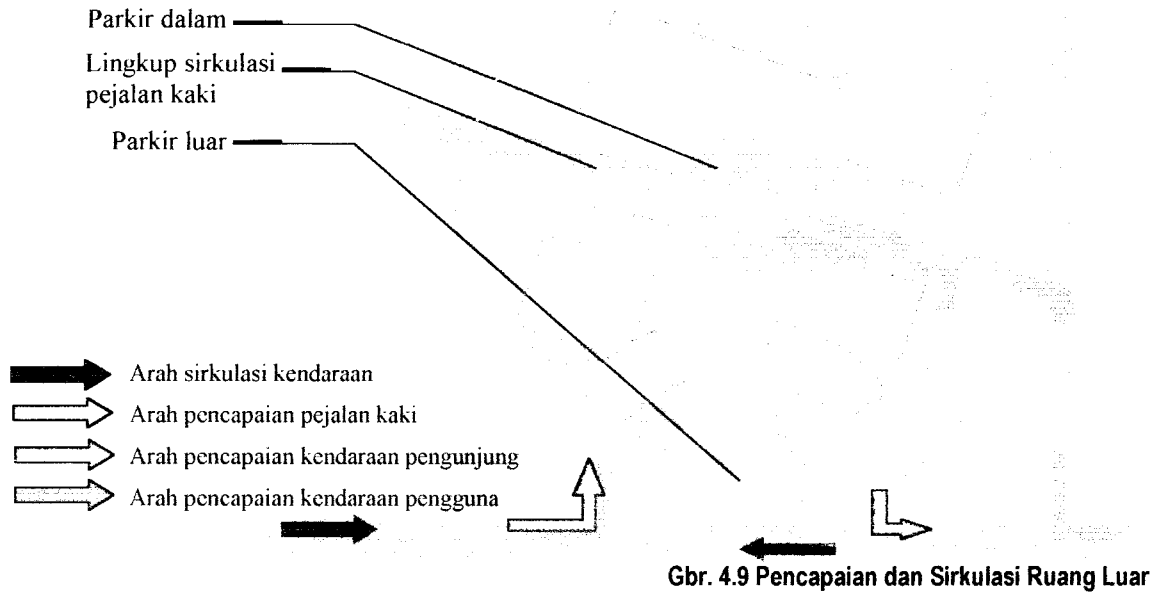
Gbr. 4.8 Penzoningan dan Penataan Lanscape

- 2. Penataan sirkulasi ruang luar dan pencapaian ke bangunan.

Sirkulasi diluar bangunan meliputi sirkulasi kendaraan pengunjung (masyarakat dan pers), kendaraan pengguna (anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD).

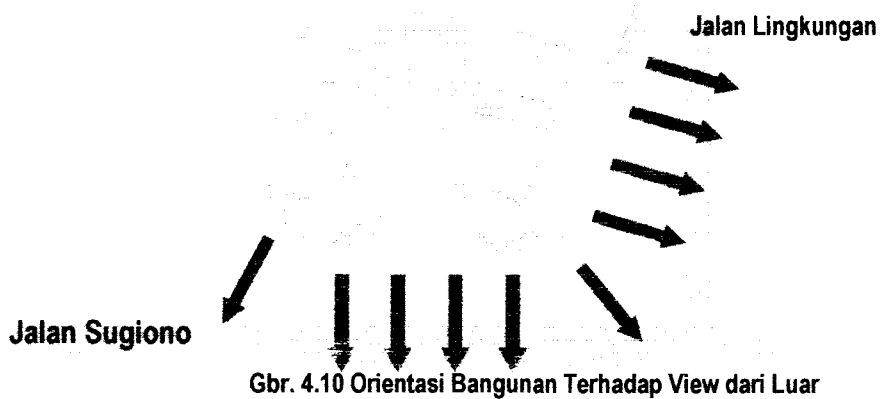
- a. Entrance untuk kendaraan (masuk) dan pintu keluar kendaraan disearahkan dengan arah sirkulasi kendaraan pada jalan utama.
- b. Sirkulasi dibedakan menjadi dua, yaitu sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.

- c. Akses kendaraan dibedakan menjadi dua yaitu akses pengunjung/ tamu diarahkan ke area parkir luar sedangkan bagi pengguna diarahkan ke area parkir dalam.
- d. Pencapaian menggunakan konsep sirkulasi secara langsung untuk memudahkan akses sirkulasi dan memperlancar proses kegiatan.

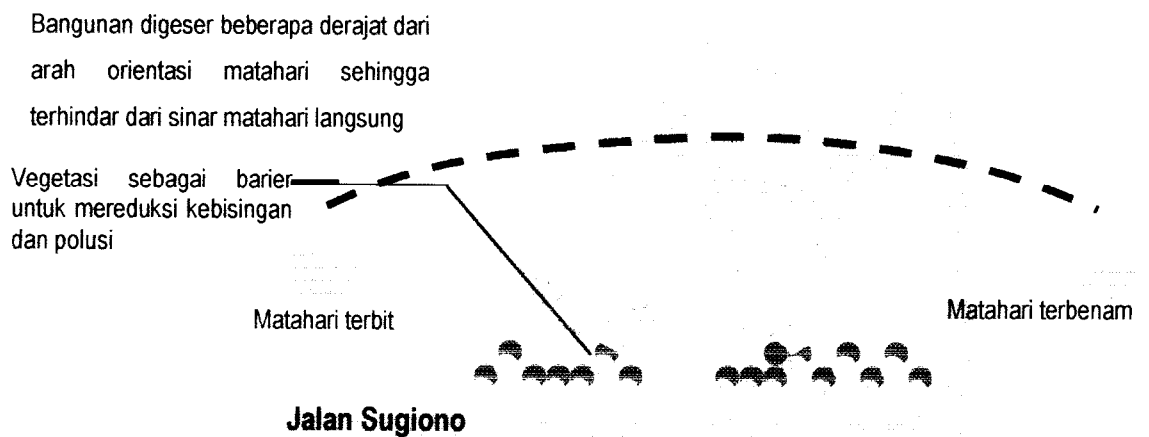


3. Penempatan arah orientasi dan tata letak bangunan

- a. Bangunan diarahkan ke arah jalan Sugiono (arah utara) dan ke arah jalan lingkungan (arah barat) untuk memudahkan publik untuk bangunan secara keseluruhan.



- b. Bukaan bangunan diarahkan kesemua sisi bangunan untuk memaksimalkan sirkulasi udara dalam ruang, serta memaksimalkan bukaan pada sisi utara-selatan yang dimaksudkan untuk menghindari cahaya langsung dari matahari yang menimbulkan silau.
- c. Bangunan ditempatkan sejauh mungkin dari kebisingan jalan dan polusi udara disekitar jalan Sugiono dengan memaksimalkan area sepanjang garis sempadan untuk parkir dan penataan vegetasi sebagai peneduh sekaligus barrier kebisingan dan polusi.

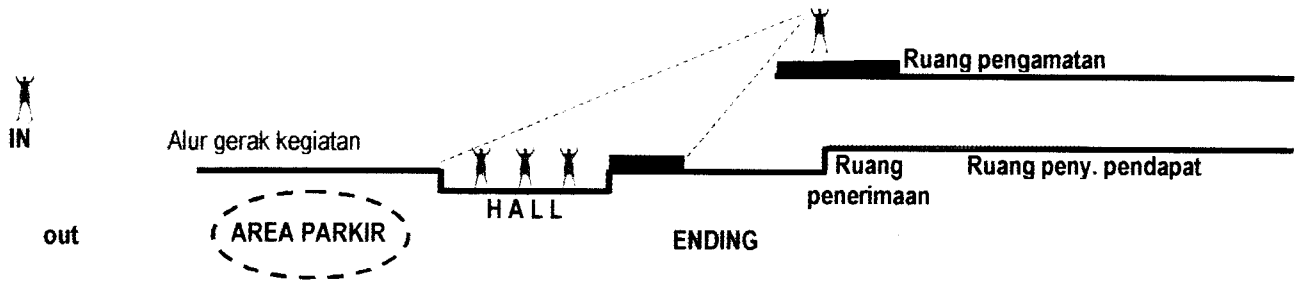


Gbr. 4.11 Orientasi Bangunan Terhadap sinar matahari

4.2.5 Konsep Penataan Ruang Dalam

4.2.5.1 Konsep Penataan Ruang Demonstrasi (HALL)

Dalam kegiatan ini pergerakan demonstrans diarahkan secara sequence (berurut) yaitu dari pintu masuk area gedung menuju tempat parkir pengunjung atau langsung menuju hall, disini (hall) kegiatan demonstrasi dilakukan dari orasi sampai penerimaan wakil demonstrans yang dilanjutkan diskusi dengan pihak DPRD di ruang penyampaian pendapat, kegiatan diskusi dari wakil demonstrans dan pihak DPRD ini merupakan klimaks dari kegiatan demonstrasi dengan ending diarahkan ke area parkir pengunjung atau arah keluar gedung.



Gbr. 4.12 Arah gerak kegiatan Demonstrasi

Ruang-ruang yang dibutuhkan pada kegiatan demonstrasi adalah :

1. Hall

Hall merupakan ruang kegiatan demonstrasi dilaksanakan, penempatan hall diletakkan di halaman depan bangunan agar mempermudah pencapaian dan pertimbangan pada faktor keamanan. Letak ruang ini lebih rendah dari site untuk memudahkan bagian keamanan dalam mengamati dan mengatur jalannya kegiatan.

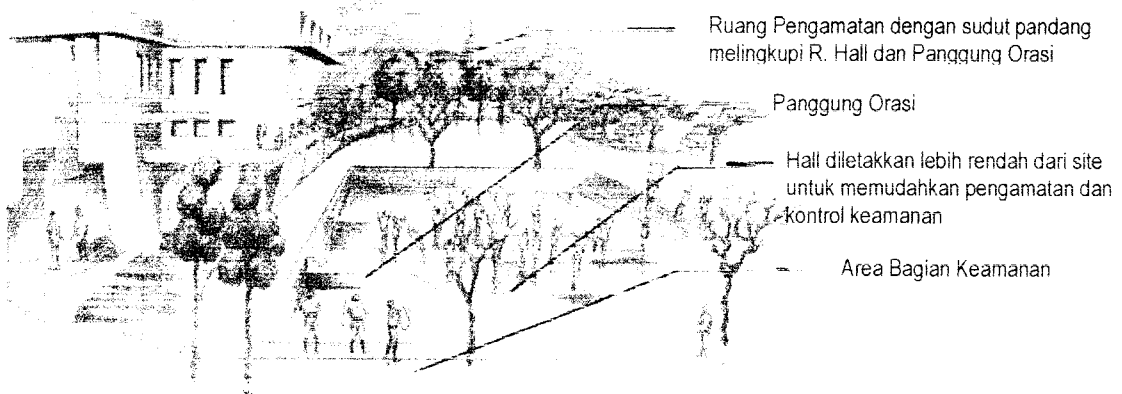
2. Panggung Orasi

Penempatan Panggung Orasi lebih tinggi dari lantai hall dan dapat terpantau jelas dari ruang pengamatan.

3. Ruang Pengamatan

Ruang pengamatan berada didalam bangunan dengan ketinggian lantai yang dapat mempermudah pengamatan pada kegiatan demonstrasi dan dipertimbangkan faktor keamanannya.

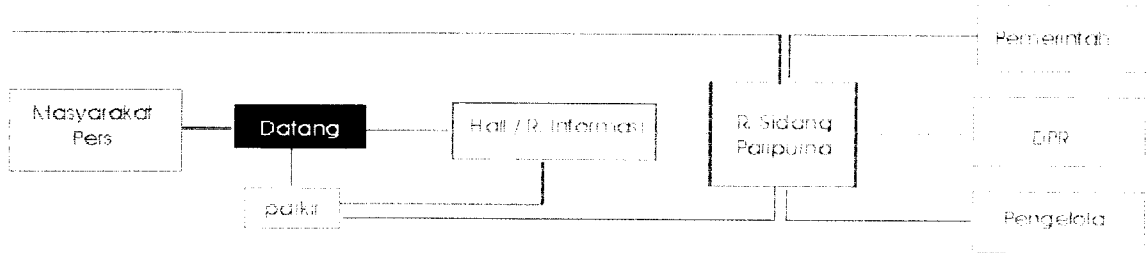
4. Lavatori dan Ruang Servis lainnya



Gbr. 4.13 Sketsa Penerapan Ruang Demonstrasi

4.2.5.2 Konsep Ruang Sidang Paripurna

Pergerakan pengunjung diarahkan dari pintu masuk ke area parkir luar bangunan menuju Lobby dan dilanjutkan ke ruang Sidang Paripurna.



Gbr. 4.14 Arah Gerak Kegiatan Sidang Paripurna

Ruang sidang paripurna terletak di area publik (didepan bangunan) dengan dua lantai bangunan menggunakan void pada ruang peserta yang dibagi dalam kelompok:

1. Pengunjung (masyarakat)

Ruang untuk pengunjung diletakkan pada lantai 2 terpisah dari kelompok peserta.

2. Peliput berita (pers)

Ruang pers diletakkan dibawah ruang pengunjung menghadap mimbar pimpinan.

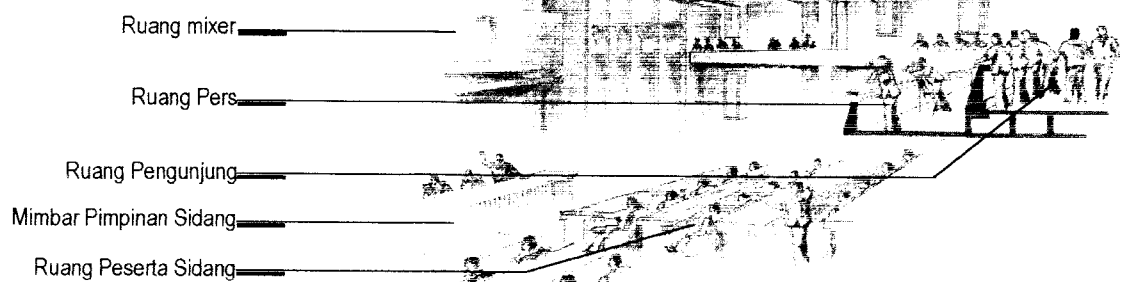
3. Peserta (anggota DPR dan Eksekutif)

Ruang peserta terletak pada lantai dasar ruang sidang paripurna.

4. Mimbar pimpinan sidang

Mimbar pimpinan adalah ruang berupa panggung memanjang yang ditinggikan menghadap pada peserta sidang.

5. Ruang Pengelola (R. Mixer, keamanan dan notulis)



Gbr. 4.15 Sketsa Penerapan Ruang Sidang Paripurna

4.2.5.3 Konsep Ruang Sidang

Ruang sidang terletak pada area ruang semi publik yang berhubungan langsung dengan ruang-ruang prifat anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dengan susunan ruang secara kluster, ruang sidang terdiri dari :

1. Ruang Sidang Fraksi

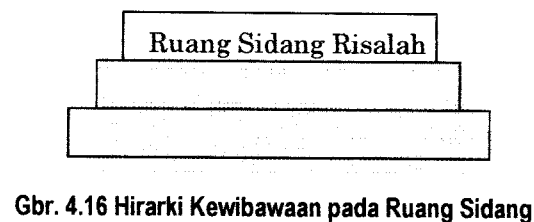
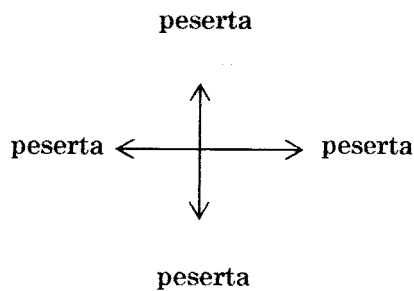
Ruang Sidang fraksi terletak pada kelompok ruang semi publik yang berhubungan langsung dengan ruang fraksi, ruang ketua DPRD dan ruang sidang risalah

2. Ruang Sidang Komisi

Ruang Sidang Komisi terletak pada kelompok ruang semi publik yang berhubungan langsung dengan kelompok ruang prifat seperti ruang komisi, ruang ketua DPRD, ruang wakil ketua dan ruang sekretariat.

3. Ruang Sidang Risalah

Ruang sidang risalah terletak diantara ruang prifat dan ruang semi publik dengan pencapaian secara langsung yang merupakan ruang utama dari semua kegiatan persidangan. Ruang sidang Risalah diletakkan dipusat bangunan sebagai pengikat ruang-ruang lainnya dengan penerapan hirarki tertinggi pada lantai bangunan.



Gbr. 4.16 Hirarki Kewibawaan pada Ruang Sidang

Gbr. 4.17 Hubungan dan Interaksi Peserta Sidang secara ber-kelompok

4.2.5.4 Konsep perletakan Ruang Parkir

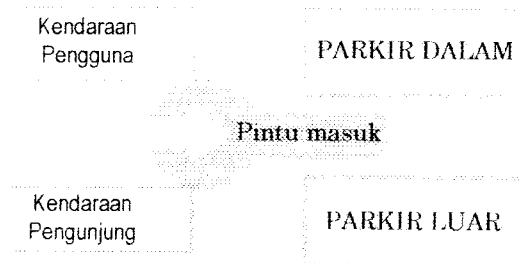
Pada Gedung DPRD Kulon Progo ruang parkir dibagi menjadi dua yaitu :

1. Perletakan Ruang Parkir Pengunjung

Ruang Parkir untuk pengunjung diletakkan didepan bangunan untuk memudahkan pencapaian dan memperlancar kegiatan yang melibatkan pengunjung seperti kegiatan demonstrasi dan sidang paripurna dengan pencapaian langsung dari pintu masuk ke dalam area parkir.

2. Perletakan Ruang parkir Pemakai (anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD)

Ruang Parkir untuk pemakai diletakkan didalam bangunan (semi Basement) dengan pencapaian secara langsung dari pintu masuk, hal ini didasarkan atas pertimbangan keamanan bagi kendaraan pemakai (anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD) pada saat kegiatan demonstrasi atau sidang paripurna berlangsung

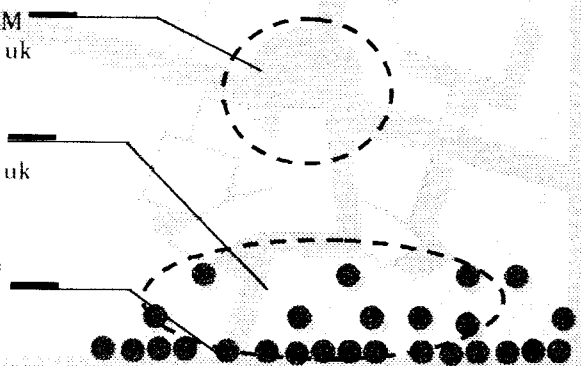


br. 4.18 Arah Pencapaian Kendaraan

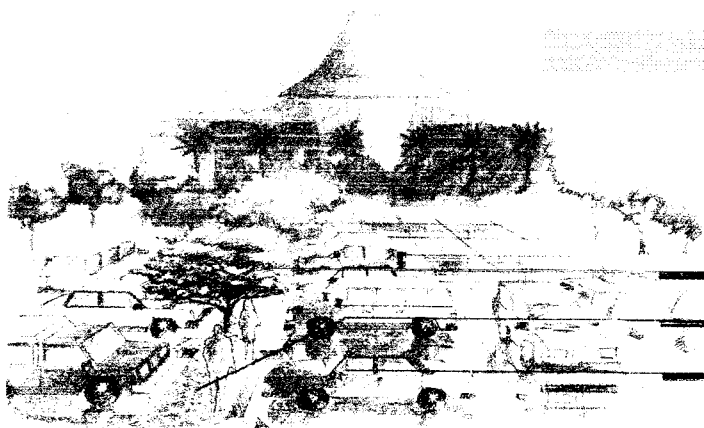
PARKIR DALAM
Area parkir untuk pengguna

PARKIR LUAR
Area parkir untuk pengunjung

Pohon Peneduh



Gbr. 4.19 Pengelompokan Area Parkir



Sirkulasi pejalan kaki pd area parkir

Area parkir

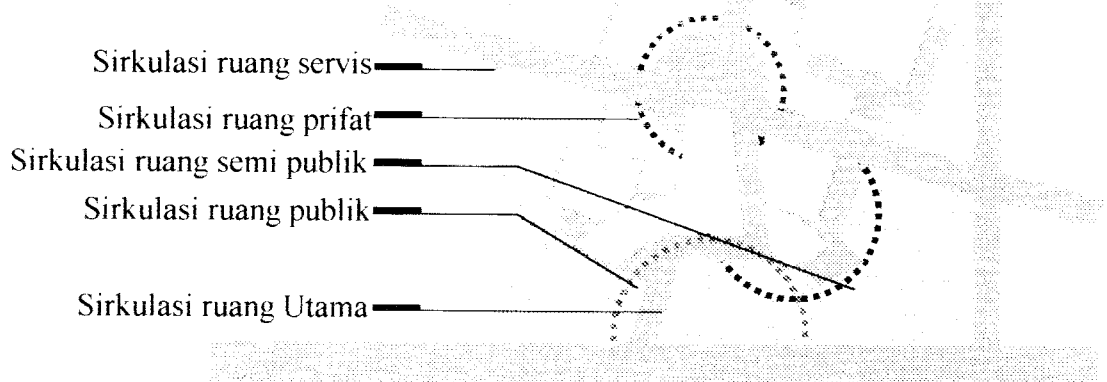
Gbr. 4.20 Sketsa Penerapan Ruang Parkir Luar

4.2.6 Konsep Perletakan Sirkulasi

4.2.6.1 Konsep Perletakan Sirkulasi Ruang Luar

Sirkulasi ruang luar diletakkan untuk menghubungkan gerak kegiatan antar kelompok ruang yang dicapai secara linier dengan pencapaian secara langsung antara lain :

1. Sirkulasi antar ruang fungsi dengan karakter bentuk melingkar yang membatasi area ruang fungsi dan berhubungan langsung dengan sirkulasi utama bangunan yang menghubungkan antar masa dengan tingkat keterbukaan sedang (menggunakan penutup atap tanpa dinding)
2. Sirkulasi utama memiliki karakter bentuk linear terpusat dengan crossing sirkulasi di pusat bangunan yang menghubungkan antar sirkulasi lingkaran dengan tingkat keterbukaan penuh (tanpa atap dan dinding penutup)



Gbr. 4.21 Perletakan Sirkulasi Ruang Luar

4.2.6.2 Konsep Sirkulasi Ruang Dalam

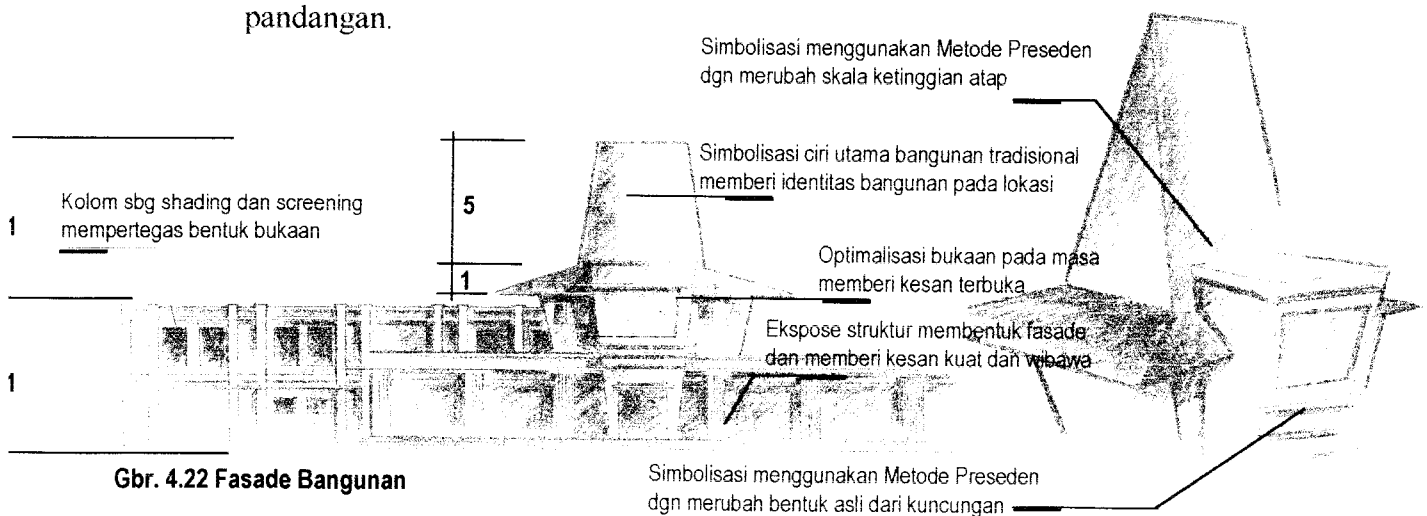
Sirkulasi ruang dalam dimaksudkan untuk menghubungkan gerak kegiatan antar kelompok kegiatan dalam bangunan yang dicapai secara linier dengan beberapa jalur skunder menuju pada sirkulasi primer yaitu :

1. Sirkulasi skunder dengan pencapaian langsung pada sirkulasi primer yang memiliki tingkat keterbukaan rendah (sirkulasi diantara dinding ruang tanpa bukaan penuh)
2. Sirkulasi primer menghubungkan ruang-ruang utama yang bersilangan dengan sirkulasi skunder dengan tingkat keterbukaan sedang (sirkulasi diantara dinding ruang dengan bukaan penuh).

4.2.7 Konsep Pembentukan Fasade Bangunan

Konsep fasade bangunan yang dapat menciptakan kesan terbuka dan wibawa serta kontekstual dengan arsitektur Joglo dicapai dengan :

1. Pengolahan garis dan bentuk pada bangunan yang dilakukan dengan mengekspose struktur yaitu dengan penonjolan struktur dari ikatan kolom dan balok diluar dinding sehingga memberi kesan kuat, dinamis dan wibawa.
2. Mengoptimalkan dan mengolah bukaan secara tegas pada permukaan bangunan dengan menggunakan screening atau shading serta dominasi bahan transparan pada wajah bangunan sehingga mempertegas bentuk bukaan yang memberi kesan terbuka.
3. Menggunakan simbolisasi bangunan Joglo dengan metode preseden yang dapat mewakili identitas bangunan tersebut dengan meletakkan atap model joglo pada masa pengontras dan penggunaan ornamen tradisional untuk menimbulkan objek pandangan.

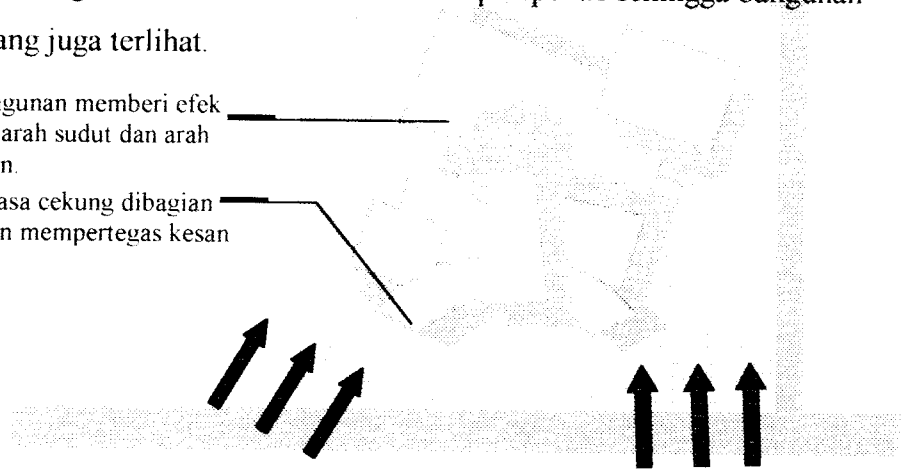


4. Penempatan masa yang memberi makna mengundang atau terbuka secara tepat pada fasade utama sebagai objek entrance bangunan sehingga keterbukaan benar-benar dapat terekspresikan lewat fasade.

- Penggeseran masa bangunan untuk memberikan efek perspektif sehingga bangunan yang ada dibelakang juga terlihat.

Pergeseran bangunan memberi efek perspektif dari arah sudut dan arah depan bangunan.

Penempatan masa cekung dibagian depan bangunan mempertegas kesan mengundang

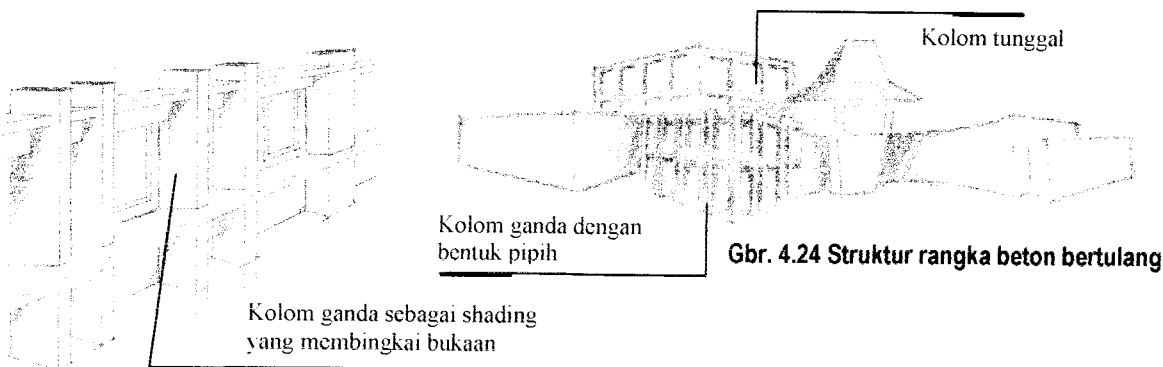


Gbr. 4.23 Arah Bangunan

4.2.8 Konsep Struktur

Konsep struktur pada Gedung DPRD Kulon Progo yang sesuai dengan bangunan gedung perkantoran dan dapat menciptakan kesan terbuka dan wibawa serta kontekstual dengan arsitektur Joglo dicapai dengan :

- Sistem struktur utama menggunakan beton bertulang dengan kolom ganda dan tunggal yang juga berfungsi sebagai shading.



Gbr. 4.24 Struktur rangka beton bertulang

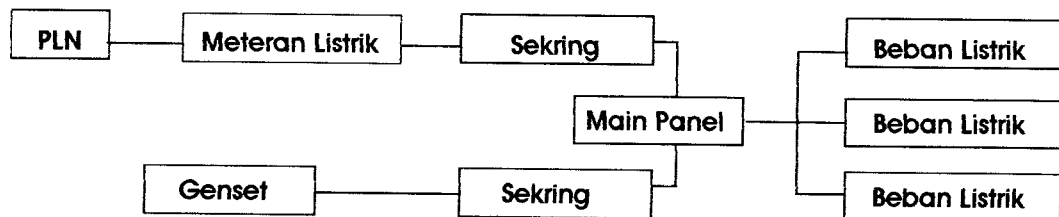
Gbr. 4.25 Kolom ganda sebagai shading

2. Sistem atap menggunakan perpaduan atap miring dan datar.
3. Struktur fondasi menggunakan fondasi plat karena bangunan tersebut bukan merupakan bangunan berlantai banyak sehingga tidak membutuhkan fondasi sumuran atau fondasi basement seperti pada perencanaan bangunan tinggi.

4.2.9 Konsep Sistem Utilitas

1 Sistem Jaringan Listrik

Secara umum sistem jaringan listrik memiliki dua sumber utama yaitu PLN dan sumber listrik dari Genset. Jaringan listrik pada Gedung DPRD Kulon Progo ini menggunakan dua sumber listrik dengan sumber utama diambil dari PLN dan sumber cadangan diambil dari Genset.



Gbr. 4.26 Bagan Pendistribusian Listrik

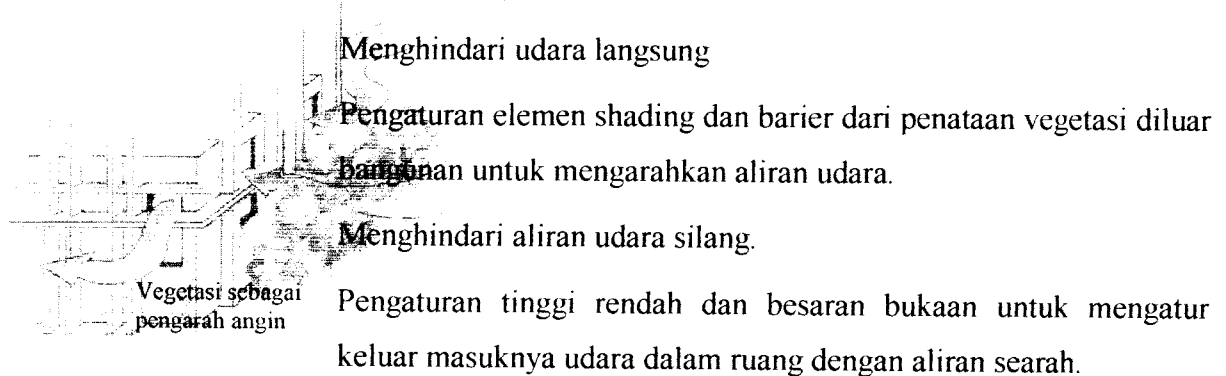
2 Sistem Penghawaan

Sistem penghawaan yang akan diterapkan dalam bangunan Gedung DPRD kulon Progo adalah :

a. Penghawaan Alami

Pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo penghawaan alami menjadi sistem penghawaan utama, dengan bantuan pengoptimalan bukaan-bukaan pada bangunan.

Dasar dari pertimbangan penghawaan alami adalah :



b. penghawaan Buatan

Penghawaan buatan diterapkan pada ruang-ruang publik yang membutuhkan suplai udara tambahan serta pengaturan kelembaban dan suhu pada ruang-ruang tertentu karena kepadatan penggunaannya dengan sistem AC unit. Hal ini diterapkan dalam tujuan mendapatkan kenyamanan pada pemakai di dalam ruang, seperti pada ruang sidang Paripurna.

3 Sistem Komunikasi

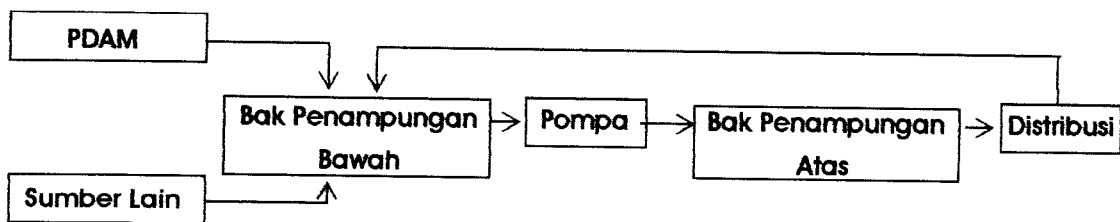
Penggunaan system komunikasi untuk kebutuhan keluar secara otomatis menggunakan system PABX (*Private Automatic Branch Exchange*), dimana sistem ini pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo ditempatkan pada ruang lobby dan informasi, ruang pengelola dan ruang petugas penerima tamu. Pada ruang Sidang Paripurna dan Hall dipasang speaker (pengeras suara) sebagai kepentingan informasi jarak jauh dengan sistim komunikasi diatur oleh operator pada ruang teknis, sedangkan pada ruang sidang lainnya sistim informasi diatur secara manual.

4. Sistem Pemadam Kebakaran

Sistem jaringan alat pemadam kebakaran menggunakan sistim manual dengan alat pemadam berupa tabung gas halon atau gas CO₂. Penyediaan jaringan alat-alat pemadam kebakaran ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan mudah dijangkau dalam keadaan darurat yaitu pada ruang-ruang publik dan ruang-ruang yang memiliki prasarana/ kelengkapan alat kantor yang mudah terbakar, seperti pada ruang-ruang sidang, ruang perpustakaan dan dokumentasi, ruang arsip, ruang teknis dan ruang parkir dalam.

5. Sistem Jaringan Air Bersih

Penyediaan air bersih dicapai melalui dua sumber yaitu sumber yang berasal dari PDAM dan sumber yang berasal dari Air Pompa, dari kedua sumber tersebut ditampung pada bak penampungan air dan kemudian didistribusikan melalui tabung tower air kedaerah pendistribusian seperti Ivatori, cafeteria, KM/WC, mushola dan ruang-ruang lain yang membutuhkan.



Gbr 4. 27 Bagan Distribusi Air Bersih

6. Sistem Jaringan Air Kotor

Sistem jaringan air kotor merupakan penampungan air-air buangan atau limbah dari lavatori dan KM/WC berupa air kotor dan limbah padat, mushola berupa air kotor, dapur dan kafeteria berupa air kotor dan limbah lemak ditampung pada bak kontrol yang kemudian diteruskan ke septiktang dan disalurkan ke sistem drainasi kota yang terlebih dahulu diproses melalui treatment, dan apabila letak pipa drainase kota lebih tinggi dari treatment maka pembuangan dilakukan dengan bantuan pompa yang bekerja secara otomatis.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoniades, Anthony C., *Persepsi In Architecture*, Van Raynold, London, (1992)
- Atmadi, Pumomo. *Apa yang Terjadi Pada Arsitektur Jawa*, Lembaga Javanologi, (1984)
- Budiarjo, Eko. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, (1987)
- Clark, Roger H.- Pause, Michael. *Preseden dalam Arsitektur*, Intermatra, Bandung, (1986)
- D K Ching, Francis. *Arsitektur Bentuk, Ruang dan Susunannya*, Erlangga, Jakarta, (1993)
- Fajriyanto, *Diktat Perencanaan Tapak II*, Universitas Islam Indonesia, (1995)
- Greetz, Hildred. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan FIS-UI, Jakarta, (1981)
- Isaac ARG. *Pendekatan Kepada Perancangan Arsitektur*, Intermatra, Bandung, (1986)
- Ishar, HK. *Pedoman Umum Merancang Bangunan*, Gramedia, Jakarta, (1992)
- Jules, Frederik A. *Dasar-Dasar Persepsi untuk Perancangan Arsitektur*, Introdution of Arsitek, (1994)
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta, (1980)

- Mangunwijaya, YB. **Wastu Citra**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (1995)
- Mintoboedjo, RM, **Bangunan-bangunan Pokok Arsitektur Jawa dari Abad XIII**, FT Undip, Semarang, (1984)
- Pont, Mac Laine, **Javanesche Architecture**, Java Institut, Overdruk Djawa, (1924)
- Raharjo, Wiryono. **Diktat Teori Arsitektur**, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (1996)
- R Ismunandar K. **Joglo Arsitektur Rumah Tradisional Jawa**, Dahara Prize, Semarang, (1990)
- Santosa, RB. **Omah Membaca Makna Rumah Jawa**, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, (2000)
- Sinar Tanudjaja, F. Cristian J. **Wujud Arsitektur Sebagai Ungkapan Makna Sosial Budaya Manusia**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, (1992)
- Sutedjo, Suwondo B. **Persepsi Bentuk dan Konsep Arsitektur**, Djembatan, Jakarta, (1986)
- Tim Binangun, **Media Informasi dan Komunikasi Pemda Tk. II Kulon Progo**, (1996)
- Tim. **Undang-undang RI no. 5 Thn. 1974**, (1974)
- Tim, **Bagan Struktur Keanggotaan DPRD Tk. II Kulon Progo**, DPRD Kulon Progo
- Tjahjadi, Sunarto. **Neurfret Data arsitek**, Erlangga, Jakarta, (1997)